

JURNAL
AGRIBISNIS KERAKYATAN

Volume 1, Nomor 2, November 2008

JAK

Diterbitkan oleh
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas
bekerjasama dengan
Program Studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) Pascasarjana Universitas Andalas
Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPPI) Komisariat Sumatera Barat

JAK	Volume 1	Nomor 2	Hal. 1-82	Padang November 2008	ISSN 1979-9470
------------	-----------------	----------------	------------------	-------------------------------------	---------------------------

JURNAL AGRIBISNIS KERAKYATAN

Volume 1, Nomor 2, November 2008

Jurnal Agribisnis Kerakyatan adalah wadah informasi bidang agribisnis kerakyatan berupa hasil penelitian, studi kepustakaan dan tulisan ilmiah terkait. Terbit pertama kali tahun 2008 dengan frekuensi tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November

Ketua Penyunting

Dr. Ir. Endry Martius, MSc

Wakil Ketua Penyunting

Dr. Ir. H. Nofialdi, MSi

Penyunting Pelaksana

Dr. Ir. Faidil Tanjung, MSi

Ir. Herry Bachrizal Tanjung, MSi

Dr. Ir. Ira Wahyuni Syafri, MSi

Ir. M. Refdinal, MS

Syofyan Fairuzi, STP, MSi

Vonny Indah Mutiara, SP, MEM

Penyunting Ahli

Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, MSc (Universitas Lampung)

Dr. Ir. Djaswir Zein (Universitas Andalas)

Prof. Dr. Ir. Helmi (Universitas Andalas)

Prof. Dr. Ir. Maman Haeruman Karmana, MSc (Universitas Padjajaran)

Prof, Dr, Ir, Muchlis Muchtar, MS (Universitas Andalas)

Dr, Ir, Muktasam Abdurrahman, MSc (Universitas Mataram)

Dr. Ir. Nunung Nuryartono, MSi (Institut Pertanian Bogor)

Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, MSc (Universitas Andalas)

Dr, Agr, Sri Peni Wastutiningsih (Universitas Gadjah Mada)

Dr, Ir, Suardi Tarumun, MSc (Universitas Riau)

Prof. Dr. Ir. Sumardjo, MS (Institut Pertanian Bogor)

Prof. Dr. Ir. Sutriyono, MS (Universitas Jember)

Kesekretariatan

Yusmarni, SP

Ayumi, SS

Alamat Redaksi

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Andalas

Kampus Unand Limau Manis, PADANG, 25163 Telp (0751) 72774

Email : jakfpua@faperta.unand.ac.id

Jurnal Agribisnis Kerakyatan diterbitkan oleh

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas

bekerjasama dengan

Program Studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) Pascasarjana Universitas Andalas

Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPPI) Komisariat Sumatera Barat

ISSN 1979-9470

JURNAL AGRIBISNIS KERAKYATAN

Volume 1, Nomor 2, November 2008

DAFTAR ISI

Assalamu'alaikum:

Menuju Agribisnis Kerakyatan

Endry Martius

Problems And Prospects For Sustainable Agricultural Development In Solok District, West Sumatra, Indonesia 1-16

Mahdi

Keberadaan Pasar Memberikan Multiplier Effect Terhadap Pengembangan Ekonomi Wilayah (Studi Kasus Di Lingkup Wilayah Pasar Gempol Kab. Pasuruan Prop. Jawa Timur) 17-35

Sri Muljaningsih

How Serious Government To Implement Participatory Development Approach?:Case of Irrigation Facility Improvement Project using Fuel Compensation Scheme in Sub-district of Kampai Tabu Karambia (KTK), Lubuk Sikarah District, Solok City 36-48

Putra Idola dan Yonariza

Analisis Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Sumatera Barat (Studi kasus : PT Pupuk Sriwijaya Cabang Sumbar) 49- 56

Widya Fitriana

Analisis Pengembangan Usaha Kerajinan Anyaman Sebagai Komoditi Unggulan Dalam Kerangka Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Studi Kasus Di Desa Taratak Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota) 57-72

Ferdhinal Asful

Program Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Terpadu Dalam Rangka Menuju Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Indonesia 73-82

Vonny Indah Mutiara

ASSALAMU'ALAIKUM

MENUJU AGRIBISNIS KERAKYATAN

Sejak awal 2008, istilah 'agribisnis kerakyatan' mencuat kembali ke permukaan, terutama di Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. Apa perlunya kata 'kerakyatan' itu disambungkan setelah kata agribisnis? Tentu ada yang amat serius apabila selanjutnya kata kerakyatan dinyatakan pula sebagai ciri dari Program Studi Agribisnis tersebut.

Agribisnis kerakyatan jelas merupakan suatu ekonomi yang bermuatan etika: bahwa kesejahteraan rakyat merupakan tujuan dan keutamaan agribisnis. Namun muatan etika inilah yang membuat pertanda bahwa hubungan antara realitas agribisnis yang dipahami secara konvensional dengan kesejahteraan rakyat, terutama petani, ternyata bagai api yang jauh dari panggangnya. Realitas agribisnis bahkan mungkin telah insubordinatif terhadap tujuan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, upaya untuk mempromosikan agribisnis kerakyatan sebagai alternatif sungguh diperlukan.

Agribisnis yang abai terhadap kesejahteraan petani tidak mesti alamiah dan soal teknis belaka. Sebagaimana telah diingatkan jauh hari oleh Amartya Sen (dalam *On Ethics and Economics*, 1988), juga oleh sejumlah tokoh seperti Mubyarto, Hidajat Nataatmadja, Dawam Rahardjo dan Sri Edi Swasono, gejala ini tidak terlepas dari kedudukan ilmu ekonomi kesejahteraan yang kian lemah dan anti-etikalisme. Pendekatan etika dalam ekonomi secara substansial telah lenyap dalam metodologi yang disebut 'ilmu ekonomi positif', yang dengan begitu tidak saja menjauhkan analisa normatif dalam ilmu ekonomi tetapi bahkan juga mengabaikan berbagai pertimbangan etika yang mempengaruhi perilaku manusia. Perhatian ilmu ekonomi hanya terpusat pada aspek rekayasa logistik yang kian menjarak dari etika. Sen bukan bermaksud mengatakan bahwa ekonomi dengan pendekatan non-etika pasti tidak produktif, tetapi sesungguhnya dapat dibuat lebih produktif dengan memberi perhatian yang lebih besar dan lebih jelas pada pertimbangan-pertimbangan etika yang membentuk perilaku dan penilaian manusia.

Walau pertimbangan etika sesekali dimasukkan dalam ekonomi, namun keutamaan dan kriteria kesejahteraan yang dipakai masih dikaitkan dengan alasan-alasan yang cenderung praktis dan berdasarkan moral utilitarianisme—bahwa kesejahteraan adalah penjumlahan keseluruhan manfaat atau kesenangan yang tercipta. Pernyataan moral oleh utilitarianisme, yang dalam hal ini tidak dipisahkan dari pengertian 'adil', berpegang pada dua ide pokok: (i) apa yang benar ujung-ujungnya adalah kesenangan (*pleasure*), dan (ii) orang diwajibkan mengambil tindakan yang akan memberikan kesenangan yang terbesar bagi orang yang jumlahnya terbanyak. Akibatnya, semua orang cenderung berharap terwujudnya keadaan sosial yang optimal sebagaimana dimaksud oleh kriteria optimalitas Pareto: yaitu jika dan hanya jika tidak ada kesenangan seorangpun dapat ditingkatkan tanpa mengurangi kesenangan dari seseorang yang lain. Namun, Sen kembali membahas dengan jelas bahwa kriteria optimalitas Pareto hanyalah tanda keberhasilan sosial yang sangat

terbatas, karena merupakan suatu kondisi optimalitas dengan sebagian orang dalam keadaan amat-sangat sengsara sementara yang lain berkubang kemewahan. Lebih parah lagi adalah tendensi bahwa golongan yang sengsara itu hanya boleh diperbaiki keadaannya apabila tidak mengurangi kemewahan yang dinikmati oleh golongan kaya.

Jurnal ini tidak diragukan lagi merupakan media untuk berbagi gagasan ilmiah dan hasil-hasil penelitian yang berguna untuk mengembangkan konsep, teori dan pendekatan agribisnis kerakyatan. Walau begitu, partisipan (penulis) tidaklah mesti memusatkan perhatiannya pada ekonomi ataupun agribisnis yang berpendekatan etika. Pembahasan agribisnis pada aspek-aspek yang terkait dengan pendekatan rekayasa logistik (non-etika) dalam agribisnis masih amat diperlukan. Pada volume perdana ini sudah dituangkan sejumlah tulisan, baik berupa tulisan analitis maupun berupa hasil penelitian. Marilah kita berpartisipasi pula menyumbangkan gagasan-gagasan untuk volume-volume berikutnya, dengan harapan agar ilmu ekonomi dan khususnya agribisnis dapat dibuat lebih produktif dan lebih berpihak kepada rakyat, sebagaimana harapan Sen yang sekaligus merupakan harapan kita pula.

Endry Martius

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN SOLOK DISTRICT, WEST SUMATRA, INDONESIA

Mahdi

Abstract: *This paper studies the implementation of “green revolution” in Indonesia that has been the main policy for Indonesia’s agricultural modernization and food security. The revolution has significantly increased rice production, but the sustainability is under question because of its negative effect both to environment and to income distribution. This paper also finds the strategies for sustainable development of agriculture by learning the case of agricultural development in Solok District of West Sumatra. Intensive use of agrochemical inputs in upland polluted both water and soil in lowland eventually harms human health. Both spatial disparities and income inequality had been raised during last three decades when rice farming zone and activities have been gotten huge investment and subsidies while the non-rice farming zone and activities were ignored. To bring sustainable development, three policies are recommended; promoting organic farming, developing and empowering local agricultural institution and reforming development planning and decision making for wider local people participation.*

Keywords: *agro-ecological zone, sustainable agricultural development, green revolution, West Sumatra, development strategy*

INTRODUCTION

Indonesia has been implementing “green revolution” to modernize its agricultural sector. The revolution started by the end of 1960s as a national development focus. Self sufficient of rice production was chosen as a main target. Almost all rural development activities were focused on rice production. Therefore, the target was achieved in 1984. On the other hand, non rice agricultural commodities were gotten lack of government attention. These commodities development have been grown by most of demand push. Upland horticulture farming in the areas

where infrastructures available, for example, is using intensive chemical fertilizer and pesticide that are introduced by private agricultural inputs enterprises’ sales workers rather than by government extension workers.

However, both of lowland and upland as well as highland Indonesia’s agricultural developments are facing many problems. Aggressive chemical external input has been given main contribution to environmental problems. Ultimately, it produced economic and social problems. Yield trend decreases and production cost increases. Moreover, population growth

is still continuing that force high pressure to natural resources. Income inequality among farmers is to be worse during last decade. Those problems are Indonesia's sustainable agricultural development challenges that are forcing us to find out new strategies for future development.

This paper discusses the problems and potentials of Indonesia's sustainable agricultural development which Solok district, West Sumatra, is chosen as a case. It is selected because it could represent Indonesia's agricultural development. This district was a target of green revolution due to its lowland rice field potential. Its upland area is Sumatra's horticultural production centre that supplies vegetables and fruits to surrounding cities. In addition, its highland has tea plantation, modern form of agricultural enterprise, and shifting cultivation, traditional agriculture, as well as protected forest in mountainous areas. Studying Solok agricultural development could mirror Indonesia's agricultural development as well because of its agricultural zone diversity.

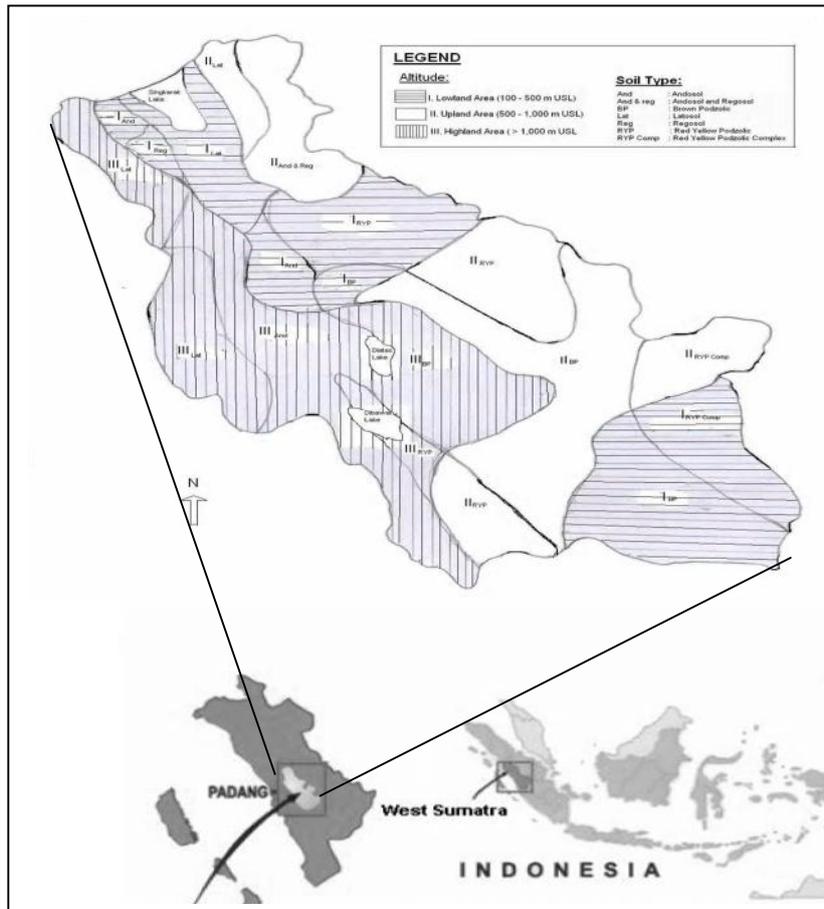
The paper is written mostly by using of author knowledge about the district where author had done research and was involved in many local

government agricultural development projects. Biophysical and demographic data are taken from official local government report and planning documents.

The paper objectives are: (1) to explain agricultural development in Solok district and its farmers management practices both in lowland and in upland as well as in highland areas; (2) to discuss the problems, issues and prospects of Solok district's sustainable agricultural development; (3) to formulate strategies for sustainable agricultural development according to agricultural development potentials in lowland, upland and highland areas.

OVERVIEW OF BIOPHYSICAL AND DEMOGRAPHIC OF SOLOK

Solok district covers an area of 3,738 km² and is divided administratively into 14 sub districts. It is located between 0°32' - 1°45' south latitude and 100°27' - 101°41' east longitude (Figure 1). It has variation of topography, climate and soil type (Pemda Solok, 2004). Agro-ecological zone in local government planning document is mostly based on altitude, because this district has extreme variation of altitude between lowland and highland mountainous areas (Pemda Solok, 2000).



The altitudes are grouped into three categories. First is the area with 100 – 500 m upper sea level (USL) in its central through northern and small portion in southern part which is categorized as lowland areas. Second group is the area with 500 – 1000 m USL in its central through southern and small portion in northern part which is categorized as upland areas. Third altitude group is the area with more than 1000 m USL in western part of district across north through south which is categorized as highland area.

Land in lowland areas is mostly plain, according Solok district statistical office. Land slope ranges between 0 – 10%. Its southern part has two soil types, brown podzolic and red yellow podzolic complex. While its northern part's soil type are red yellow podzolic, brown podzolic, latosol, andosol and regosol. Irrigation infrastructures are available at most of area with sufficient water supply throughout years. The sources of irrigation water are from rivers. There are seven rivers flowing through this zone and four of them were dammed for irrigation. In addition, southern part of this zone is also part of upland areas irrigation areas that the water flows from upland through it. Roads are also available in good condition to support agricultural activities.

Northern part of upland areas soil type is andosol and regosol and small portion is latosol. The other part, the biggest, has three soil types, red yellow podzolic, brown podzolic and red yellow prodzolic complex. Slope here is higher than lowland areas and its topography are quite varies which most of them are slope land and small portion is plain. The irrigation infrastructures are not quite good in this zone, while sufficient water supply from many small rivers. There are two lakes, Diatas Lake and Dibawah Lake, in highland zone that their outflows are the main source of irrigation water of this area. Road infrastructures were also developed with hotmix to local market and between rural areas are connected by relatively good condition of rural roads.

Highland areas have also varied soil type, latosol, andosol, brown podzolic and small portion of red yellow podzolic. This zone is dominated by steep slope mountainous areas in the most western part. Most of area is covered by forest. This area has poor infrastructure.

With wide range of altitude, it, consequently, has wide range microclimate that is categorized into C, D and E climate, according Aldemen classification, with 7,768 mm average rainfall and 34 – 212 rainy days a year. Its northern gets lower rainfall than central and southern part. The lowest rainfall is usually recorded in July, while November to February has higher ones. Temperature is varies and influenced most by altitude. Temperature range in lowland areas are between 28.5°C to 31.30°C and in upland and highland areas are between 12.5°C to 24.60°C (Pemda Solok, 2000).

In 2003, according Solok district statistical bureau, it is inhabited by 330,507 number of population. The recent density is 88.42 per sq km in average, but lowland area has higher density than upland and highland areas. Population growth rate was 0.97% during last five years. About 46% of the populations are in working age (20-59 years old) and most of them, about 69.62%, are working in agricultural sector.

AGRICULTURAL PRACTICES

Agriculture is main livelihood and mostly contributes to local income. In 2003, agricultural sector contributes 42.08% of Solok district Gross Domestic Income. The rate of agricultural sector was higher than average. In 2000, it contributed

41.28% to total regional income (Solok Statistical Office, 2004). Farmers practice both crops monocultures and crops diversification, livestock and fish raising. Therefore, a lot of kinds of crops can be found within the district that have been practiced since long term ago. However, specific commodity can be found in one zone and not in others. The following part explains agricultural practice by farmers, input and technology use, and land and crops management in each agricultural zone. Because of huge number of commodities, the explanation will be limited on three major commodities in each zone; those are mostly cultivated and given highest contribution to the local economy.

Lowland areas

The three major kind of agricultural practices in lowland areas are rice cultivation in wetland, fish raising in suitable location and horticulture cultivation in dry land. Farmers practice either monoculture or diversify for both commercial and subsistence.

Rice cultivation is main Solok district agricultural production and most of its rice field is in lowland areas. Rice that produced here supplies not only in West Sumatra province but also in its three neighbors provinces, Jambi, Bengkulu and Riau province. In 2003, Solok district produced about 420,000 ton of rice and about 65% was produced in this zone (Solok Statistical Bureau, 2004). Paddy fields are cultivated twice or three times a year because of sufficient water supply and good irrigation facilities. Almost all of farmers here are using “green revolution” technologies. Modern high yield rice varieties, chemical fertilizer

and toxic pesticide are common inputs, meanwhile in many spots, Integrated Pest Management (IPM) has been introduced. Mechanic tools are also used to ease particular heavy work. Hand tractor is used widely for land tillage and threshers are worked for harvesting. Most of production is marketed.

Fish raising is also practiced by farmers in favorable places, wherever water is available. There are three kinds of fish raising in this zone, raising fish in private pond, in common water canals – either in irrigation channel or in rivers stream as well as in lakes, and fishing in open water. Raising fish in private pond has been practiced since long period ago either for commercial or subsistence purposes. Commercial fish raising usually applies modern input such as processed feed and high yield fish. Meanwhile, subsistence fish raising usually practices traditional techniques without modern input and it is developed mostly by small farmers as a source of household protein. Raising fish in common water canal (*keramba*) is a new technology that have been raised since last fifteen years for most market purposes, where farmers drown trellis boxes or float nets in water surface to grow fish, and the processed feed is sowed regularly, twice a day. Open water fishing is usually practiced by most of landless small farmers using fishing tools or/and net and small manual boat. This practicing can be found only in lakes and slow stream rivers and one of important source of income for poor household.

Horticulture crops, such as chili, tomato, cassava, sweet potato, etc, are also cultivated by farmers in

particular dry land within this zone, including backyard. Usually, it is one of farmer diversified income either for commercial or for subsistence. Modern inputs, particularly inorganic fertilizer and chemical pesticide, are also commonly used.

Briefly, in three kinds of agricultural practices, modern inputs have been implemented widely in Solok district lowland agriculture. They have been contributed to people income both for large and small farmers.

Upland areas

In upland zone, rice, horticulture cultivation and small plantation are three major agricultural practices. In addition, small portion of secondary forest can be seen here.

Unlike lowland area, rice fields here are in hill waist with relative high slope and were constructed likely big terraces. Rice cultivation here also uses hugely external inputs. Most of paddy fields are cultivated intensively twice or three times a year both for commercial and subsistence purposes.

Horticulture crops are major commodity particularly at plain area in southern part of this zone and have been supplying many surrounding cities demand. Onion, lettuce, tomato, broccoli are kinds of vegetables that always produced here. Production motives are purely commercial and have been practiced since long period ago. Farmers rotate the commodity depend on their market price prediction. Lettuce, for example, is grown when trend of it price in nearby market increase, after harvesting, when others commodities have good price farmers will choose those commodities for next

seasons. Modern inputs are used intensively by farmers with a profit motive by improving yields. Pesticides, for example, are sprayed regularly and sometimes in the high volume. This behavior are encouraged by private agricultural inputs industries sales, who sales progressively their products to farmers, while extension workers do not give enough advices to them.

Farmers here also produce plantation commodities. Small rubber (*Hevea brasiliensis*) plantation and orange are grown in small portion of northern part of this zone, while they are not a main source of income, these plantation have been practiced traditionally since long period ago. Cinnamon and coffee are two major plantation crops in southern part that planted in relatively high diversity with others, such as *jengkol*, jack fruit, durian, and others perennial crops. Most of the land that allocated for these practices is in hill waist where water is not sufficient to irrigate the land. Meanwhile their yields are low, farmers in this upland area get better benefit because they is required relatively little external inputs and save labor.

Indeed, agricultural practices in this upland zone vary both in commodities and in way. Rice and horticultures are grown in using high modern external input. and on the other hand, plantation crops are also developed by many farmers in traditional way.

Highland area

There are two main kinds of agricultural practices in highland area, modern tea plantation and small plantation, although rice field and horticulture also exist, but they are

relative small in size and are fragmented. Those agricultural lands are small portion because most of this zone is still covered by protected forest. In addition, poor farmers household pick up timber and non timber forest product as one of important source of income.

Modern tea plantation here is Dutch colonial era heritages. It was located at fertile and relatively plain in highland area. It is now managed by PT. Perkebunan Nusantara VI, Indonesian Government owned Plantation Enterprise, in very modern way, and most of its workers are came in from outside.

Like in upland areas, main small plantation crops that grown in highland area are cinnamon, rubber and coffee. These plantations have also been practiced traditionally since long period ago and diversified with other commodities. Most of farmers do not intake inputs in this style of agriculture and land that allocated for these practices is hill waist with step slope. In early time, when perennial crops have not covered soil yet, farmers grown vegetables as sources of cash income and after two or three years, when perennial crops have covered soil, farmers sometimes look for other portion of land and start to open the new one. This practice need more land and sometimes they slash the primary forest.

Many small and landless farmers harvest forest product as their important income both timber and non timber. Pick up honey from wild forest bee is an example of non forest timber product that practiced popularly by local people here. Timber is still harvested by local people while

almost all of forest areas have been included in protected areas according national laws.

In conclusion, very modern and very traditional ways of agricultural practice are exist in Solok district highland areas. Tea plantation is very modern and small plantation, many western experts called shifting cultivation, is very traditional agricultural practice. Pressure to forest protected areas is still occurring.

ENVIRONMENTAL, ECONOMIC AND SOCIAL PROBLEMS

Above agricultural practices were emerged environmental, economic and social problems in every zone. Those problems make sustainable agricultural development is under question. Following are description of those problems by areas.

Lowland areas

Figure 2 summarizes the problems and their causes that grouped into four categories, health, environmental, economic and social problems. The problem in a category

can cause problem to others categories.

Biodiversity loses, soil degradation and water pollution are environmental problem that have been concerned since last several years. Biodiversity loses is impact of destruction of quality soil and water. The pollutions are caused by aggressive use of agro-chemical inputs. Soil pollution gives impact on diminishing of soil fertility that ultimately decreases crops yield. Yields trend is decreasing or can be maintain with higher volume of fertilizer than that before. Local government agricultural report shown that using of inorganic per hectare of land has increased during last five years from 300 kg/ha in average in 1998 to 325 kg/ha in 2003. Besides, surface water pollution caused by both residue of chemical fertilizers and pesticides and residue of fish raising feeding. In 2002, local newspaper reported that reduction of wild fish population in Singkarak lake, in its northern part, that fish catcher income was dropped. Fish risers, likewise, are facing yield diminishing.

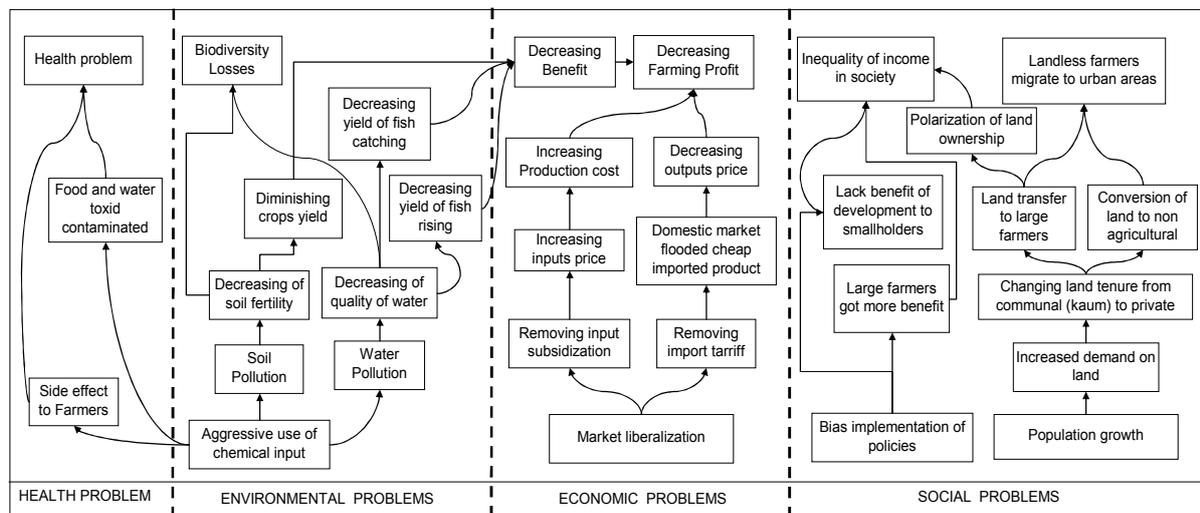


Figure 2. Agricultural development problems and their causes in lowland Solok district, West Sumatra province, Indonesia.

The above mentioned environmental problems ultimately lead to economic problem. Decreasing soil fertility, of course, means decreasing of farmers' benefit and on the other hand, cost production increased in result of market liberalization that force to remove modern agricultural input subsidization, though farmers dependency on those inputs are so high. Farming profit is ultimately falling down. The problem is to be worse when agricultural product prices fall down as an effect cheap agricultural product import flooding Indonesia's market as an impact of removing import barrier as an important point of agreement in letter of intend that signed by Indonesian government and International Monetary Fund (IMF) as a requirement to get helping from IMF after economic crises in the mid of 1997. Water pollution cause reduction of fish raising yields as well as reduction of wild fish population that affected decreasing of fish riser benefit and income of fish catcher in open water.

Social problems are also emerged as impact of past aggressive agricultural development in this lowland area. Green revolution technology and institutional introduction gave more benefit to big farmers than to small farmers. Using of subsidized input, access to credit are more in big farmers. This condition forces to increase inequality among rural people. Otherwise, agricultural employment decreases in result of using of mechanical machines in particular paddy field, while the number of worker are still increasing because of high population growth in the last decade. Moreover, water pollution, that reduce wild fish population in open water, make poor fish catcher trapped into deeper poverty. In addition, high population growth in this area increases land demand both for agricultural and non agricultural purposes. Increasing land price leads small farmers to sell their communal land. This trend is forcing the changing land tenure from most of communal to private. Polarization of land ownership is appeared that leads

to make inequality of income in society. Furthermore, land is converted to non agricultural often occurs in this area because of urbanization process and high population growth in particular near urban areas. Therefore, small farmers are trapped into landless farmers and sometimes move to urban and work in informal sectors.

Aggressive use of agro-chemical inputs also leads to health problem both within areas and in outside. Farmers may have higher risk due to contact to toxid pesticide. Consuming contaminated the residue of food and water could make health problems in others areas far from here.

Upland areas

Biodiversity loses, soil erosion, reduction of soil fertility, land and water pollution are the environmental problems that emerged in upland areas (figure 3). Small plantation in steep slope of hill waist is under water erosion threat and it has been occurred. Reduction of soil fertility also hit this zone because of aggressive use of inorganic fertilizer in the past. In addition, land and water are polluted by toxid pesticides that have been sprayed regularly by farmers. Polluted waters from this zone flows to lowland area and add the water pollution problem in that zone.

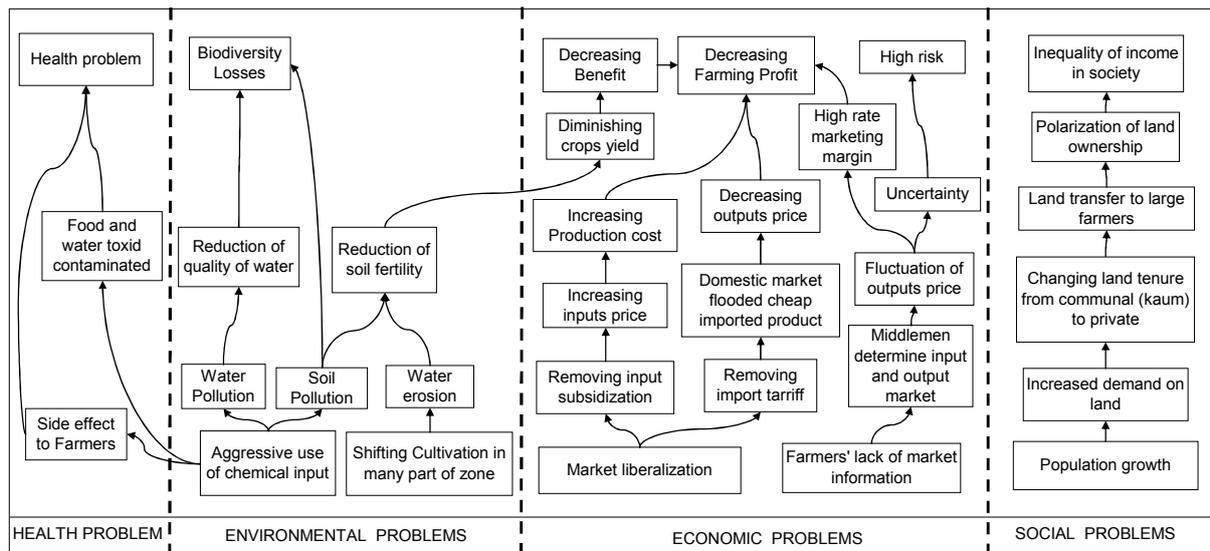


Figure 3. Agricultural development problems and their causes in upland Solok district, West Sumatra province, Indonesia.

Like in lowland area, the economic problem in the upland area is increasing production cost as an impact of removing subsidization. Moreover, production prices fluctuation is another farmer problem. Therefore, they face uncertainties and high economic risk, particularly for vegetables commodities. This problem is occurred because farmers have lack access to market information. Middle-

men still have power to control marketing of most of horticultural products. Although local extension office has provided many price information boards in many places, but the information updating was scare.

Income inequality is the main social problem in upland areas. Large farmers get more benefit than small farmers in new external technologies implementation. Profit motive orient-

ed leads large farmers to extent their land and small farmers are attracted to sell their land, so, polarization of land ownerships is also occurring here. This trend also mirror the changing of land tenure system from most communal to private ownership

Highland areas

Figure 4 shows the problems and their causes in Solok district highland area. Like many highland areas in Indonesia, the zone was neglected in major past national agricultural development. Poor infrastructures and support services are appearing that mirror regional

disparities to lowland and upland areas.

Deforestation and forest degradation and soil erosion are three major environmental problems. Practicing of shifting cultivation by most of farmers is blamed as source of these problems. Besides that, biodiversity loses is another problem that concern by particular scientists and government officials. This is further impact of forest degradation. In monsoon season, landslide here often makes news in local media. In addition, it also leads to flood in lowland areas because most of forest here is lowland catchments areas.

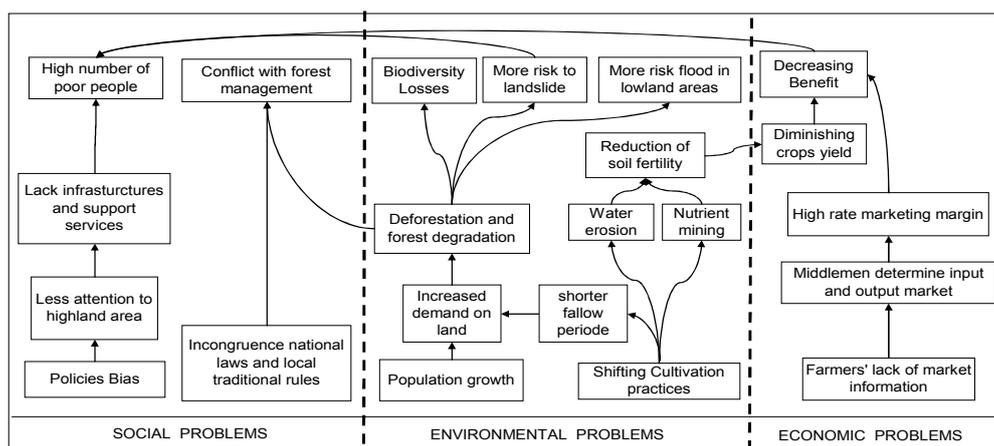


Figure 4. Agricultural development problems and their causes in highland Solok district, West Sumatra province, Indonesia.

Shifting cultivators are facing diminishing crops yield due to reduction of soil fertility. Reduction of soil fertility is caused by water erosion and nutrient mining in shifting cultivation activities itself. Therefore, decreasing farming benefit and lack of infrastructures and support services are expected a main source of high number of poor people here. Fallow period is to be shorter due to high demand of land in result of population growth.

In social dimension, conflict between protected forest management boards and local people emerge in result of differences point of view over forest resources management. Shifting cultivation and harvesting forest product are prohibited by national forestry laws, but local people do not accept and they still refer local customary laws that give them chance to pick up particular forest product for non commercial. Local people, for example, feel the forest areas are still under their local customary mana-

gement, where they allowed harvesting timber from forest area for non commercial purposes. On the other hand, protected forest management boards refer to national laws that strictly prohibited all activities in forest areas. Another source of conflict is land tenure that imposed by local people in shifting cultivation does not also sequence to national forest laws. Decentralization efforts in Indonesia now have not touch forestry sector yet. Shifting cultivators face uncertainty over their land tenure.

Those problems, sometimes, could not localize in a zone only, but they could interact each others over zone and social boundaries. Water pollution problem in lowland, for instance, also caused by agricultural input residue that flow to water bodies both in highland and upland areas. Vegetables that are contaminated with toxid pesticides, another example, could make health problems to urban people whom consume them.

ISSUES IN AGRICULTURAL SUSTAINABILITY AND PROSPECTS

Aggressiveness of “Green Revolution” implementation

Indonesia has been implemented green revolution aggressively. The revolution started by the end of 1960s, that was called “Program Bimbingan Massal (BIMAS/mass guiding program), when growth of agricultural sector was chosen as a priority of national economic development and self sufficient of rice production was selected as a target, at that time, Indonesia was the biggest rice importer country.

New paddy cultivation technology, that was called “Panca Usaha-tani” (five farming technologies packet)—using high yield varieties, intensive land tillage, intensive pest control, irrigation, and post harvesting treatment-, was introduced. Subsidized modern seed, fertilizer and pesticide were supplied in particular areas in Java, Sumatra and many part of Sulawesi islands. Agricultural cooperatives were established at both national, provincial, district and village level as a channel input distribution. Rural infrastructure, such as irrigations, roads, schools, and health services center, were developed throughout country. Agricultural credit and its institutions were established and their sub branches were opened at sub district level (kecamatan), and then collaboratively with agricultural cooperative, the credit was distributed to farmers at village level. Extension service was provided freely to encourage and guide farmers to implement the new technologies. Many research centers were established and talented young researchers were trained. To stabilized rice price, floor and ceiling price policy were adopted and Badan Urusan Logistik (BULOG/logistics distribution authority) was introduced as a technical institution that will buy the rice when its price go down over floor price and will flood the market when its price trend increase over ceiling price.

This aggressiveness produced five implications. First, dependency of farmer to government program, particularly in lowland areas, was high. Previously, farmers arranged their agricultural activities independently. For instance, farmers have institution to manage irrigation system locally

and independently to outside intervention, but after technical irrigation system replaced local irrigation, farmers were highly depended irrigation management to government institution, local initiative was dried. Second, farmers highly depended on external input in their agricultural practice. Chemical fertilizer and pesticide, for instance, are using widely and highly in result of past aggressive extension to implement them. Many program to reduce these dependencies such as integrated pest management (IPM), and organic farming had launched, but its progress is running slowly. While subsidization of those input were cut, farmers have no others inputs alternative and its cause decreasing of productivities. Third, environmental problems, as mentioned above, emerge to surface as new challenges as an impact of high intake of chemical inputs. Fourth, inequality of income distribution was grown up during last three decades because local elite got larger benefit from “green revolution” programs. Fifth, disparities between favored and less-favored areas in term of income distribution, infrastructures, support services also increased.

Market liberalization

Market liberalization has been given three impacts on sustainability of agricultural development here. First, agricultural outputs price is fall in average because foreign substituted product flooded Indonesia’s market as import barriers were removed. Second, Indonesia government is under pressure by international trading communities to remove subsidization of agricultural inputs. The removing increased inputs price and ultimately increased production cost. Of course,

farmers’ competitiveness falls down. On the other hand, third impact, market liberalization gives more opportunities to Indonesia’s farmers to compete in international level. Assigned free trade agreement in ASEAN (AFTA) and Asia Pacific (APEC) region are increasing market demand of qualified product from everywhere, including from Indonesia.

Decentralization and “Reformasi” agendas

After Asian economic crisis in mid 1997, Indonesia has been changed its political systems, governmental institution, decision making process, and economic and social development strategy. All of these are called “Reformasi” agendas.

Indonesia’s political system has been changed dramatically from authoritarian military rule to more democratic system, where Indonesia has arranged successfully three times election after “Soeharto regime” step down. The latest was successful direct presidential election. Governmental institutions also are changed, along with decentralization, where district governments have larger authority to manage their territorial including agricultural activities. In Solok district, like others district in West Sumatra province, decentralization is translated to give power not only to district level but also to local level, nagari level. Nagari is the lowest level of administration that is developed based on local culture. This changing give broader chance to local people to participate in decision making process, particularly related on agricultural development decision making process.

In addition, Indonesian government’s economic and social develop-

ment strategy is emphasized on improving equality of income distribution and sustainable economic development, according Indonesia's five years development plan (Program pembangunan nasional/PROPENAS). Economic growth, including agricultural growth, is pursued equally among society. Its meaning is agricultural development in local level to pursue equality is congruent with national strategy.

Role of Agricultural Sector in Solok's Economy

Solok district's economy highly depends on agricultural sector. Most of its workforces are working in this sector and most of district domestic income is also contributed by this sector. High population growth, environmental degradation, and market liberalization make its economic sustainability problem under question.

Solok District's agricultural potentials

On the other hand, Solok district has huge agricultural potential. Most of its lowland and upland areas has well infrastructure. Roads are available to reach all of lowland and upland as well as most of highland villages, modern irrigation systems are available for most of lowland and upland areas. Water is also available throughout years. Three regional agricultural research centre, regional rice, fruits crops, and spicy crops research center, are situated here. Previous development, both positive and negative, added all of agricultural stakeholders' experience. Besides that, demand for agricultural product still increase because of population growth and free trade among particular

ASEAN countries. All of those are the prospects of Solok district agricultural sustainable development.

STRATEGY FOR SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT

To avoid or to minimize negative impact of agricultural development in future and to give better and equal benefits to whole society, we should develop new strategies for sustainable agricultural development. They have to tackle properly those of problems and should avoid carefully emergence of new problems. Following are five strategies that are formulated to remedy those problems and develop sustainable agriculture.

Lowland Area

Four strategies can be offered to tackle the issues in agricultural sustainability in lowland areas. First, implementation of organic farming can remedy environmental degradation issues and health problem as well as economic issues. Organic farming uses as minimum as chemical inputs, such as chemical fertilizer, and pesticides, and replaced them with organic inputs such as composts and integrated pest management (IPM). Sometimes, organic farming have higher production cost than that inorganic farming that makes their competitiveness are low. To solve this obstacle, two side ways could be used simultaneously, impose tax on agrochemical inputs and or promote consumption of IPM and organic product. The former way will increase production cost of inorganic farming that reduction of its competitiveness over organic farming. The later way purpose is to improve demand of

organic product in particular middle and high class consumers.

Second, improve farmers competitiveness is a strategy to help farmer counter act over market liberalization problem. Besides policies that have mentioned above, two more ways can be added to improve farmers' competitiveness, strengthen farmers' institution and improve farming technologies. Farmers' institution such as farming cooperative could be coordinated agricultural inputs and outputs trading activities, so that, it will give more benefit to the farmers both by reducing input prices and by increasing outputs prices at farmer level. Strengthening farming cooperatives can be done by giving certain legal status and training to its official. In addition, Farming cheaper environmentally sound technologies should be found to reduce production cost on one hand and increase productivities on the other hand, so, farmers' competitiveness will be improved. Research activities must be arranged continuously.

Third, participatory approach on development planning and its implementation process is a strategy that could be solved the problem related on inequality incomes distribution. Participatory approach here means involving all stakeholders at local level in decision making process that hopefully will hinder bias. What are development objectives in which location?, who are the targets?, what are development focuses?, how will it be implemented and by whom? are the questions that will be answered by all of stakeholder equally. This approach is possible because Indonesia has been implemented decentralization of

governmental systems not only to district level but also to local level.

Fourth, population growth control is also needed to avoid increasing number of land less and pressure of population to natural resources. Indonesia's family planning was cut after 1997 economic crises and increasing population growth is appeared. Indeed, formulation and implementation of this policy are decided by local government.

Upland Area

In upland areas, four strategies that have been formulated in lowland areas can also implemented here, but unlike lowland areas, farming cooperatives here could play role not only on agricultural trading activities but also on market information finding. Local government should help them to organize market information finding by providing information technology equipment and training to use it in effort to find horticultural market information such as outputs and inputs prices, volume of demand of each crops, volume of supply of each crops from others agricultural zone and etc. these activities can reduce role of middlemen in this area as well as mitigate economic risk.

However, one more strategy is needed in upland area. It is research and extension related on shifting cultivation, because shifting cultivation is blamed as a source of erosion problems. Many research activities to find the environmentally sound technologies for sloping land have been done. For instance, International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) has found and implemented sloping agricultural land technology (SALT) (Partap and

Watson, 1994) and/or International Centre for Agro-forestry (ICRAF) also has been done to tackle the issue of shifting cultivation. However, those technologies have not introduced in this areas yet. Research activities to adapt and adopt as well as to search locally environmentally sound technologies is needed and then disseminate by extension activities.

Highland Area

Five strategies could be offers to tackle the issues in highland area. They are population growth control, research and extension on shifting cultivation, improvement of farmers' competitiveness, participatory approach on agricultural development planning and its implementation, and congruent national laws and local customary rule. The three first of those strategies are explained above and those explanation are same to highland area. However, participatory approach for highland area, fourth strategy, is related on not only how decision making process is arranged in agricultural development planning but also how development activities will be done equally among region within Solok district. It also means that participatory of highland people on political process in district level should be improve to avoid disparities of development among region.

Fifth strategy, congruent national laws and local customary rule is a way to avoid conflict between farmers and protected forest management. Congruency of those rules could be done by developing district rule as close as possible to local customary rule. In addition, in many spots where local communities can participate on forest management,

community based forest management (CBFM) should be implemented. For this purpose, CBFM that have been implemented successfully in Nepal (Gautam and Shivakoti, 2005) could be adapted in this area.

CONCLUSION

Indonesia's agricultural sustainability is facing heavy challenges environmentally, economically, socially as figured in Solok district. Each zone has many problems and they are related each other. Strategies are formulated to make agriculture development is to be sustainable.

ACKNOWLEDGMENTS

The earlier version of the paper was written to fulfill the assignment for Agricultural Development Planning course work with Prof. Gopal B. Thapa of Asian Institute of Technology (AIT), Bangkok, Thailand, in the August 2005 semester. I greatly indebted for his very constructive comments.

REFERENCES

- Gautam, Ambika P. and Shivakoti, Ganesh P. 2005. Conditions for Successful Local Collective action in Forestry : Some Evidence From the Hills of Nepal. *Society and Natural resources* 18 : 153-171.
- Partap, Tej and Watson, Harold R. 1994. Sloping Agricultural Land Technology (SALT) A regenerative option for sustainable mountain farming. International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD)

- Occasional Paper No. 23. Kathmandu, Nepal.
- Pemda Solok. 2000. Penyesuaian data/penyempurnaan laporan akhir Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok. Solok. Indonesia.
- Pemda Solok. 2004. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2004 – 2014. Solok. Indonesia.
- Solok statistical office. 2004. Kabupaten Solok Dalam Angka. Solok. Indonesia.
- Yonariza. 1995. Agricultural transformation and land tenure systems: A study of shifting cultivation community in East Rao Pasaman District, West Sumatra, Indonesia. Master thesis (unpublished) Ateneo de Manila University.
-

KEBERADAAN PASAR MEMBERIKAN MULTIPLIER EFFECT TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH (Studi Kasus di Lingkup Wilayah Pasar Gempol Kab. Pasuruan Prop. Jawa Timur)

Sri Muljaningsih

Abstract: *The existence of market is able to give multiplier effect towards the community's economy and the economic development of the region, if being supported by infrastructure, as transport facilities like road and travel mode. Moreover strategic location in a sense of the existence of this market, has high accessibility. This is identified by the road networks that connected intercity/the territory with the location of this market. Appropriately the function of the market is linked with trade and the other field related like the agriculture and non agriculture industries. However to determine the policy strategy of market function development, not only based on economic based (LQ & Share), there are inputs of multiplier effect analysis, but must also be supported by the SWOT analysis that give consideration of the strength, the weakness, opportunity and the threat that is influenced by the internal and external factor. Majority of the people at Pasuruan District in agriculture al sector, so agribusiness can accelerated community's economic growth as well as the region growth However the agribusiness sector need market in the strategic location and supported by infrastructure.*

Kata Kunci: *market, economic based, multiplier effect, transportation, agribusiness.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyediaan sarana pasar daerah secara langsung dapat memberikan dampak secara signifikan terhadap perkembangan suatu wilayah. Secara spasial dapat dijelaskan bahwa pasar secara langsung akan menjadi pusat pelayanan baru yang dapat memicu munculnya kegiatan lanjutan lainnya. Sedangkan berdasarkan aspek transportasi diketahui bahwa pasar menjadi salah satu faktor penarik dan pem-

bangkit arus lalu-lintas yang membebani jaringan jalan di sekitarnya sehingga semakin besar skala pasar tersebut maka semakin besar pula bangkitan dan tarikan lalu-lintas yang ditimbulkan.

Mengingat fungsi pasar sebagai pusat pelayanan kegiatan ekonomi masyarakat di dalam suatu wilayah. Selain itu mempunyai keterkaitan dengan sektor perdagangan terhadap barang dan jasa. Dengan demikian perlu mengetahui potensi ekonomi yang mendasar. Setelah diketahui basis ekonominya perlu mengetahui apakah memberikan

multiplier effect yang berarti (significant) bagi pengembangan ekonomi wilayah.

Untuk mengetahui hal tersebut, maka diadakan penelitian dengan mengambil studi kasus peranan pasar di Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan terhadap pengembangan ekonomi bagi wilayah sekitarnya.

Telah diketahui secara umum potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Gempol dan wilayah sekitarnya, seperti: kerajinan kulit (tas dan ikat pinggang), industri konveksi, dan potensi lainnya serta kerajinan bordir di wilayah Kecamatan Bangil dan secara umum masyarakatnya bergerak dibidang pertanian. Sementara itu, untuk kebutuhan bahan baku dari kegiatan usaha tersebut saat ini masih diperoleh dari pasar yang berada di luar wilayah Kabupaten Pasuruan.

Lokasi pasar sangat menentukan jangkauan pelayanan yang tidak terlepas dari sistem jaringan jalan. Oleh karena itu peranan pasar terhadap pengembangan ekonomi wilayah akan dipengaruhi perencanaan transportasi. Kondisi transportasi saat ini di jalur jalan arah pasar Gempol yang berbatasan dengan Kecamatan Porong yang dilanda bencana lumpur Sidoarjo, sering mengalami kemacetan pada jam-jam tertentu. Hal ini apakah memberikan keuntungan atau kerugian bagi pasar Gempol dan bagaimana kemungkinan pembangunan jalan toll baru yang masih dalam taraf perencanaan. Keadaan tersebut merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi, maka perlu diadakan penelitian yang mengkaji keberadaan pasar Gempol saat ini terhadap pengembangan ekonomi wilayah sekitarnya.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu :

1. Identifikasi potensi basis ekonomi di Kabupaten Pasuruan
2. Mengetahui potensi basis ekonomi yang terkait dengan pasar Gempol
3. Mengetahui *multiplier effect* terhadap pengembangan ekonomi wilayah sekitar pasar Gempol.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis evaluatif yang akan diuraikan sebagai berikut ***Analisis Deskriptif***

Analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis yang memaparkan, menjelaskan suatu data/fakta dengan menggunakan tabel, diagram, gambar maupun peta dengan tujuan agar lebih mudah untuk dibaca dan dipahami.

Analisis Evaluatif

Analisis evaluatif merupakan metode analisis yang berfungsi untuk menilai sesuatu berdasarkan standar baku. Analisis evaluatif yang dilakukan pada penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pasuruan melalui perencanaan pengembangan Pasar Daerah Gempol diuraikan sebagai berikut.

Analisis Basis Ekonomi

Analisis LQ

Analisis LQ (*Location Quotations*) merupakan metode analisis yang dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranan perekonomian daerah tersebut dengan peranan kegiatan sejenis dalam perekonomian regional atau nasional. Secara umum metode analisa LQ dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$LQ = \frac{\text{Sektor}_{ij} / \text{PDRB}_j}{\text{Sektor}_{ik} / \text{PDRB}_k}$$

Keterangan :

Sektor_{ij} = sektor i pada daerah j
 PDRB_j = PDRB pada daerah j
 Sektor_{ik} = sektor i pada daerah k
 yang lebih luas dari
 daerah j
 PDRB_k = PDRB pada daerah
 yang lebih luas dari j

Ukuran/besaran yang dapat dipakai antara lain tenaga kerja dan hasil produksi dari sektor kegiatan. Metode ini berguna untuk menunjukkan dominasi dan peranan suatu sektor kegiatan dalam lingkup Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan hasil perhitungan LQ, dapat diketahui konsentrasi suatu kegiatan pada suatu wilayah dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai $LQ < 1$, maka sektor yang bersangkutan kurang terspesialisasi dibanding sektor yang sama di tingkat daerah tertentu, sehingga bukan merupakan sektor unggulan.
- Jika nilai $LQ = 1$, sektor yang bersangkutan memiliki tingkat spesialisasi yang sama dengan sektor sejenis di tingkat daerah tertentu, sehingga hanya untuk melayani kebutuhan sendiri.
- Jika nilai $LQ > 1$, sektor yang bersangkutan lebih terspesialisasi dibanding sektor yang sama di tingkat daerah tertentu, sehingga merupakan sektor unggulan.

Analisis Share

Analisis share atau pangsa adalah menggambarkan kontribusi (sumbangan) masing-masing sektor terhadap total sektor, dengan sebagai berikut:

$$Sh = (\text{Ps}_1 \dots \text{Ps}_n / \text{Ptot}) \times 100\%$$

Keterangan :

Sh : pangsa (share)
 Ps₁ : sektor ke 1
 Ps_n : sektor ke n
 Ptot : Total sektor

Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan dalam menginterpretasikan wilayah perencanaan, khususnya pada kondisi yang sangat kompleks dimana faktor eksternal dan internal memegang peran yang sama pentingnya. Analisis SWOT digunakan untuk penelaahan terhadap kondisi fisik, ekonomi dan sosial serta kelembagaan. Berdasarkan penelaahan terhadap wilayah maka dihasilkan potensi dan masalah pengembangan tersebut yang digunakan untuk menentukan arah pengembangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Terkait Dengan Pasar di Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan Keputusan Bupati Dati II Pasuruan Nomor 367 Tahun 1995, bahwa pasar yang terdapat di Kabupaten Pasuruan dapat dibagi menjadi 3 kelas, yaitu:

- A. Pasar Daerah Kelas I: Pasar Daerah Pandaan, Bangil, Wonorejo, Pasrepan, Sukorejo, Purwosari.
- B. Pasar Daerah Kelas II: Pasar Daerah Gondangwetan, Gempol, Warungdowo, Nguling.
- C. Pasar Daerah Kelas III: Pasar Woningan, Prigen, Ngempit, Grati dan Gondang Legi.

Selanjutnya untuk sumber penerimaan daerah yang berasal dari retribusi pasar di Kabupaten Pasuruan penggalannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar.

Gambaran Umum Wilayah Kajian

Gambaran umum wilayah kajian ini meliputi wilayah administrasi, kependudukan, kondisi ekonomi makro potensi sektor pertanian dan potensi sektor industri yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Wilayah Administrasi

Secara administrasi, wilayah yang akan dikaji terkait dengan rencana pengembangan Pasar Daerah Gempol terdiri dari Kecamatan Bangil, Kecamatan Beji, Kecamatan Gempol, serta Kecamatan Pandaan. Kecamatan Bangil memiliki luas wilayah 4.460 Ha yang terdiri atas 4 desa/kelurahan. Kecamatan Beji terdiri atas 12 desa/kelurahan dengan luas wilayah 3.990 Ha.

Kecamatan Gempol terdiri atas 15 desa/kelurahan dengan luas wilayah 6.492 Ha. Kecamatan Pandaan terdiri atas 14 desa/kelurahan dengan luas wilayah 4.327 Ha. Adapun batasan wilayah kajian adalah:

- Sebelah Utara :Kabupaten Sidoarjo
- Sebelah Timur : Kecamatan Kraton
- Sebelah Selatan: Kecamatan Prigen, Rembang, dan Sukorejo
- Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto

b. Kependudukan

Perkembangan jumlah penduduk wilayah kajian dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan cenderung linier. Dalam kurun waktu 2005-2007 tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2006-2007 sebesar 1,12%. Berdasar jumlah penduduk, Kecamatan Gempol merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di wilayah kajian yaitu tercatat sebesar 116.239 jiwa pada tahun 2007, sementara itu jumlah penduduk terendah pada Kecamatan Beji yaitu sebesar 77.375 jiwa pada tahun 2007.

Struktur penduduk wilayah kajian menurut mata pencaharian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja disektor pertanian (29% dari total penduduk yang bekerja). Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian memberikan pengaruh yang cukup dominan pada lapangan pekerjaan di wilayah kajian terutama pada Kecamatan Gempol. Kondisi tersebut merupakan suatu potensi dalam mendukung pengembangan Pasar Daerah Gempol dimana sektor pertanian merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi masyarakat dan berkorelasi cukup erat dengan sektor perdagangan, sehingga keberadaan Pasar Daerah Gempol dapat berfungsi menjadi sarana promosi atau lokasi transaksi komoditas pertanian yang dihasilkan di wilayah kajian terutama untuk produk/komoditas pertanian unggulan Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya informasi tentang struktur penduduk berdasarkan mata pencaharian di wilayah kajian dapat dilihat pada Tabel 1. berikut ini.

Tabel 1. Struktur Penduduk Berdasar Jenis Mata Pencarian Wilayah Kajian Tahun 2007

Jenis Pekerjaan	Kecamatan (jiwa)				Jumlah (jiwa)	(%)
	Bangil	Beji	Gempol	Pandaan		
Petani	14.511	9.712	39.455	3.096	66.774	28,63
PNS	1.75	736	1.515	1.515	5.516	2,37
TNI/POLRI	2.71	155	543	355	3.763	1,61
Pedagang	10.17	1.958	2.056	12.714	26.898	11,53
Pegawai Swasta	10.71	8.154	15.192	19.479	53.535	22,96
Jasa	6.15	13.509	1.337	1.947	22.943	9,84
Lainnya	2.775	39.113	10.679	1.196	53.763	23,06
Jumlah/Total	48.776	73.337	70.777	40.302	233.192	100,00

Sumber: Kabupaten Pasuruan Dalam Angka Tahun 2008

c. Kondisi Ekonomi Makro Wilayah Kajian

Pada wilayah kajian kecamatan dengan PDRB terbesar adalah Kecamatan Gempol, hal tersebut mengindikasikan bahwa potensi perekonomian Kecamatan Gempol cukup besar untuk dikembangkan. Berdasarkan PDRB Kecamatan, sektor ekonomi yang memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan masing-masing wilayah adalah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Kecamatan dengan nilai sektor industri pengolahan tertinggi adalah Kecamatan Beji. Sementara itu kecamatan dengan nilai sektor perdagangan, hotel, dan restoran

tertinggi adalah Kecamatan Pandaan. Pada Kecamatan Gempol, sektor utama yang berperan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi wilayah adalah sektor industri pengolahan. Dominasi sektor-sektor sekunder tersebut diharapkan dapat mendukung terhadap perkembangan sektor primer. Selanjutnya nilai tiap sektor ekonomi yang membentuk PDRB Kecamatan pada wilayah kajian pada

Tahun 2006 dapat dilihat pada Tabel 2. berikut ini.

Tabel 2. PDRB Kecamatan pada Wilayah Kajian Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2006 (Juta Rupiah)

No	Sektor	Kecamatan			
		Bangil	Beji	Gempol	Pandaan
1	Pertanian	37.874,85	42.594,96	43.986,40	47.545,80
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	4.995,56	27.044,52	87,53
3	Industri Pengolahan	44.102,71	329.774,06	235.006,90	143.740,11
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	3.478,99	6.524,08	11.652,64	11.295,68
5	Bangunan	12.297,70	10.652,96	7.440,33	13.596,46
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	136.443,72	48.639,84	104.796,42	154.438,58
7	Angkutan dan Komunikasi	13.309,05	8.136,27	19.233,07	14.494,48
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	14.780,13	11.324,22	17.860,05	14.162,49
9	Jasa-jasa	49.501,93	34.000,84	51.668,60	34.387,38
Domestik Regional Bruto		311.789,08	496.642,79	518.688,93	433.748,50

Sumber : BPS Kab. Pasuruan Tahun 2008

d. Potensi Sektor Pertanian Wilayah Kajian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor perdagangan, Hal ini diindikasikan oleh diperjualbelikannya produk-produk pertanian merupakan komoditi yang diperjualbelikan pada fasilitas-fasilitas perdagangan. Kondisi tersebut terutama pada wilayah yang perekonomiannya bertumpu pada sektor primer. Kabupaten Pasuruan juga merupakan salah satu wilayah yang perkembangan wilayahnya masih bertumpu pada sektor pertanian. Perkembangan sektor pertanian pada Kabupaten Pasuruan paling tidak akan mempengaruhi perkembangan wilayah Kabupaten Pasu-

ruan. Pada wilayah kajian, sektor pertanian masih memegang peranan cukup penting dalam perkembangan dan pertumbuhan wilayahnya meskipun tidak dominan. Informasi mengenai produk pertanian yang dihasilkan pada wilayah kajian secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Jenis dan Jumlah Produk Pertanian yang Dihasilkan pada Wilayah Kajian

No	Produk	Kecamatan			
		Bangil	Beji	Gempol	Pandaan
1	Padi	14.613,24	31.357,58	26.378,66	38.389,30
2	Jagung	64,19	-	2.118,00	-
3	Ubi Kayu	746,88	-	1.344,69	-
4	Kacang Tanah	-	111,80	244,17	-
5	Kedelai	275,56	1.486,70	338,52	2.153,77
6	Kacang Hijau	-	4,90	189,28	79,77
7	Kelapa	35,00	42,00	103,00	42,00
8	Kapuk Randu	11,00	90,00	142,00	85,00
9	Jambu Mete	7,00	26,00	114,00	7,00
10	Kenanga	-	35,00	4,00	40,00
11	Tebu	-	357,03	1.642,67	148,68
12	Jahe	-	-	117,00	110,00
13	Kunyit	-	-	100,00	126,00
14	Temulawak	-	-	56,50	63,00

Sumber : Survey Primer Tahun 2008

e. Potensi Sektor Industri Wilayah Kajian

Diantara beberapa sektor yang terdapat di Kabupaten Pasuruan, sektor industri merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, terutama sektor industri kecil. Sektor industri kecil Kabupaten Pasuruan saat ini telah berkembang dan menghasilkan berbagai macam produk atau komoditi yang berpotensi mampu menjadi produk unggulan Kabupaten Pasuruan, seperti: makanan, konveksi, meubel, bordir, sandal dan sepatu, dan kerajinan perhiasan perak. Produk atau komoditi unggulan tersebut terutama dihasilkan oleh aktivitas industri kecil di wilayah kajian. Seiring dengan perkembangan industri kecil tersebut,

juga terdapat beberapa hal yang mampu menghambat perkembangan seperti minimnya sarana promosi dan transaksi sehingga kemampuan pemasaran sangat terbatas serta bahan baku industri yang masih harus dibeli atau didatangkan dari luar Kabupaten Pasuruan sehingga memperbesar biaya produksi. Informasi mengenai jenis dan jumlah industri pada tiap kecamatan di wilayah kajian dapat dilihat pada tabel 4. dibawah ini.

Tabel 4. Jumlah dan Jenis Industri Kecil yang terdapat di Wilayah Kajian

No	Jenis Industri	Kecamatan (Unit)			
		Bangil	Beji	Gempol	Pandaan
1	Makanan	141	72	14	22
2	Minuman	45	1	4	3
3	Bordir	199	61	5	14
4	Konveksi	31	17	17	12
5	Perhiasan & Kerajinan Perak	81	31	2	3
6	Sandal & Sepatu	37	11	7	9
7	Mebel Furnitur	14	5	19	10
8	Lain-Lain (Kopyah & Rokok)	9	21	2	31
Jumlah/Total		557	219	70	104

Sumber : Survey Primer Tahun 2008

Berdasar pengamatan di lapangan, diketahui banyak terdapat aktivitas industri kecil ataupun home industri pada wilayah kajian. Jumlah aktivitas industri kecil paling banyak terdapat di Kecamatan Bangil sementara itu aktivitas industri paling sedikit terdapat di Kecamatan Gempol karena pada kecamatan ini lebih dominan aktivitas industri berskala menengah dan besar. Industri kecil di wilayah kajian sendiri menghasilkan beberapa produk, seperti: makanan (tempe, krupuk, jenang, serta makanan), kerajinan bordir, konveksi (busana muslim), kerajinan perak

(perhiasan), sandal dan sepatu, meubel furniture, serta produk lain (kopyah dan rokok). Berdasar pada kondisi tersebut, beberapa industri kecil dinilai cukup berpotensi untuk menjadi produk unggulan Kabupaten Pasuruan karena jumlah aktivitas industri terkait adalah disamping jumlahnya cukup banyak juga produk yang dihasilkan dinilai memiliki keunikan lokal sehingga mampu merepresentasikan bahwa produk tersebut memang berasal dari Kabupaten Pasuruan dan bukan dari daerah lain. Produk atau komoditi tersebut berupa bordir dan kerajinan perak.

Analisis Basis Ekonomi

Fokus dari analisa basis ekonomi untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi potensial pada tiap kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Tinjauan terhadap sektor-sektor ekonomi pada tiap kecamatan di Kabupaten Pasuruan tersebut diperlukan untuk mendukung rencana pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pasuruan melalui rencana pengembangan Pasar Daerah Gempol.

a. Analisis Location Quotion (LQ)

Analisa LQ digunakan untuk mengukur kemampuan suatu wilayah dalam sektor ekonomi tertentu. Sektor ekonomi dengan nilai LQ lebih dari 1 mengindikasikan bahwa sektor ekonomi pada wilayah tersebut berpotensi untuk berkembang serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah secara keseluruhan. Perhitungan analisa LQ ini didasarkan pada data PDRB tiap kecamatan di Kabupaten Pasuruan atas dasar harga konstan pada tahun 2006. Sektor-sektor ekonomi yang akan dikaji dalam analisa LQ ini adalah sektor-sektor ekonomi

yang diperkirakan mempengaruhi rencana pengembangan Pasar Daerah Gempol yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan.

Berdasarkan hasil perhitungan analisa LQ dapat diketahui bahwa pada sektor pertanian, terdapat 14 kecamatan dengan nilai $LQ > 1$. Nilai LQ tertinggi pada Kecamatan Puspo dan Kecamatan Lumbang, dengan nilai masing-masing sebesar 2,25 dan sebesar 2,23. Nilai ini menunjukkan bahwa kecamatan tersebut memiliki produktivitas pertanian yang tinggi yang berpotensi menjadi sektor unggulan. Banyaknya kecamatan dengan nilai LQ yang tinggi mengindikasikan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor potensial di Kabupaten Pasuruan. Sedangkan nilai LQ terendah secara berturut-turut terdapat pada Kecamatan Gempol sebesar 0,33, Kecamatan Beji sebesar 0,34, Kecamatan Pandaan sebesar 0,43, dan Kecamatan Bangil sebesar 0,48. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian di wilayah kajian (Kecamatan Gempol, Kecamatan Bangil, Kecamatan Beji, dan Kecamatan Pandaan) kurang berkembang.

Pada sektor industri pengolahan, terdapat 7 kecamatan dengan nilai $LQ > 1$. Ketujuh kecamatan dengan nilai LQ potensial tersebut memiliki kawasan industri atau sentra industri pengolahan pada wilayah administrasinya. Kecamatan Beji memiliki nilai LQ tertinggi daripada kecamatan lain di Kabupaten Pasuruan. Kemudian pada wilayah kajian hanya Kecamatan Gempol dan Kecamatan Pandaan juga memiliki nilai $LQ > 1$. Banyaknya kecamatan (terutama pada wilayah

kajian) dengan nilai LQ sektor industri pengolahan yang positif menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor ekonomi potensial yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah Kabupaten Pasuruan. Hal tersebut dibuktikan oleh banyaknya kawasan industri skala besar serta sentra-sentra industri kecil dan menengah yang keberadaannya tersebar pada hampir seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.

Untuk sektor perdagangan, diketahui terdapat 7 kecamatan dengan nilai $LQ > 1$, termasuk Kecamatan Gempol. Kecamatan dengan nilai LQ pada sektor perdagangan yang cukup tinggi adalah Kecamatan Prigen, Kecamatan Tosari, dan Kecamatan Bangil. Pada Kecamatan Prigen dan Kecamatan Tosari, nilai LQ yang tinggi tersebut lebih disebabkan keberadaan obyek wisata yang mampu meningkatkan perkembangan sektor perdagangan terutama untuk sub sektor hotel dan restoran. Sementara itu, nilai LQ sektor perdagangan pada Kecamatan Bangil yang tinggi disebabkan Kecamatan Bangil merupakan pusat pertumbuhan Kabupaten Pasuruan yang memiliki fungsi perdagangan berskala regional. Sedangkan nilai LQ terendah pada sektor perdagangan terdapat pada Kecamatan Rembang. Pada wilayah kajian, Kecamatan Gempol dan Kecamatan Pandaan juga memiliki nilai $LQ > 1$ sehingga sektor perdagangan pada wilayah kajian berpotensi untuk berkembang.

Sementara pada sektor jasa diketahui terdapat 10 kecamatan dengan nilai $LQ > 1$. Nilai LQ tertinggi pada sektor jasa terdapat pada Kecamatan Winongan, sedangkan nilai LQ terendah

terdapat pada Kecamatan Tosari. Pada wilayah kajian, hanya Kecamatan Gempol dan Kecamatan Bangil yang memiliki nilai $LQ > 1$ sehingga hanya pada kedua kecamatan tersebut sektor jasa berpotensi untuk berkembang. Hasil perhitungan LQ Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada Tabel 5

Tabel 5. Analisa LQ Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Jasa tiap Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2006

Kecamatan	Pertanian	Industri Pengolahan	Perdagangan	Jasa
Purwodadi	1,87	0,57	0,64	0,87
Tutur	1,89	0,41	0,77	1,07
Puspo	2,33	0,47	0,40	0,67
Tosari	0,84	0,34	2,74	0,53
Lumbang	2,34	0,51	0,24	0,74
Pasrepan	1,99	0,63	0,47	0,89
Kejayan	1,80	0,89	0,36	0,62
Wonorejo	1,51	0,67	0,73	0,89
Purwosari	1,38	0,77	0,89	0,96
Prigen	0,43	0,53	2,53	0,79
Sukorejo	0,94	1,37	0,79	0,73
Pandaan	0,43	1,04	1,72	0,82
Gempol	0,34	1,42	1,98	1,03
Beji	0,34	2,08	0,47	0,71
Bangil	0,48	0,44	2,11	1,65
Rembang	0,78	1,78	0,19	0,90
Kraton	1,12	0,94	0,72	1,22
Pohjentrek	0,68	0,97	1,17	1,26
Gondangwetan	0,89	1,09	0,70	1,47
Rejoso	1,25	1,08	0,81	1,00
Winongan	1,00	0,91	0,49	2,16
Grati	1,24	0,62	1,00	1,29
Lekok	1,89	0,62	0,32	1,54

Sumber: Hasil Analisa, 2008

b. Analisis *Share*

Analisis *share* ini digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi atau proporsi sektor pertanian dalam membentuk total PDRB tiap kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Sektor pertanian sendiri berdasarkan hasil LQ memiliki potensi untuk berkembang sehingga potensi terse-

but mampu mendukung terhadap rencana pengembangan Pasar Daerah Gempol karena komoditi-komoditi unggulan di sektor pertanian Kabupaten Pasuruan tersebut diharapkan menjadi salah satu komoditi yang dapat ditawarkan atau dipasarkan melalui Pasar Daerah Gempol ini. Perhitungan analisis *share* ini menggunakan data dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa rata-rata nilai *share* di Kabupaten Pasuruan cukup beragam pada tiap kecamatan. Nilai *share* tertinggi terdapat pada Kecamatan Puspo dan Kecamatan Lumbang. Hasil tersebut sesuai dengan hasil perhitungan LQ yang menunjukkan bahwa sektor pertanian mendominasi struktur ekonomi pada kedua kecamatan tersebut. Sektor pertanian suatu kecamatan yang potensial disyaratkan harus memiliki nilai *share* sektor pertanian kecamatan harus lebih tinggi daripada nilai rata-rata *share* Kabupaten. Nilai rata-rata *share* sektor pertanian Kabupaten Pasuruan saat ini adalah sebesar 30%, sehingga diantara kecamatan yang ada terdapat 12 kecamatan dengan nilai *share* lebih besar daripada nilai *share* rata-rata Kabupaten Pasuruan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian pada Kabupaten Pasuruan cukup besar dan mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Pasuruan. Sedangkan untuk nilai *share* sektor pertanian yang cukup rendah secara berturut-turut dijumpai pada Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Bangil, dan Kecamatan Pandaan. Hasil perhitungan analisa

share sektor pertanian tiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Analisa *Share* Sektor Pertanian Kabupaten Pasuruan

Kecamatan	Tahun					Rata-rata
	2002	2003	2004	2005	2006	
Pasrepan	50,09	52,22	50,25	49,99	50,29	50,57
Kejayan	47,51	49,25	46,50	46,34	45,36	46,99
Wonorejo	38,75	39,13	39,63	38,20	38,15	38,77
Purwosari	34,53	36,52	35,57	34,90	34,94	35,29
Prigen	12,18	11,15	13,25	11,24	10,81	11,72
Sukorejo	25,31	23,82	24,55	23,50	23,71	24,18
Pandaan	12,71	11,06	12,72	11,32	10,96	11,75
Gempol	8,23	9,22	8,94	8,56	8,48	8,69
Beji	9,10	8,86	9,32	8,65	8,57	8,90
Bangil	11,16	12,30	13,41	11,80	12,15	12,16
Rembang	19,05	21,75	20,71	20,26	19,64	20,28
Kraton	30,51	31,83	28,74	28,79	28,34	29,64
Pohjentrek	15,07	17,68	18,69	17,57	17,18	17,24
Gondangwetan	20,62	20,63	24,84	22,03	22,39	22,10
Rejoso	28,68	27,14	34,36	29,58	31,63	30,28
Winongan	29,64	29,08	29,29	28,19	25,24	28,29
Grati	31,26	31,27	33,13	31,17	31,42	31,65
Lekok	47,51	50,62	49,08	49,01	47,72	48,79
Nguling	44,76	43,54	38,17	39,30	36,85	40,52

Sumber: Hasil Analisa, 2008

Gambaran Umum Pasar Daerah Gempol

a. Kondisi Fisik

Pasar Daerah Gempol merupakan salah satu pasar daerah yang manajemen pengelolaannya dikendalikan oleh dinas terkait, yaitu Dinas Pasar Kabupaten Pasuruan. Pasar Daerah Gempol sendiri merupakan pasar dengan klasifikasi kelas II. Secara keseluruhan Pasar Daerah Gempol menempati lahan seluas 11.684 m² dengan perincian luas kios seluas 1.059,8 m² dan luas los seluas 1.602,5 m². Secara fisik Pasar Daerah Gempol, terdiri dari: los, kios, warung, pasar hewan dan burung, serta fasilitas pelengkap pasar. Berdasarkan data rencana induk pengembangan Pasar Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005, bahwa kios yang terdapat pada Pasar Daerah Gempol adalah berjumlah 205 unit yang terdiri dari 175 unit

kios permanen dan 26 unit kios non permanen. Adapun kondisi kios, toko, maupun los yang ada di Pasar Daerah Gempol dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar Kondisi Kios, Toko, dan Los pada Pasar Daerah Gempol

Prasarana pendukung yang ada pada Pasar Daerah Gempol, antara lain: jaringan listrik, air bersih, drainase, dan sampah. Fasilitas listrik dibutuhkan oleh semua pengguna Pasar Daerah Gempol untuk mendukung aktivitas perdagangan, baik pada pagi maupun siang hari. Kebutuhan listrik pada Pasar Daerah Gempol dipenuhi oleh PLN. Kemudian untuk kebutuhan air bersih dipenuhi dari jaringan PDAM serta sumur yang berada dalam lingkungan Pasar Daerah Gempol. Air bersih ini diperlukan terutama oleh pedagang ayam potong, daging, dan ikan dengan tujuan selain supaya barang dagangannya tetap bersih, air bersih tersebut juga dipergunakan untuk keperluan lain.

Jaringan drainase pada Pasar Daerah Gempol berfungsi untuk mendukung penanganan air kotor/-

limbah akibat aktivitas perdagangan maupun non-perdagangan. Kondisi jaringan drainase tersebut saat ini cukup buruk karena selain banyak saluran yang tersumbat oleh sampah juga banyak saluran yang kondisinya rusak. Fungsi jaringan drainase ini sangat penting karena menyalurkan air limbah maupun air hujan yang ada dalam Pasar Daerah Gempol, karenanya usaha untuk memperbaiki jaringan drainase pada Pasar Daerah Gempol sangat diperlukan.

Penanganan sampah pada Pasar Daerah Gempol saat ini dilakukan oleh petugas kebersihan. Sampah dikumpulkan oleh petugas dari setiap toko atau kios yang ada dalam pasar kemudian dibuang ke TPS. Walaupun pada pasar terdapat fasilitas TPS, akan tetapi masih banyak para pengguna pasar yang membuang sampah secara sembarangan sehingga mengotori pasar dan seringkali sampah-sampah tersebut menyumbat saluran drainase yang ada.

Berdasarkan kondisi eksisting, bahwa pada saat ini Pasar Daerah Gempol lebih berfungsi sebagai pasar konsumsi (tempat pemenuhan kebutuhan sehari-hari). Kondisi bangunan di dalam pasar didominasi oleh los yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti: sembako, sayur, maupun bahan makanan lainnya. Selain itu, juga terdapat beberapa bangunan pasar yang difungsikan sebagai rumah tinggal. Adapun kondisi beberapa bangunan pada Pasar Daerah Gempol yang juga difungsikan sebagai rumah tinggal dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar Kondisi bagian pasar yang difungsikan sebagai tempat tinggal

Aksesibilitas

Aksesibilitas disini membahas sirkulasi internal dan sirkulasi eksternal yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Sirkulasi Internal

Sirkulasi internal pada Pasar Daerah Gempol saat ini terlihat masih semrawut atau belum tertata secara teratur. Hal ini diindikasikan oleh adanya jalur untuk pejalan kaki dan kendaraan yang berada dalam kawasan pasar. Berdasar kondisi eksisting, sirkulasi internal Pasar Daerah Gempol terdiri dari area parkir yang terletak di bagian depan pasar, jalan tembus yang menghubungkan jalan Surabaya-Malang dengan jalan Surabaya-Bangil, serta jalur pejalan kaki yang terletak di bagian dalam pasar. Kondisi perkerasan area parkir Pasar Daerah Gempol saat ini sebagian masih tanah dan makadam sehingga kurang mendukung aktivitas sirkulasi internal Pasar Daerah Gempol. Area parkir Pasar Daerah Gempol tidak hanya dimanfaatkan untuk parkir kendaraan bermotor akan tetapi juga andong maupun becak.

Jalan tembus penghubung antara jalan Surabaya-Malang dengan jalan Surabaya-Bangil merupakan bagian dari site Pasar Daerah Gempol yang bertujuan untuk memperlancar sirkulasi kendaraan didalam pasar serta jalur untuk mencapai pasar hewan yang lokasinya di belakang bangunan pasar. Kondisi jalan tembus saat ini mengalami kerusakan di beberapa bagian yang disebabkan oleh adanya beberapa kendaraan yang melewati jalan ini muatan yang sangat berat.

Sementara itu, jalur yang merupakan bagian sirkulasi internal adalah jalur pejalan kaki yang letaknya berada dalam bangunan pasar. Jalur pejalan kaki ini kondisinya kurang baik dan sangat kurang mendukung aktivitas dalam pasar, dimana pada beberapa bagian terlihat becek, kotor, serta pada bagian yang lain mengalami kerusakan. Kondisi sirkulasi internal Pasar Daerah Gempol sangat memprihatinkan, sehingga dibutuhkan adanya perhatian yang serius dari pihak pengelola apabila kedepan Pasar Daerah Gempol diharapkan fungsi dan aktivitasnya meningkat.



Gambar Jalan Tembus dan Jalur Pejalan Kaki dalam Pasar Gempol

b. Sirkulasi Eksternal

Sirkulasi eksternal Pasar Daerah Gempol ini adalah jaringan jalan yang berada di wilayah sekitar pasar yang dapat berfungsi sebagai sarana pencapaian menuju lokasi pasar.

Posisi Pasar Daerah Gempol sangat terletak pada jalur arteri primer, yaitu Surabaya-Malang-Jawa Timur bagian selatan, dan Surabaya-Bangil-Probolinggo-Bali. Posisi ini memiliki pengaruh penting dalam mendukung perkembangan Pasar Daerah Gempol. Kondisi jaringan jalan yang ada disekitar Pasar Daerah Gempol cukup mendukung aktivitas transportasi yang melewatinya. Seluruh jaringan jalan yang ada saat ini diperkeras dengan aspal hotmix sehingga kondisinya cukup baik.

Keberadaan Pasar Daerah Gempol dengan posisi yang berada pada jalur arteri primer maka diperkirakan perkembangan aktivitas Pasar Daerah Gempol tersebut akan berdampak terhadap kondisi lalu lintas yang ada di sekitarnya, sehingga dalam perencanaan kedepan kondisi lalu lintas harus diantisipasi mengingat dengan adanya peningkatan fungsi maka akan meningkatkan aktivitas pergerakan penduduk sehingga bangkitan dan tarikan pergerakan pada Pasar Daerah Gempol tersebut menjadi lebih tinggi. Selain itu, dengan adanya rencana pembangunan jalan tol maka posisi Pasar Daerah Gempol semakin strategis karena memiliki jarak yang cukup dekat dengan jalur tol menuju Surabaya sehingga paling tidak akan memberikan akses yang cukup luas menuju Pasar Daerah Gempol ini.

Sebagai jaringan jalan dengan fungsi yang penting maka jaringan

strategis, karena pasar tersebut jalan di sekitar wilayah Pasar Gempol memiliki aktivitas pergerakan yang cukup tinggi. Kondisi jaringan jalan di sekitar wilayah Pasar Gempol sebagai aspek sirkulasi eksternal digambarkan dengan kondisi lalu lintas tersebut. Adapun informasi mengenai kondisi lalu lintas pada jaringan jalan di sekitar Pasar Daerah Gempol pada saat hari sibuk (hari senin - hari kamis) dapat dilihat pada Tabel 7 sedangkan kondisi lalu lintas pada saat hari biasa dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.

Tabel 7. Volume Lalu Lintas di Sekitar Pasar Daerah Gempol pada Hari Sibuk (Senin-Kamis)

Jalur	Sepeda Motor	Mobil	Angkot	Bus Besar	Bus Kecil	Truk Besar	Truk Kecil	Non Motor
Surabaya-Pasuruan								
Pagi (07.00-08.00)	777	225	31	9	40	10	65	54
Siang (12.00-13.00)	651	183	25	10	28	13	55	49
Sore (17.00-18.00)	467	157	6	5	12	2	26	13
Surabaya-Malang								
Pagi (07.00-08.00)	2241	334	54	52	83	27	76	15
Siang (12.00-13.00)	1558	436	56	61	112	48	110	9
Sore (17.00-18.00)	1552	345	30	34	57	35	65	12
Malang-Surabaya								
Pagi (07.00-08.00)	2347	359	66	46	71	31	53	25
Siang (12.00-13.00)	1712	407	52	73	86	33	50	12
Sore (17.00-18.00)	1503	413	15	26	34	23	24	2
Pasuruan-Surabaya								
Pagi (07.00-08.00)	837	426	26	2	33	7	17	53
Siang (12.00-13.00)	712	298	21	3	32	5	13	35
Sore (17.00-18.00)	501	129	7	-	25	2	4	11

Sumber: Hasil Survey Primer, 2008

Tabel 8. Volume Lalu Lintas disekitar Pasar Daerah Gempol pada Hari Biasa (Jumat-Minggu)

Jalur	Sepeda Motor	Mobil	Angkot	Bus Besar	Bus Kecil	Truk Besar	Truk Kecil	Non Motor
Surabaya-Pasuruan								
Pagi (07.00-08.00)	771	897	23	6	44	2	51	24
Siang (12.00-13.00)	777	1048	19	15	48	5	41	13
Sore (17.00-18.00)	643	669	13	10	52	7	42	19
Surabaya-Malang								
Pagi (07.00-08.00)	2150	687	45	7	58	15	6	4
Siang (12.00-13.00)	1123	879	49	22	61	21	22	1
Sore (17.00-18.00)	1439	982	43	23	75	24	8	6
Malang-Surabaya								
Pagi (07.00-08.00)	1431	701	32	47	70	27	29	4
Siang (12.00-13.00)	895	850	53	50	89	31	20	8
Sore (17.00-18.00)	1137	929	42	44	66	31	25	5
Pasuruan-Surabaya								
Pagi (07.00-08.00)	1078	659	40	4	60	2	45	17
Siang (12.00-13.00)	810	449	29	5	48	5	38	4
Sore (17.00-18.00)	1184	409	12	2	50	2	51	5

Sumber: Hasil Survey Primer, 2008

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa jalur yang paling padat

dan tinggi aktivitas lalu lintas-nya adalah jalur Surabaya-Malang dan Malang-Surabaya. Kondisi ter-sebut disebabkan jalur tersebut me-rupakan jalur penghubung antara Kota Surabaya dengan wilayah lain di bagian selatan Jawa Timur sehingga banyak kendaraan yang melewati jalur ini menuju Kota Surabaya dan sebaliknya. Sementara itu, waktu dengan volume lalu lintas tertinggi pada jaringan jalan sekitar Pasar Daerah Gempol adalah dijumpai pada jam-jam pagi saat hari sibuk, yaitu hari senin sampai kamis dengan aktivitas lalu lintas pada jaringan jalan sekitar Pasar Daerah Gempol didominasi oleh kendaraan sepeda motor daripada jenis moda yang lain. Kondisi lalu lintas yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa pada wilayah Pasar Daerah Gempol meru-pakan wilayah yang cukup strategis bila ditinjau dari aspek transportasi. Secara visual informasi diatas dapat dilihat pada gambar gambar berikut ini.



Gambar Kondisi Jalur Surabaya-Malang disekitar Pasar Daerah Gempol



Gambar Kondisi Jalur Surabaya-Pasuruan disekitar Pasar Gempol



Analisis Multiplier Effect

Pengembangan Pasar Daerah Gempol pada dasarnya merupakan pengembangan sektor perdagangan karena sektor perdagangan pada Kecamatan Gempol memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB. Kecamatan Gempol bersama Kecamatan Bangil, Kecamatan Beji, dan Kecamatan Pandaan juga merupakan sentra industri kecil unggulan Kabupaten Pasuruan. Apabila kedua sektor tersebut memiliki korelasi yang cukup kuat maka pertumbuhan aktivitas perdagangan diharapkan mampu mempengaruhi pertumbuhan aktivitas sektor industri kecil. Pengembangan Pasar Daerah Gempol dapat dijadikan industri ditujukan untuk membantu para pelaku industri mikro, kecil, dan menengah agar lebih mudah untuk mendapatkan bahan baku yang giliran selanjutnya mampu menekan biaya produksi. Kedua rencana fungsi Pasar Daerah Gempol tersebut diharapkan mampu untuk mendukung dan menjaga perkembangan sektor industri mikro, kecil, dan menengah Kabupaten Pasuruan.

Mengingat lokasi Pasar Daerah Gempol terletak pada jalur transportasi regional maka diperkirakan akan memudahkan masyarakat diluar Kabupaten Pasuruan untuk mencapai Pasar Daerah Gempol.

Selanjutnya untuk melihat potensi *multiplier effect* dari aspek ekonomi dapat ditinjau dengan beberapa perhitungan ekonomi basis. Dengan mengasumsikan bahwa perkembangan sektor perdagangan dan industri adalah sebagai sektor basis, maka untuk menunjukkan tingkat pengaruh kegiatan pengembangan Pasar Daerah Gempol terhadap kondisi perekonomian wilayah sekitar-

sebagai salah satu generator pendukung perkembangan sektor industri mikro, kecil, dan menengah Kabupaten Pasuruan, dimana Pasar Daerah Gempol berfungsi sebagai sentra pemasaran dan promosi produk-produk yang dihasilkan dari aktivitas industri kecil dan menengah serta lokasi pemenuhan bahan baku untuk industri tersebut.

Promosi dan pemasaran produk-produk unggulan industri mikro, kecil, dan menengah dapat dilakukan secara terpadu oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan melalui penyediaan toko dan kios serta kegiatan pameran pada Pasar Daerah Gempol. Fungsi sebagai lokasi pemenuhan bahan baku

nya (meliputi Kecamatan Gempol, Kecamatan Bangil, Kecamatan Beji, dan Kecamatan Pandaan) dilakukan prediksi dalam beberapa tahun. Prediksi perkembangan sektor basis tersebut dihitung atas dasar nilai koefisien penggandaan (M). Rumus untuk perhitungan pengganda pendapatan sektor basis dapat dilihat pada rumus berikut:

$$M = \frac{Y}{YB}$$

Dengan:

M = Penggandaan Pendapatan Sektor Basis

Y = Pendapatan Total

YB = Pendapatan Basis

Berdasarkan perhitungan pengganda pendapatan sektor basis tersebut selanjutnya dapat diperoleh informasi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 9 berikut ini.

Tabel 9. Pengganda Pendapatan Sektor Perdagangan Kecamatan Gempol Tahun 2002-2006

Tahun	Y	YB	M	ΔYB
2002	409.053,32	72.471,65	56,443	-
2003	429.178,59	75.725,73	56,675	3.254,08
2004	456.568,45	80.097,28	57,002	4.371,55
2005	485.687,05	84.531,81	57,456	4.434,53
2006	518.688,93	90.646,63	57,221	6.114,82

Sumber : Data Sekunder Diolah, Tahun 2008

Berdasar perhitungan pada Tabel 3, diketahui bahwa perkembangan sektor perdagangan sebagai sektor yang berkorelasi cukup erat dengan pengembangan Pasar Daerah Gempol menunjukkan tren yang positif. Nilai pengganda sektor perdagangan Kecamatan Gempol juga cukup besar berkisar 5,6-5,7. Hal tersebut berarti bahwa setiap Rp. 1,- pendapatan yang diperoleh dari sektor perdagangan akan menghasilkan sekitar Rp. 5,00 - Rp. 6,00 pendapatan wilayah Kecamatan Gempol. Prediksi perkembangan sektor perdagangan pada Kecamatan Gempol akan semakin besar mengingat intensitas dan lapangan pekerjaan pada sektor ini juga semakin meningkat akibat adanya kegiatan pembangunan Pasar Daerah Gempol.

Sektor industri pengolahan pada wilayah kajian (Kecamatan Bangil, Beji, Gempol, dan Pandaan) merupakan sektor memiliki potensi untuk berkembang. Meskipun kontribusi terhadap total pendapatan tiap kecamatan tidak terlalu dominan akan tetapi tingkat perkembangannya cukup menjanjikan. Perhitu-

ngan nilai pengganda sebagai indikator potensi *multiplier effect* pada sektor industri wilayah kajian dapat dilihat pada Tabel 10. sampai dengan Tabel 13.

Tabel 10. Pengganda Pendapatan Sektor Industri Pengolahan Kecamatan Bangil Tahun 2002-2006

Tahun	Y	YB	M	ΔYB
2002	275.082,41	34.779,74	79,093	-
2003	287.079,14	36.338,62	79,001	5.649,20
2004	271.597,21	38.790,39	70,017	9.104,63
2005	298.160,61	41.348,60	72,109	9.252,60
2006	311.789,08	44.102,71	70,696	9.602,19

Sumber: Data Sekunder Diolah, Tahun 2008

Tabel 11. Pengganda Pendapatan Sektor Industri Pengolahan Kecamatan Beji Tahun 2002-2006

Tahun	Y	YB	M	ΔYB
2002	394.819,42	260.196,69	15,174	-
2003	416.677,13	274.643,62	15,172	14.446,93
2004	441.023,34	289.835,16	15,216	15.191,54
2005	465.585,98	308.949,18	15,070	19.114,02
2006	496.642,79	329.774,06	15,060	20.824,88

Sumber : Data Sekunder Diolah, Tahun 2008

Tabel 12. Pengganda Pendapatan Sektor Industri Pengolahan Kecamatan empol Tahun 2002-2006

Tahun	Y	YB	M	ΔYB
2002	409.053,32	174.730,65	23,411	-
2003	429.178,59	185.287,41	23,163	10.556,76
2004	456.568,45	201.145,94	22,698	15.858,53
2005	485.687,05	217.616,44	22,318	16.470,50
2006	518.688,93	235.006,90	22,071	17.390,46

Sumber: Data Sekunder Diolah, Tahun 2008

Tabel 13. Pengganda Pendapatan Sektor Industri Pengolahan Kecamatan Pandaan Tahun 2002-2006

Tahun	Y	YB	M	ΔYB
2002	352.922,18	110.131,49	32,046	-
2003	367.310,01	115.780,69	31,725	5.649,20
2004	388.008,41	124.885,32	31,069	9.104,63
2005	410.140,34	134.137,92	30,576	9.252,60
2006	433.748,51	143.740,11	30,176	9.602,19

Sumber: Data Sekunder Diolah, Tahun 2008

Pada Tabel 10. sampai dengan Tabel 13 menunjukkan bahwa nilai pengganda sektor industri pada Kecamatan Beji, Gempol, dan Pandaan masih berada dibawah nilai pengganda sektor perdagangan Kecamatan Gempol. Hal ini apabila Pasar Daerah Gempol dikembangkan, bahwa nilai pengganda sektor perdagangan Kecamatan Gempol juga akan berkembang sehingga akan memacu peningkatan nilai pengganda sektor industri pada wilayah sekitarnya. Sektor perdagangan dan sektor industri pada kegiatan pengembangan Pasar Daerah Gempol ini memiliki korelasi yang besar karena dengan adanya kegiatan ini diharapkan Pasar Daerah Gempol tidak hanya dijadikan pasar konsumsi harian saja tetapi juga dapat dijadikan sebagai pusat pemasaran produk-produk unggulan hasil aktivitas industri Kabupaten Pasuruan. Dengan adanya peningkatan nilai pengganda diatas 5 (lima), maka diharapkan terjadi peningkatan penda-

patan pada sektor-sektor basis terutama sektor perdagangan dan sektor industri.

Nilai pengganda sektor industri paling tinggi terjadi di Kecamatan Bangil yaitu sekitar 7,9. Sehingga setiap Rp. 1,- pendapatan sektor industri pengolahan Kecamatan Bangil akan mendorong peningkatan pendapatan wilayahnya menjadi Rp. 8,-. Hal ini dapat dikatakan bahwa sektor industri di Kecamatan Bangil memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat berkembang. Salah satu produk sektor industri pengolahan pada wilayah kajian yang berpotensi menjadi produk unggulan Kabupaten Pasuruan adalah kerajinan bordir dan produk konveksi.

Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah analisis mengenai potensi (*strength*), masalah (*weakness*), kesempatan (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) yang terdapat pada pengembangan Pasar Daerah Gempol. SWOT merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan dalam menginterpretasikan wilayah studi, khususnya pada kondisi yang sangat kompleks dengan faktor internal dan eksternal memegang peranan yang sangat penting. Potensi yang dapat dikembangkan dan permasalahan yang dapat diatasi untuk mendukung pengembangan Pasar Daerah Gempol dijadikan dasar dalam analisis SWOT.

Tabel.14. SWOT Pengembangan Pasar Daerah Gempol

Internal	Eksternal
Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kesempatan (<i>Opportunity</i>)
<ul style="list-style-type: none"> Lokasi Pasar Daerah Gempol yang strategis Kabupaten Pasuruan memiliki produk atau komoditi potensial yang layak dikembangkan, terutama bordir dan kerajinan perak Pedagang sangat mendukung rencana pengembangan Pasar Daerah Gempol 	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya pasar untuk memasarkan produk unggulan Kabupaten Pasuruan Adanya rencana pengalihan jalan tol Mandeknya aktivitas Pasar Tanggulangin sebagai sentra produk unggulan Kab. Sidoarjo
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
<ul style="list-style-type: none"> Pasar Gempol saat ini kurang dikenal dan diminati masyarakat Kondisi fisik Pasar Daerah Gempol yang kurang layak sehingga kurang mendukung aktivitas perdagangan Banyak pemilik industri lebih memilih mendapatkan bahan baku dari luar Kab. Pasuruan 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya bencana banjir lumpur Sidoarjo Adanya kebijakan pengembangan Kec. Porong sebagai pusat perdagangan wilayah selatan Kab. Sidoarjo Berdasar kebijakan pengembangan Kabupaten Pasuruan, Kec. Gempol hanya berfungsi sebagai pusat pelayanan lokal

Fungsi Pasar Daerah Gempol

Pasar Daerah Gempol sesuai dengan fungsi yang dibebankan pada Kecamatan Gempol memiliki fungsi yaitu sebagai pusat pelayanan lokal dengan wilayah pelayanan meliputi 1 kecamatan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, fasilitas-fasilitas yang ada di Kecamatan Gempol tidak hanya melayani kebutuhan penduduk Kecamatan Gempol akan tetapi juga kebutuhan penduduk wilayah kecamatan lain yang berdekatan dengan Kecamatan Gempol seperti Kecamatan Porong, Kecamatan Ngoro, dan Kecamatan Beji. Kondisi tersebut membuat fungsi Kecamatan Gempol tidak lagi sebagai pusat pelayanan lokal tetapi juga sebagai pusat pelayanan regional lintas batas. Pergeseran fungsi tersebut merupakan potensi yang dapat

mendukung perkembangan Pasar Daerah Gempol, sehingga langkah yang perlu dilakukan adalah peningkatan fungsi pasar. Namun demikian, tetap diperlukan adanya pembatasan atas peningkatan fungsi yang akan dilakukan karena beberapa alasan, seperti:

- Kecamatan Gempol bukan merupakan pusat SSWP dan hanya merupakan bagian dari SSWP yang berpusat di Kecamatan Bangil sehingga fungsi yang akan dibebankan kepada Kecamatan Gempol tidak lebih tinggi daripada Kecamatan Bangil.
- Kondisi dan perkembangan wilayah Kecamatan Gempol akan sangat dipengaruhi kondisi wilayah bencana lumpur sidoarjo karena jarak antara kedua wilayah tersebut dekat.
- Sebagian pelaku industri kecil dan menengah masih enggan memanfaatkan sarana perdagangan yang ada di Pasar Daerah Gempol untuk memasarkan hasil produksinya karena dianggap Pasar Daerah Gempol belum cukup terkenal dan bersaing di pasar yang luas.

Implementasi dari peningkatan fungsi pasar yang akan diterapkan pada Pasar Daerah Gempol adalah peningkatan kelas pasar. Dalam pelaksanaannya, kelas Pasar Daerah Gempol ditingkatkan dari pasar kelas II menjadi kelas I. Peningkatan kelas pasar ini harus diimbangi dengan pengembangan unsur-unsur pendukung pasar, yang meliputi: pengembangan ruang pasar, fasilitas pendukung pasar, sistem transportasi, komoditas perdagangan, dan manajemen pengelolaan pasar. Peningkatan kualitas pelayanan unsur-unsur pendukung pasar tersebut, pada akhirnya diharapkan mampu memenuhi tujuan pengembangan Pasar Daerah

Gempol sebagai pendukung pusat perda-

PENUTUP

Berdasarkan pada hasil analisis, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penentuan konsep pengembangan Pasar Daerah Gempol pada masa mendatang. Adapun beberapa kesimpulan dan saran yang dimaksud masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

Kesimpulan

1. Berdasar pada pada hasil kajian ekonomi wilayah dan kebijakan
2. Kecamatan Gempol bersama Kecamatan Bangil, Kecamatan Beji dan Kecamatan Pandaan memiliki industri mikro, kecil dan menengah yang cukup potensial. Aktivitas tersebut diperkirakan mampu menghasilkan produk-produk yang mampu menjadi produk unggulan Kabupaten Pasuruan, seperti kain bordir, konveksi, dan kerajinan perak. Penguatan sektor industri pengolahan ini diharapkan menjadi kunci pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah kajian maupun di Kabupaten Pasuruan.
3. Pengembangan Pasar Daerah Gempol diharapkan mampu menangkap potensi ekonomi masyarakat berupa aktivitas industri kecil dan menengah tersebut, mengingat sampai saat ini belum adanya upaya untuk mendukung perkembangan sektor industri kecil dan menengah tersebut secara terpadu.
4. Perkembangan Kecamatan Gempol selama ini tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di wilayah Kabupaten Pasuruan akan tetapi juga perkembangan yang terjadi di wilayah sekitarnya seperti

gangangan regional.

pem-bangunan Kabupaten Pasuruan, aktivitas ekonomi Kabupaten Pasuruan tidak hanya bertumpu pada aktivitas sektor primer (pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan) tetapi juga pada aktivitas sektor sekunder (pelayanan jasa dan industri pengolahan). Pada wilayah kajian, sektor ekonomi unggulan yang berperan dalam mendukung perkembangan masyarakat adalah sektor sekunder berupa industri pengolahan.

Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo. Sehingga kedepannya, pengembangan yang dilakukan di Kecamatan Gempol juga harus mempertimbangkan arah kebijakan yang diterapkan pada Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo.

5. Posisi strategis Kecamatan Gempol yang memungkinkan Pasar Daerah Gempol dapat melayani wilayah sekitar yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dan sangat berpeluang untuk dapat dikembangkan, seperti Kecamatan Beji, Kecamatan Bangil, Kecamatan Pandaan serta wilayah perbatasan seperti Kecamatan Ngoro, dan Kecamatan Porong, maka Pengembangan Pasar Daerah Gempol tetap dimungkinkan untuk dilaksanakan. Hal ini dapat dilakukan mengingat Pasar Daerah Gempol diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk pengembangan ekonomi masyarakat, berarti memberikan *multilplier effect*.
6. Pengembangan Pasar Daerah Gempol juga akan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan retribusi. Peningkatan jumlah obyek retribusi

- dan pengelolaan beberapa retribusi
7. cukup dominan dalam meningkatkan potensi retribusi Pasar Daerah Gempol dalam waktu mendatang.

Saran

Saran yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan pengembangan Pasar Daerah Gempol adalah:

1. Pengembangan Pasar Daerah Gempol diharapkan mampu menyesuaikan dengan fungsi yang diemban Kecamatan Gempol sebagai bagian dari SSWP I. Kecamatan Gempol hanya berfungsi sebagai pusat

baru merupakan faktor-faktor yang sekunder atau pendukung pusat pengembangan wilayah yang berpusat di Kecamatan Bangil. Apabila dalam beberapa kurun waktu kedepan wilayah Kecamatan Gempol mengalami perkembangan akibat pengembangan Pasar Daerah Gempol maka perlu dikaji kembali rencana tata ruang yang berlaku.

2. Perlu adanya studi lanjut mengenai relokasi pasar hewan dan pasar burung apabila dilaksanakan kegiatan pengembangan pasar Daerah Gempol.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta
- Budiharsono, 2005, *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Isard, Walter. 1976, *Methods of Regional Analysis : an Introduction to Regional Science*. MIT Press. Massachusetts
- Kottler, Philip & A.B.Susanto 1999, *Manajemen Pemasaran di Indonesia, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*, Salemba Empat, Jakar
- Muljaningsih, Sri, 1989, *Studi Pengembangan Wilayah Kabupaten Gresik*

melalui Identifikasi Kesempatan Kerja di Sektor Pertanian dan Sektor Industri, ITB, Bandung

- Riyadi dan Brata Kusumah, Deddy Supriady, 2003, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Gramedia Pustakatama, Jakarta

RTRW, Kabupaten Pasuruan

Schumer, 1974, *Elements of Transport*, Butterworths, Sydney

Yoeti, Oka.A, 1996, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung

Warpani, Suwardjoko, 1977, *Analisis Kota dan Daerah*, Penerbit ITB, Bandung

Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung

HOW SERIOUS GOVERNMENT TO IMPLEMENT PARTICIPATORY DEVELOPMENT APPROACH?

Case of Irrigation Facility Improvement Project using Fuel Compensation Scheme in Sub-district of Kampai Tabu Karambia (KTK), Lubuk Sikarah District, Solok City

Putra Idola dan Yonariza

Abstract: *The farmers' participation is a very strong determinant for the success of agriculture facilities development project, such as irrigation. In Indonesia, government is aware about this approach and has adopted participatory as development paradigm. Nevertheless, there is still a big question on the application of participatory approach in practice. This study focuses on implementation of irrigation facility improvement project under fuel compensation subsidy scheme in Sub-district of Kampai Tabu Karambia, Solok Municipality, West Sumatra. It aimed at; describing the farmers participation through out the development project implementation; figuring out propriety of participatory model according to program principles, and measuring the level of farmers participation in the project implementation. The result shows that the farmers' participation through out project implementation was not optimal although the project claimed itself as adopting participatory approach; stakeholders from government agencies and the elites took dominant role in decision making beginning from choosing priority project. Although in the implementation process has followed project description such as self-managed by citizen, but measuring this participation using Arnstein's Ladder of citizen Participation, the level of participation process fall into mobilization category. It is suggested that government should improve the application of participatory method by relying more on farmers initiative to solve the problem agriculture infrastructure improvement such as irrigation facility on all phases of development project. Government can take role more on promoting farmer initiative since initial stage.*

Kata Kunci: *pembangunan, partisipasi, irigasi, perkumpulan petani pemakai air, Kota Solok, kompensasi kenaikan harga BBM*

PENDAHULUAN

Sejak krisis moneter tahun 1997, Pemerintah Indonesia telah memprakarsai program untuk reformasi kelembagaan, menuju pembangunan yang berkelanjutan dan pemerintahan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawab-

kan. Tujuan pertamanya adalah untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mengembangkan dan mengoperasikan fasilitas umum, merubah peran pemerintah dari penyedia (*provider*) barang dan jasa menjadi pemberi peluang (*enabler*) kepada masyarakat untuk memobilisasi kemampuannya sendiri dalam mem-

cahkan masalah untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan kedua adalah desentralisasi keputusan Pemerintah dan ke-uangan kepada propinsi dan kabupaten, yang diwujudkan dalam dua Undang – Undang (UU 22 dan 25) Tahun 1999 dan diperbaiki dalam Tahun 2004 (WISMP, 2005).

Sehubungan dengan pencapaian kesejahteraan masyarakat tersebut maka pada bulan Maret dan Oktober 2005 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diwujudkan dalam Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Salah satu rencana skala besar dalam SNPK adalah menyangkut program infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Departemen Pekerjaan Umum) seperti “Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Bidang Infrastruktur Perdesaan” atau PKPS-BBM IP (Maryono *et al*, 2006).

Menurut Menteri Pekerjaan Umum, Kirmanto (2005) dalam Pedoman umum (Pedum) PKPS-BBM IP, pemilihan infrastruktur perdesaan didasarkan pada pertimbangan, bahwa infrastruktur dapat membuka akses ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan produksi dan distribusi, memberikan lapangan kerja serta membuka peluang baru bagi berbagai aktifitas masyarakat. Disamping itu masyarakat dapat memperoleh manfaat dari infrastruktur terbangun, sehingga diharapkan masyarakat terbiasa dengan pola-pola pembangunan yang partisipatif serta dapat membangkitkan munculnya rasa memiliki infrastruktur yang lebih tinggi di dalam masyarakat, karena PKPS-BBM IP merupakan suatu kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan tertinggal agar masyarakat berkembang lebih sejahtera (*pro poor and growth policy*).

Sedangkan dalam implementasinya, Menteri Pekerjaan Umum telah mengeluarkan surat dengan No. KU 0101-MN/348/2005 tentang pelaksana-

an PKPS BBM IP yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia. Dana PKPS-BBM IP dialokasikan sebesar Rp 3,5 triliun. Sebanyak 12.834 desa yang tersebar di 427 kabupaten/kota dan 33 propinsi di Indonesia, dimana setiap desa (kelurahan) dialokasikan dana Rp. 250 juta untuk membangun sarana infrastruktur yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pembangunan infrastruktur dalam PKPS-BBM IP difokuskan untuk penyediaan, peningkatan, dan perbaikan: (i) prasarana jalan (ii) prasarana irigasi (iii) prasarana air bersih (Rantetoding, 2005).

Mengingat mekanisme penyelenggaraan PKPS-BBM IP melalui pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, maka di Sumatera Barat terdapat beberapa daerah sasaran PKPS-BBM IP yang telah memiliki kebijakan dalam perencanaan pembangunan partisipatif diantaranya adalah Kota Solok dengan dikeluarkannya Perda Kota Solok No. 2 Tahun 2005 tentang prosedur perencanaan pembangunan partisipatif¹. PERDA tersebut menjadi acuan pemerintah Kota Solok dalam melaksanakan PKPS-BBM IP untuk dapat diselenggarakan oleh *stakeholders*² dalam rangka mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur secara partisipatif. Dimana pembangunan infrastruktur dalam PKPS-BBM IP difokuskan untuk penyediaan, peningkatan, dan perbaikan infrastruktur seperti prasarana jalan,

¹ Untuk Sumbar daerah yang telah memiliki prosedur perencanaan pembangunan partisipatif terdapat di 6 kabupaten/kota diantaranya Kota Solok dan Padang Panjang, serta Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman dan Limapuluh Kota (Perform Project-USAID, 2003).

² *Stakeholders* dimaknai sebagai individu, kelompok atau organisasi maupun perempuan dan laki-laki yang memiliki kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi (secara positif maupun negatif) oleh kegiatan atau program pembangunan. Lihat Hetifah Sj Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Yayasan Obor, 2004. Jakarta. Hal. 3

prasarana irigasi, dan prasarana air bersih.

Untuk permasalahan irigasi, bila dilihat dari sisi sektor pertanian di Kota Solok, dari sekitar 21,76% (1.254 Ha) daerah yang terdiri dari lahan persawahan yang sangat kritis antara perbukitan dan dataran, pada musim hujan menyebabkan kawasan pertanian di Kota Solok rentan terhadap bahaya banjir dan longsor sedangkan di musim kemarau debitnya sangat kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan air di beberapa kelurahan seperti yang terjadi di Kelurahan Kampai Tabu Karambia (KTK) Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok (Bappeda Kota Solok, 2004).

Kelurahan KTK merupakan salah satu pelaksana PKPS-BBM IP di Kota Solok, dimana dana program dimanfaatkan untuk pembangunan irigasi agar masyarakat setempat dapat meningkatkan perekonomian dan menggerakkan produktifitas dari prasarana terbangun seperti untuk mekanisme pertanian.

Sehubungan dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang saat ini telah berada dalam era demokrasi dan keterbukaan, maka sudah selayaknya petani sebagai masyarakat yang membutuhkan prasarana irigasi dilibatkan dalam program tersebut. Beranjak dari sudut pandang ini maka perlu ditinjau kembali definisi partisipasi sebagai sebuah proses serta kaitannya dengan kesesuaian penyelenggaraan program tersebut terhadap partisipasi yang dilakukan oleh petani sehingga dapat diketahui tingkat partisipasi petani (masyarakat) dalam penyelenggaraan PKPS-BBM IP sebagaimana tujuan dari program tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Mendeskripsikan proses partisipasi petani dalam penyelenggaraan PKPS-BBM IP tahun 2005 di Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. (2) Menentukan kesesuaian partisipasi petani terhadap prinsip-prinsip PKPS-BBM IP. (3) Mengukur tingkat partisipasi petani terhadap pe-

nyelenggaraan PKPS-BBM IP untuk Pembangunan Irigasi di Kelurahan KTK. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi pemerintah dalam menerapkan konsep partisipatif yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat (petani) dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Kampai Tabu Karambia (KTK) Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Pengumpulan data dilaksanakan dari bulan Januari hingga Februari 2008. Kasus diamati adalah tingkat partisipasi petani sebagai subyek penelitian dalam setiap tahap kegiatan dan obyek penelitian adalah penyelenggaraan PKPS-BBM IP sedangkan pembangunan irigasi merupakan alat (instrumen) pencapai partisipasi petani.

Sampel diambil secara acak sederhana (*Simple Random Sampling*), yaitu diperoleh dari populasi anggota kelompok tani yang tergabung dalam keanggotaan P3A Kelurahan KTK. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepht interview*) kepada informan kunci yang pernah menjabat dalam PKPS-BBM IP di Kota Solok terdiri dari; Tim Koordinasi Kota (TKK), Satker, Konsultan Pendamping, Tim Kecamatan, LPMK KTK dan Pengurus P3A di Kelurahan KTK. Terhadap responden dilakukan wawancara terstruktur menggunakan penyebaran kuisioner yang telah dipersiapkan sebelumnya, hasil wawancara terstruktur tersebut sebagai dasar penentuan tingkat partisipasi petani dalam penyelenggaraan PKPS-BBM IP di Kelurahan KTK.

Analisa data pada tujuan pertama dan tujuan kedua secara deskriptif kualitatif. Untuk tujuan pertama dianalisis dengan memberikan tanda ceklis (√) untuk setiap item proses kegiatan yang dilalui petani dalam kegiatan program dan tanda silang (x) sebagai tidak adanya keterlibatan petani dalam proses tersebut. Dari temuan tersebut dapat dikategori-

kan sebagaimana terlihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kategori Keterlibatan Petani dalam Proses

-	Optimal	:	Jika seluruh item kegiatan di ikuti oleh petani sample
-	Belum optimal	:	Jika hanya salah satu item kegiatan yang di ikuti petani sample
-	Tidak relevan	:	Jika tidak ada seluruh item kegiatan yang di ikuti petani sample

Untuk tujuan kedua dianalisis sesuai dengan prinsip PKPS-BBM IP terhadap temuan lapangan berdasarkan proses partisipasi petani dari item kegiatan yang terdapat pada petunjuk teknis program tersebut.

Sedangkan tujuan ketiga dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan dilakukan untuk mengukur tingkat partisipasi dengan memberikan skor melalui wawancara terstruktur menggunakan kuisioner kepada responden. Untuk jawaban tertinggi diberi skor 2, untuk jawaban sedang diberi skor 1, dan jawaban rendah diberi nilai 0. Berdasarkan nilai skor tingkat partisipasi di atas dipersentasekan kedalam tiga kategori sebagai jawaban yang dapat menjadi dasar penentuan tingkat partisipasi petani. Untuk menentukan persentase tingkat partisipasi yang diperoleh didapatkan dengan menggunakan rumus (Slamet *cit* Usman, 2003).

$$\text{Tingkat partisipasi} = \frac{\text{Total skor yang diperoleh}}{\text{Total skor yang diharapkan}} \times 100\%$$

Sehingga persentase tingkat partisipasi tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Partisipasi tinggi, bila persentase yang diperoleh antara 68 % – 100 %
- Partisipasi sedang, bila persentase yang diperoleh antara 34 % – 67 %
- Partisipasi rendah, bila persentase yang diperoleh antara 0 – 33 %

Hasil pencapaian tingkat partisipasi tersebut kemudian dirata-ratakan dan dianalisis kedalam delapan tangga partisipasi masyarakat (*Eight*

Rungs on The Ladder of Citizen Participation) menurut tipologi Arnstein (1969). Untuk jawaban tertinggi disebut sebagai kategori kekuasaan masyarakat (*citizen power*), dimana kriteria tingkat partisipasi terdiri kendali masyarakat (*citizen control*), pelimpahan wewenang (*delegated power*) dan kemitraan (*partnership*), untuk jawaban sedang disebut sebagai kategori partisipasi pura-pura (*tokenism*), dimana kriteria tingkat partisipasi terdiri dari penentraman (*placation*), konsultasi (*consultation*) dan informasi (*informing*) dan jawaban terendah sebagai kategori tanpa partisipasi (*non participation*) dimana kriteria tingkat partisipasi terdiri dari terapi (*therapy*) dan manipulasi (*manipulation*). Adapun kategori pencapaian tingkat partisipasi dapat dilihat pada Tabel 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan PKPS-BBM IP merupakan program dengan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan kepada masyarakat miskin (petani) dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan petani sebagai aktor dalam pembangunan dapat berpartisipasi dalam program tersebut. Adapun temuan lapangan terkait dengan tujuan penelitian dapat dijelaskan pada bagian berikut.

1. Proses Partisipasi Petani dalam Penyelenggaraan PKPS-BBM IP di Kelurahan KTK

Terdapat beberapa proses kegiatan yang dilalui petani untuk mengetahui tingkat partisipasi petani da-

lam penyelenggaraan PKPS-BBM IP di Kelurahan KTK. Proses tersebut dapat

ditinjau dari kegiatan sosialisasi dan penyaluran dana PKPS-BBM IP.

Tabel 2. Kategori Pencapaian Tingkat Partisipasi

Kategori	Tingkat	Kriteria Partisipasi	Persentase Pencapaian
Tanpa partisipasi (<i>Non Partisipation</i>)	1	Manipulasi	0 - 12,5
	2	Terapi	12,5 - 25,0
Partisipasi pura-pura (<i>Tokenism</i>)	3	Informasi	25,0 - 37,5
	4	Konsultasi	37,5 - 50,0
	5	Penentraman	50,0 - 62,5
Kekuasaan masyarakat (<i>Citizen Power</i>)	6	Kemitraan	62,5 - 75,0
	7	Pelimpahan wewenang	75,0 - 87,5
	8	Kendali masyarakat	87,5 - 100

Sumber: Adaptasi dari Arnstein (1969). *A Ladder of Citizen Participation*, *Journal of the American Institute of Planners*.

a. Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam bentuk musyawarah bersama *stakeholders* terkait dengan program. Program tersebut disosialisasikan dengan mengacu pada Perda Kota Solok No. 2 Tahun 2005 tentang prosedur perencanaan pembangunan partisipatif baik ditingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga ketingkat kelompok.

Proses partisipasi petani dalam penyelenggaraan PKPS-BBM IP di Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok belum optimal, karena dari analisis terdapat beberapa proses kegiatan (sosialisasi) yang belum diikuti oleh petani atau belum terlibat secara aktif atas kesadarannya dalam proses pembangunan seperti ditingkat kota tidak seorangpun petani maupun perwakilan petani terlibat ataupun dilibatkan oleh pemerintah sehingga proses partisipasi petani di tingkat kota tidak relevan dengan proses kegiatan sebagaimana yang dijelaskan dalam petunjuk teknis PKPS-BBM IP

Hal tersebut dilakukan Pemerintah Kota Solok karena waktu pelaksanaan terlalu singkat dan adanya tun-

tutan dari program untuk dapat diselesaikan dalam Tahun Anggaran 2005, artinya penyelenggaraan PKPS-BBM IP disebabkan oleh sistem yang berlaku dalam program, dimana implementasi program PKPS-BBM IP di Kota Solok diketahui lebih mengarah pada pencapaian sasaran (obyek) yang ditetapkan dari pusat (sentralistis) sehingga kurang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah secara desentralistis dalam mempersiapkan masyarakatnya secara *bottom up* (perencanaan dari masyarakat).

Dipihak lain, Maryono *et al* (2006), juga menilai permasalahan pelaksanaan PKPS-BBM IP di tiap propinsi secara keseluruhan disebabkan oleh waktu yang singkat, kelengkapan dan ketersediaan Juklak yang terlambat menjadi masalah dalam pelaksanaan (sosialisasi) program serta lemahnya peran konsultan dalam memberdayakan masyarakat secara partisi-

patif. Bila dikaji dari Pedum PKPS-BBM IP dijelaskan bahwa, sosialisasi kegiatan melibatkan seluruh *stakeholders* terkait dengan program (pembangunan irigasi) diantaranya merupakan kelompok masyarakat (kelompok tani/P3A) mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga dikelola oleh Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) agar tumbuhnya rasa memiliki terhadap program dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunannya secara berkelanjutan.

Meskipun petani (perwakilan-nya) dilibatkan hadir di tingkat kecamatan, namun petani diketahui bersikap pasif tanpa memiliki kesempatan menyampaikan respon terhadap infrastruktur yang telah ditetapkan pemerintah setempat dan cenderung menyetujui keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan di tingkat kelurahan petani memiliki kesempatan memberikan informasi (usulan) serta menyepakati pelaksanaan program untuk pembangunan irigasi, mengingat Kelurahan KTK rentan terhadap bahaya banjir dan longsor yang merusak saluran irigasi serta berdampak pada produktifitas pertanian mereka.

Kebijakan tersebut pada dasarnya sebuah ketetapan dari pemerintah setempat pada sosialisasi sebelumnya (tingkat kota) sebagai alasan dipilihnya Kelurahan KTK untuk melaksanakan program sehingga petani cenderung menerima kesepakatan tersebut. Hal ini mempengaruhi partisipasi petani pada kegiatan selanjutnya seperti sosialisasi di tingkat kelompok, proses partisipasi lebih optimal di tingkat kelompok namun mobilisasi masih jelas terlihat karena sumberdaya publik yang dihasilkan dalam kelompok merupakan produk dari pemerintah yang diturunkan kepada organisasi masyarakat setempat (OMS) melalui LPMK sedangkan petani ditempatkan sebagai kelompok kerja kegiatan walaupun perekrutan dilakukan oleh masing-masing P3A (panitia pelaksana), se-

hingga partisipasi yang semestinya menjadi prakarsa seseorang untuk terlibat atas kemauannya sendiri menjadi termobilisasi untuk mencapai sasaran program. Adapun proses partisipasi petani secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 3.

b. Prosedur Penyaluran Dana PKPS-BBM IP di Kelurahan KTK

Hal yang sama (mobilisasi) juga terjadi pada proses penyaluran dana program, walaupun dilakukan secara swakelola atas usulan masyarakat setempat, bukan berarti petani sebagai aktor pembangunan bekerja sendiri tetapi terdapat wadah (lembaga) yang memprakarsai keterlibatan petani dalam proses penyaluran dana PKPS-BBM IP. Adapun skema penyaluran dana PKPS-BBM IP di Kelurahan KTK dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

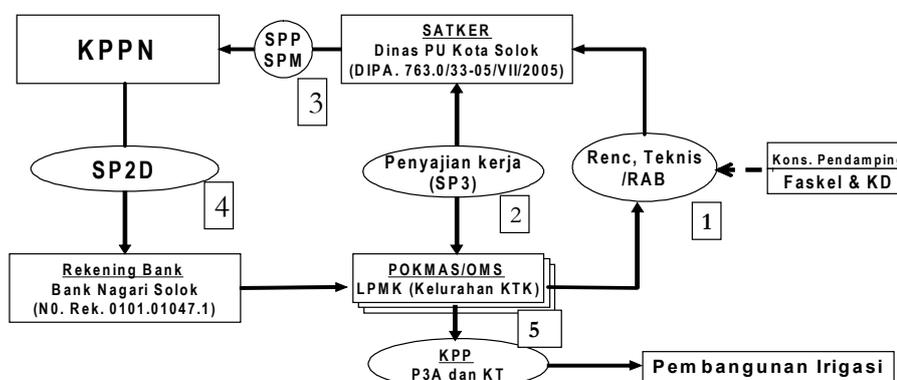
Gambar ini menunjukkan terdapatnya peran pihak-pihak yang berkuasa dalam proses penyaluran dana PKPS-BBM IP yang terdiri dari, Tim pemerintah dan instansi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat serta Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Kota Solok, seperti di tingkat pemerintah terdiri dari; Konsultan Pendamping (KPM) dan Tim Kecamatan, instansi terdiri dari KPPN dan Bank Pembantu sedangkan di tingkat masyarakat terdiri dari LPMK dan P3A.

Dana PKPS-BBM IP disalurkan melalui mekanisme yang ditetapkan dari pusat, sehingga petani dalam proses tersebut bertindak sebagai pemanfaat dana dan melaksanakan kegiatan sesuai sistem yang berlaku dalam program. Disamping itu, Pihak tersebut diketahui sangat berperan dalam program sehingga besar terjadinya mobilisasi kegiatan kepada petani sebagai pihak yang berkepentingan dengan program. Melalui Tabel 4 berikut ini secara ringkas dapat dijelaskan ten-

tang partisipasi petani dalam proses penyaluran dana PKPS-BBM IP.

Tabel 3. Proses Partisipasi Petani dalam Kegiatan Sosialisasi PKPS-BBM IP di Kota Solok

No.	Kegiatan Sosialisasi	Pelaksana	Pihak yang melibatkan petani	Proses Partisipasi petani (sampel)
1.	Kota - Penjelasan pedum PKPS-BBM IP - Pengorganisasian kegiatan	TKPr Walikota Solok	Tidak dikenal	Tidak relevan
2	Kecamatan - Penjelasan mekanisme program - Pembentukan Tim Kecamatan dan OMS	Satker	Lurah melalui instruksi camat	Pendukung: Menghadiri musyawarah untuk mengetahui informasi penyelenggaraan program
3.	Kelurahan - Identifikasi masalah - Penyusunan usulan kegiatan - Pembentukan KPP - Penetapan kegiatan - Sinkronisasi	Tim Kecamatan dan konsultan pendamping	LPMK	Pembuat keputusan: Menghadiri dan memberikan usulan , serta menetapkan kegiatan
4.	Kelompok - Pembentukan panitia pelaksana - Pembentukan kelompok kerja	LPMK	P3A	Pelaksana: Mempersiapkan kegiatan dan melaksanakan serta memanfaatkan hasil pembangunan



Gambar 1. Skema Penyaluran Dana PKPS-BBM IP di Kelurahan KTK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani dalam proses penyaluran dana bertindak sebagai pemanfaat karena dana dikelola oleh LPMK KTK. Dana tersebut disalurkan setelah rancangan teknis kegiatan diterima oleh satker dari konsultan. Kemudian LPMK KTK melakukan kontrak kerjasama dengan Satker, dimana dana untuk pembangunan irigasi

dialokasikan untuk Kelurahan KTK adalah Rp. 250 juta sesuai anggaran yang terdapat dalam RAB untuk diserahkan kepada masing-masing bendahara kelompok kerja yang telah ditetapkan melalui musyawarah.

Namun dana yang disalurkan terlambat dari pusat kepada KPPN Kota Solok untuk dicairkan melalui Lembaga

Keuangan (Bank) yang ditetapkan. Mengingat waktu pelaksanaan terlalu singkat (dapat selesai dalam tahun 2005) sehingga petani menyediakan biaya secara swadaya dalam bentuk fisik seperti penyediaan lahan, tenaga kerja serta sumber daya lainnya, hal ini mengindikasikan bahwa petani memiliki kemampuan berpartisipasi hanya saja pengaruh sistem yang berlaku dalam program me-

nyebabkan petani mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah (*top-down planning*).

Menurut Partowijoto (2004), proses partisipasi tidak harus dipaksakan sampai tingkat maksimal, tetapi perlu diupayakan untuk mencapai tingkat yang optimal sehingga lebih mudah diarahkan menuju kondisi yang berkelanjutan (*sustained*).

Tabel 4. Partisipasi Petani dalam Proses Penyaluran Dana PKPS-BBM IP

No.	Pelaksana	Peran	Temuan
1.	Konsultan pendamping	Melakukan penyusunan rencana teknis/RAB yang diserahkan kepada Satker.	Peran petani sebagai pemberi informasi terhadap usulan kegiatan namun Rencana teknis disusun oleh Konsultan untuk selanjutnya diserahkan kepada Satker
2	Satker	Melakukan kontrak kerjasama dengan OMS/LPMK	Petani mengetahui adanya kontrak kerjasama antara Satker dan LPMK melalui musyawarah dan informasi dari petani lain
3.	KPPN dan Bank	Menyediakan dana setelah memperoleh SPM dari satker	Dana yang disalurkan terlambat sehingga petani menyediakan biaya secara swadaya mengingat waktu pelaksanaan terlalu singkat
No.	Pelaksana	Peran	Temuan
4.	LPMK (OMS)	Melakukan pencairan dana melalui Bank Nagari Cab. Kota Solok	Petani memanfaatkan dana Rp. 250 juta untuk pembangunan irigasi yang disalurkan oleh LPMK kepada bendahara pada masing-masing kelompok kerja
5	P3A dan Petani (KPP)	Melaksanakan kegiatan	Petani mengetahui dana untuk pembangunan irigasi berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam RAB

Bila diperhatikan proses partisipasi yang dilalui petani dalam PKPS-BBM IP di Kelurahan KTK, diketahui lebih mengarah pada mobilisasi masyarakat sehingga partisipasi sebagai sebuah proses hanya sesaat dalam program karena petani kurang diberdayakan oleh pemerintah baik dalam keterlibatannya mempersiapkan kegiatan, menyampaikan gagasan hingga mengambil keputusan akibat dari dominasi yang berlebihan dari kalangan elit untuk mencapai sasaran program.

c. Tingkat Partisipasi Petani dalam Penyelenggaraan PKPS-BBM IP untuk Pembangunan Irigasi di Kelurahan KTK

Untuk dapat menentukan tingkat partisipasi tersebut, maka perlu ditinjau terlebih dahulu tingkat partisipasi petani dari beberapa tahap pelibatan petani dalam program. Menurut Partowijoto (2004), pada proyek pelibatan masyarakat perlu dimengerti adanya tahapan pembangunan dalam kaitannya dengan partisipasi yang dilakukan dengan melihat tahap inisiasi, tahap perencanaannya, dan tahap pelaksanaan hingga tahap keberlanjutan. Maka tahapan tersebut dapat dijadikan sebagai indikator sebagai dasar analisis tingkat partisipasi petani dalam penyelenggaraan PKPS-BBM IP di Kelurahan KTK.

Seperti diketahui bahwa proses partisipasi dalam penyelenggaraan PKPS-

BBM IP belum optimal dan kesesuaian par-tisipasi terhadap program lebih mengarah pada mobilisasi, maka untuk mengukur tingkat partisipasi petani dalam penyelenggaraan PKPS-BBM IP pa-

da proyek pembangunan irigasi di Kelurahan KTK dapat dijelaskan dari beberapa tahap-tahap kegiatan seperti tampak dalam Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Distribusi Tingkat Partisipasi Petani dari Tahap-Tahap Kegiatan PKPS-BBM IP untuk Pembangunan Irigasi di Kelurahan KTK

No.	Tahap-Tahap Kegiatan Pembangunan Irigasi	Total Skor diperoleh	Total Skor diharapkan	Pencapaian (%)	Kategori
1.	Tahap inisiasi - mempersiapkan musyawarah - menyebarkan informasi - mendaftar ke kelompok kerja - menghadiri rapat-rapat	238	368	64,7	Sedang
2.	Tahap perencanaan - perancangan kegiatan - menyumbang lahan kegiatan - menyumbang material - mensurvei lokasi	211	368	57,3	Sedang
3.	Tahap pelaksanaan - menyediakan peralatan - membersihkan saluran - mengangkut material - mengerjakan konstruksi	277	368	75,3	Tinggi
4.	Tahap keberlanjutan - mengembangkan usaha - merawat prasarana - menyediakan biaya perawatan	132	276	47,8	Sedang

Dari seluruh rangkaian hasil pencapaian tingkat partisipasi petani, analisis dan pengukurannya tidak cukup hanya dengan melihat ada atau tidaknya partisipasi tersebut, namun perlu pula dilihat tingkat partisipasi masyarakat (kelompok individu atau perorangan) dalam penyelenggaraan PKPS-BBM IP.

Secara konseptual Arnstein (1969) *cit* Zoebir, 2008, menyatakan bahwa partisipasi terjadi apabila telah ada pembagian ulang kekuasaan (*redistribution of power*) dalam menentukan pelaksanaan kegiatan antara penyedia kegiatan dengan masyarakat. Sebagaimana proses partisipasi petani dalam program, diketahui adanya peran pemerintah telah menunjukkan terjadinya distribusi kekuasaan dari pemerintah kepada masyarakat (petani), namun sebatas mana tingkat partisipasinya dapat ditentukan dengan melakukan analisis dari tahap-tahap partisipasi yang telah ditentukan

dari persentase pencapaian hasil penelitian di atas.

Maka berdasarkan hasil analisis tingkat partisipasi petani dalam penyelenggaraan PKPS-BBM IP mulai dari tahap inisiasi, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan, bila dikaitkan dengan teori Arnstein (1969) sebagaimana yang terdapat pada tipologinya dalam delapan tangga partisipasi masyarakat (*Eight Rungs on The Ladder of Citizen Participation*) dapat diketahui pada Tabel 6.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi petani terhadap penyelenggaraan PKPS-BBM IP mencapai 61,3% dimana tingkat partisipasi petani berada pada kategori tingkat partisipasi pura-pura (*tokenism*) artinya negosiasi terjadi dimana masyarakat (petani) didengar dan diperkenan berpendapat, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa

pandangan mereka dipertimbangkan oleh pemegang keputusan.

Tabel 6. Hasil Pencapaian Tingkat Partisipasi Petani dalam Penyelenggaraan PKPS-BBM IP di Kelurahan KTK

No	Tingkat partisipasi	Tahap Kegiatan				Pencapaian (%)
		Inisiasi	Perencanaan	Pelaksanaan	Keberlanjutan	
1.	Manipulasi					-
2.	Terapi					-
3.	Informasi					-
4.	Konsultasi					47,8
5.	Penentruman					57,3
6.	Kemitraan					64,7
7.	Pelimpahan wewenang					75,3
8.	Kendali masyarakat					-
Tingkat Pencapaian (%)		64,7	57,3	75,3	47,8	61,3

Hal ini diketahui pada tahap inisiasi, partisipasi petani berada pada tingkat ke enam, dimana telah terjalin suatu hubungan kemitraan (*partnership*) antara organisasi masyarakat setempat (LPMK/P3A) dengan Tim Pemerintah (konsultan, satker dan tim kecamatan) dalam rangka mempersiapkan kegiatan sedangkan petani diketahui masih kurang terlibat, walaupun informasi tentang program telah sampai kepada petani dari petani yang sebelumnya pernah ikut dalam kegiatan sosialisasi, tetapi inisiatif mempersiapkan musyawarah hanya diikuti oleh petani yang memiliki kedudukan dalam kelompok (pengurus P3A).

Pada tahap perencanaan, partisipasi petani berada pada tingkat ke lima karena peran tim pemerintah masih mendominasi dalam merencanakan kegiatan, dimana perumusan rencana teknis menghasilkan kesepakatan sebagai bentuk penentruman (*placation*) masalah petani terhadap kerusakan irigasi dan petani cenderung menerima kesepakatan tersebut. Dengan demikian, usulan petani dapat dengan mudah dikalahkan dalam pemilihan, dengan kata lain mereka (tim pemerintah) membiarkan petani untuk memberikan saran-saran atau rencana tambahan, tetapi pemegang kekuasaan tetap berhak untuk menen-

tukan legitimasi atau fisibilitas dari saran-saran tersebut.

Menurut Arnstein (1969 dalam Junanto, 2004), ada dua tingkatan dimana masyarakat ditentramkan: (1) kualitas pada bantuan teknis yang mereka miliki dalam membicarakan prioritas-prioritas mereka; (2) tambahan dimana masyarakat diatur untuk menekan prioritas-prioritas tersebut. Prioritas yang dihasilkan pada sosialisasi kegiatan di Kelurahan KTK adalah untuk pembangunan irigasi, dimana kebijakan tersebut merupakan rencana strategis Pemerintahan Kota Solok dalam rangka pengendalian banjir, sehingga rancangan kegiatan disusun dan ditetapkan oleh tim pemerintah setempat yang telah ditunjuk pada sosialisasi kegiatan di tingkat kota, kemudian diturunkan kepada masyarakat untuk pelaksanaannya, hal tersebut memberikan kesan program mengarah pada mobilisasi sehingga makna partisipasi masyarakat yang terdapat pada petunjuk teknis hanya sekedar konsep dan masyarakat (petani) diatur untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pada tahap pelaksanaan, partisipasi petani berada pada tingkat ke tujuh, dimana mulai terlihat adanya pelimpahan wewenang (*delegated power*) dari pihak tersebut kepada petani sebagai kelompok kerja

kegiatan untuk melaksanakan pembangunan irigasi sesuai konsep yang telah ditetapkan, meskipun tingkat partisipasi petani lebih tinggi pada pelaksanaan tetapi partisipasi yang terjadi masih memperlihatkan intervensi pihak lain kepada petani karena produk (rencana teknis) yang ditawarkan dari program merupakan hasil olahan dari pihak yang memiliki kedudukan sedangkan petani tinggal melaksanakan untuk mencapai sasaran dari program. Hal ini sesuai dengan pernyataan Tanjung (2001), dimana program pembangunan selama ini masih saja diturunkan dari atas (pemerintah) dan masyarakat tinggal melaksanakan dalam bentuk fisik di lapangan tanpa keterlibatan langsung dari masyarakat yang menjadi sasaran program (dalam perencanaan) dengan sendirinya dukungan masyarakat terhadap program menjadi pura-pura sehingga tingkat partisipasinya masih layak disebut sebagai mobilisasi.

Hal tersebut terjadi pada tahap keberlanjutan, dimana partisipasi petani berada pada tingkat ke empat yaitu konsultasi (*consultation*) karena petani diketahui masih bersikap pasif dalam memelihara hasil-hasil pembangunan sebagai dampak dari kurangnya keterlibatan petani dalam proses pembangunan, pada akhirnya petani tetap mengharapkan bantuan pemerintah dalam mengatasi persoalan mereka dengan mengkonsultasikan permasalahan mereka kepada pemerintah (tim survei) apabila program mengenai pembangunan irigasi kembali diterapkan, bila hal ini masih tetap terjadi maka petani (masyarakat) akan tetap terbiasa menerima bantuan dari pemerintah tanpa memiliki kreatifitas untuk memberdayakan kemampuan petani itu sendiri dalam mengatasi persoalannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Proses partisipasi petani dalam penyelenggaraan PKPS-BBM IP di Kelurahan KTK belum optimal, hal ini ditandai dari kegiatan sosialisasi dan penyaluran dana masih didominasi oleh pihak yang memiliki kedudukan dalam program (Tim pemerintah, LPMK KTK dan pengurus P3A) dengan dipilihnya prasarana irigasi sebagai prioritas pembangunan di Kelurahan KTK sedangkan petani bertindak sebagai kelompok kerja kegiatan setelah direkrut oleh P3A setempat. Meskipun penyelenggaraan program sesuai dengan prinsip-prinsip PKPS-BBM IP karena dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat namun secara partisipatif dukungan dan tanggungjawab petani terhadap program lebih mengarah pada mobilisasi kegiatan sehingga keterbukaan menyampaikan aspirasi dan keberlanjutan terhadap prasarana terbangun menjadi semu atau sesaat dalam program karena masih kurangnya pengembangan prasarana terbangun dari petani dalam melestarikan hasil pembangunan.

Sedangkan tingkat partisipasi petani terhadap program diketahui berada pada kategori partisipasi pura-pura (*tokenism*) artinya negosiasi (musyawarah) yang dilakukan menghasilkan kesepakatan, dimana dana program untuk pembangunan irigasi dapat diterima oleh seluruh *stakeholders* namun petani sebagai pihak yang berpengaruh (pelaku) terhadap pemanfaatan prasarana tersebut bersikap pasif dan cenderung menerima keputusan tersebut, walaupun belum tentu sesuai dengan aspirasinya karena hak dan legitimasi program dipegang oleh pihak yang memiliki kedudukan (penguasa) dalam program, pada akhirnya petani tetap mengharapkan bantuan dari pemerintah dalam mengatasi persoalannya.

Saran

Untuk meningkatkan partisipasi petani dalam proses kegiatan program menyangkut pembangunan irigasi kedepan, diperlukan kesediaan pemerintah memberikan kesempatan kepada petani melalui organisasi mereka (P3A/Kelompok Tani) untuk dilibatkan dalam setiap proses kegiatan baik dari tahap awal (sosialisasi), perencanaan, pelaksanaan hingga pengelolaan hasil-hasil pembangunannya, sedangkan pemerintah dapat bertindak sebagai fasilitator dan mengawasi aktifitas dari penyelenggaraan program tersebut, hal ini penting mengingat Kota Solok telah memiliki PERDA No. 2 Tahun 2005 tentang prosedur perencanaan pembangunan partisipatif, maka sudah seyakinya pemerintah setempat memperhatikan prakarsa dari petani (masyarakat).

Untuk meningkatkan partisipasi petani diperlukan kesediaan pemerintah menjadi promotor pembangunan dengan memberi peluang kepada petani dalam mengatur sendiri kebutuhannya melalui organisasi mereka (P3A/Kelompok Tani) seperti mengajukan sebuah proposal pembangunan kepada pemerintah, dalam arti kata petani merancang sendiri program pembangunan yang disponsori oleh pemerintah karena disadari program yang datang dari pemerintah lebih cenderung mengarah kepada mobilisasi kepada petani sehingga petani kurang kreatif dan selalu tergantung kepada pemerintah dalam mengatasi persoalannya.

Untuk peneliti selanjutnya, dapat mempertimbangkan kembali program partisipatif yang diterapkan oleh pemerintah, agar tidak terjadi dualisme pemahaman antara partisipasi dan mobilisasi seperti kasus Kelurahan KTK. Ketika pemerintah Kota Solok telah memiliki kebijakan dalam pembangunan partisipatif, pada saat program datang dari pemerintah

pusat kebijakan tersebut ikut terpengaruhi karena sistem yang berlaku dalam program sehingga yang terjadi pemerintah setempat memobilisasi masyarakat untuk mencapai sasaran dari program tersebut, sehingga berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraannya maupun dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunannya.

Daftar Pustaka

- Arnstein, S.R. 1969. *A Ladder of Citizen Participation*. Journal of the American Institute of Planners. 35(4): 216-224.
- Bappeda Kota Solok. 2004. *Buku Profil Daerah Kota Solok: Potensi/Peluang Investasi Kota Solok*. Pemerintahan Daerah Tingkat II Propinsi Sumatera Barat. Kota Solok.
- Departemen Pekerjaan Umum. 2005. *Pedoman Umum Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM bidang Infrastruktur Pedesaan Tahun 2005*. Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jakarta.
- Dinas Kimprasda dan Tata Ruang Kota Solok. 2005. *Kontrak Swakelola PKPS-BBM IP (2005): Kegiatan Perbaikan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bandar Tengah, Bandar Ampang Ngarai dan Bandar Sawah Body di Kelurahan KTK*. Dinas Pekerjaan umum. Solok.
- Junanto, Deny. 2004. *Model Pendekatan Ekosistem dalam Pembangunan Masyarakat Daerah*. LP3S. Bogor.
- Maryono, Erfan dkk. 2006. *Laporan Akhir: Studi Evaluasi Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Pedesaan (PKPS BBM IP) Tahun 2005*. LP3ES. Jakarta.

- Partowijoto, Achmadi. 2004. *Makna Partisipasi dalam Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Air & Sistem Irigasi*. PU-SDA. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Solok. No. 2 Tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan partisipatif.
- Rantetoding, Patana. 2005. *Sosialisasi Pelaksanaan PKPS-BBM bidang Infrastruktur Pedesaan*. Direktorat Jenderal Perkotaan dan Pedesaan. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Tanjung, Faidil. 2001. *Pemahaman Partisipatif Kondisi Pedesaan (PPKP) dalam Implementasi Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI)*. Fakultas Pertanian. Universitas Andalas. Padang.
- Usman, Azwir. 2003. *Pengaruh Partisipasi Wanita Tani dalam Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Usaha untuk Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan*. [Skripsi]. Padang. Fakultas Pertanian. Universitas Andalas.
- WISMP, 2005. *Preparation of Program Implementation Plan-Phase I. Main Report (Indonesian version)*. World Bank-Indonesia. Jakarta.
- Zoebir, Zuryawan I. 2008. *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah*. [Tesis]. Jakarta. Magister Ilmu Hukum. Universitas Jayabaya.
-

ANALISIS SISTEM DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI SUMATERA BARAT

(Studi kasus : PT Pupuk Sriwijaya Cabang Sumbar)

Widya Fitriana

Abstrak: *As the fertilizer scarcity is getting worst in West Sumatra in last few years, some critical question emerging from these phenomena, i.e.; how is the subsidized fertilizer distribution system?, what are the problem encounter in distributing subsidized fertilizer? This study tries to answer those question by focusing on the management of PT PUSRI branch office as well as its 5 marketing areas; Padang Pariaman, Tanah Datar, Solok, Agam, and Pasaman. The result shows that none of these five areas marketing unit could sell fertilizer at its ceiling price which was Rp 1.200/kg as of May 17, 2006. This was mainly because of high distribution cost shouldered by each marketing agent. Among the five marketing area unit, Pasaman is the most efficient one with a margin ratio of 2.32.*

Kata Kunci: *biaya distribusi, margin distribusi, rasio keuntungan*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Industri pupuk merupakan salah satu industri strategis yang berperan penting dalam menunjang produksi pangan nasional. Dalam konteks sistem agribisnis, keberadaan industri ini dikenal sebagai industri hulu (*back stream agribusiness*) yang menyediakan input produksi bagi usaha tani. Ketersediaan pupuk secara tepat akan sangat menentukan keberhasilan produksi pertanian. Oleh karena itu sangat *urgent* untuk membangun sistem distribusi pupuk yang efisien sehingga ketersediaan pupuk dalam layanan 6T (tepat jenis, jumlah, mutu, harga, waktu, dan tempat) dapat dinikmati petani.

Menurut Cravens (1997) sistem distribusi merupakan bagian dari upaya untuk memasarkan produk yang dihasil-

kan oleh sebuah industri. Dengan sistem distribusi yang baik, pemasaran produk diharapkan dapat mencapai sasaran. Pendapat serupa tentang pentingnya membangun sistem distribusi produk yang efisien juga ditegaskan oleh Kotler dan Armstrong (1997) bahwa walaupun perusahaan sukses menciptakan produk yang berkualitas tinggi, dengan harga yang terjangkau dan promosi yang gencar, namun semuanya tidak akan berarti apa-apa apabila konsumen sulit untuk mendapatkan produk tersebut karena sistem distribusinya yang macet dan tidak efisien.

Perumusan Masalah

Munculnya kasus kelangkaan pupuk diberbagai daerah saat ini, terjadi hampir merata di daerah Jawa dan luar Pulau Jawa, tidak terkecuali Sumatera

Barat. Kelangkaan pupuk di Sumbar belakangan ini menyisakan sejumlah pertanyaan tentang sistem distribusi pupuk yang pelaksanaannya dipegang oleh PT Pusri sebagai satu-satunya distributor pupuk bersubsidi yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.26/MPP/Kep-1/1999. Mestinya krisis pupuk di Sumbar tidak terjadi, mengingat bahwa untuk tahun 2007 ini, kuota pupuk bersubsidi untuk wilayah Sumbar telah ditambah hingga 42,71%. Semula kuota pupuk urea bersubsidi untuk wilayah Sumbar hanya 96 ribu ton/tahun, namun sejak awal tahun 2007 ditingkatkan menjadi 137 ribu ton/tahun. Dengan penambahan kuota ini mestinya tidak terjadi lagi kelangkaan pupuk di tingkat petani.

Berdasarkan informasi diatas maka persoalan mendasar dari kasus kelangkaan pupuk yang melanda Sumbar akhir-akhir ini perlu diteliti dari segi mekanisme sistem distribusi pupuk bersubsidi di Sumbar sehingga diharapkan subsidi pupuk benar-benar dapat dinikmati oleh petani sasaran.

Menurut Azzaino (1981) untuk mengetahui efisien atau tidaknya saluran distribusi, ada beberapa indikator yang dapat digunakan, yaitu :

1. Bagian yang diterima oleh produsen dan harga yang dibayarkan oleh konsumen. Semakin kecil bagian ini, berarti semakin tidak efisien saluran distribusi yang digunakan.
2. Margin distribusi/pemasaran
Semakin tinggi margin distribusi/pemasaran, semakin tidak efisien saluran pemasaran/distribusi tersebut.
3. Biaya pemasaran yang dikeluarkan selama proses distribusi berlangsung
Jika biaya pemasaran/distribusi yang dikeluarkan oleh satu komoditi yang

sama lebih mahal, maka sistem pemasaran/distribusi produk tersebut tidak efisien

4. Rasio keuntungan dan biaya distribusi

Semakin besar nilai rasio, semakin tidak efisien saluran distribusi tersebut, sebab pedagang dengan biaya yang rendah mengambil keuntungan yang tinggi.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sbb:

1. Menganalisis sistem distribusi pupuk bersubsidi di Sumbar
2. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi di Sumbar.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang realisasi sistem distribusi pupuk bersubsidi di Sumbar serta persoalan yang dihadapi dalam sistem distribusi tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan perusahaan terkait dalam merumuskan sistem distribusi pupuk yang ideal sehingga pemberian subsidi benar-benar dapat dinikmati oleh petani sasaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada PT Pusri wilayah Sumbar yang berlokasi di Jalan Agus Salim No.4 Padang. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) karena PT Pusri merupakan satu-satunya penyalur pupuk bersubsidi untuk wilayah Sumbar yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah berdasarkan pada SK Memperindag RI No.26/MPP/Kep.1/1999. Penelitian ini dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan sejak Maret – Oktober 2007.

Data yang dikumpulkan pada studi ini meliputi data primer dan data

sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan survei terhadap sistem distribusi pupuk di masing-masing lini distribusi hingga sampai ke lini akhir yaitu petani konsumen.

Pada Lini I dan Lini II, data diperoleh dari perusahaan sendiri selaku pelaksana distribusi. Wawancara dilakukan dengan karyawan yang menangani bidang penjualan pupuk yaitu Kasi penjualan dan Koordinator urusan penjualan yang membawahi 5 (lima) wilayah PPK (Pemasaran Pusri Kabupaten). Pada Lini III yaitu distribusi pupuk di tingkat KUD penyalur, dipilih KUD sampel secara acak yaitu sebesar 30% dari total KUD yang terdapat pada wilayah PPK sampel pada lini II. Pada Lini IV, yaitu distribusi pupuk di tingkat KUD pengecer, juga dipilih sampel secara acak sebesar 30% dari total sampel di Lini III.

Pengambilan sampel sebesar 30%, menurut Nazir (1998) telah dapat merepresentatifkan informasi yang diperoleh dari populasi secara keseluruhan. Sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh dari dinas atau instansi terkait.

Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah :

1. Sistem distribusi pupuk

Mekanisme sistem distribusi pupuk

Berkaitan dengan aspek kuantum/ volume, kualitas, tempat, mutu, harga, serta kapasitas gudang penerima alat pengangkutan serta sarana dan fasilitas penunjang yang digunakan.

Margin distribusi/ pemasaran pupuk

- a. Harga di tingkat produsen (lini atas)
 $H_p = Rp/Kg$
- b. Biaya pemasaran/ distribusi
 $B = Rp/Kg$

- c. Keuntungan yang diambil oleh lini pemasaran
 $Jl = Rp/Kg$
- d. Harga di tingkat lini akhir (petani konsumen)
 $H_k = Rp/ Kg$

2. Masalah-masalah yang dihadapi dalam proses distribusi pupuk

Masalah yang dihadapi dalam proses distribusi pupuk bersubsidi dilihat dari *supply* pupuk, waktu kedatangan pupuk, dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang seperti sarana transportasi, kapasitas gudang penampung untuk masing-masing lini, dan volume penjualan yang dicapai.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Tujuan pertama dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis margin pemasaran/ distribusi. Secara matematis margin distribusi pupuk dapat dihitung dengan menggunakan formula sbb:

$$M = H_k - H_p \quad (\text{Azzaino, 1981})$$

Dimana :

- M = Margin pemasaran (Rp)
 Hk = Harga yang dibayarkan oleh konsumen lini (Rp/ Kg)
 Hp = Harga yang dibayarkan oleh produsen lini (Rp/ Kg)

Besarnya margin distribusi pupuk pada dasarnya merupakan penjumlahan dari biaya distribusi dan keuntungan yang diperoleh oleh lini distribusi. Secara matematis dapat dirumuskan sbb:

$$M = B + Jl \dots\dots\dots (\text{Azzaino, 1981})$$

Dimana :

- M = Margin pemasaran (Rp)
 B = Biaya Pemasaran (Rp/ Kg)
 Jl = Keuntungan yang diambil oleh lini distribusi (Rp/ Kg)

Persentase biaya distribusi dikeluarkan oleh lini distribusi pupuk, secara matematis dapat dirumuskan sbb:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Biaya Distribusi} \\ &= \frac{\text{Biaya Distribusi}}{\text{H arg a Konsumen Lini}} \times 100\% \\ & \hspace{15em} (\text{Swastha, 1993}) \end{aligned}$$

Persentase keuntungan yang diambil oleh lini distribusi pupuk, secara matematis dapat dirumuskan sbb:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase keuntungan} \\ &= \frac{\text{Keuntungan}}{\text{H arg a Konsumen Lini}} \times 100\% \\ & \hspace{15em} (\text{Stanton, 1996}) \end{aligned}$$

Rasio keuntungan dengan biaya pemasaran yang dikeluarkan secara matematis dapat dirumuskan sbb:

$$\begin{aligned} & \text{Rasio Keuntungan} \\ &= \frac{\text{Keuntungan}}{\text{Biaya Distribusi}} \dots (\text{Soekartawi, 1993}) \end{aligned}$$

Tujuan kedua dianalisis secara kualitatif, dengan menggambarkan secara deskriptif mekanisme sistem distribusi pupuk bersubsidi di Sumbar serta persoalan/ kendala yang dihadapi dalam pendistribusian pupuk hingga mencapai lini akhir (petani konsumen)

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Pusri mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai ke Lini IV. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik (Palembang), Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah propinsi, Lini III

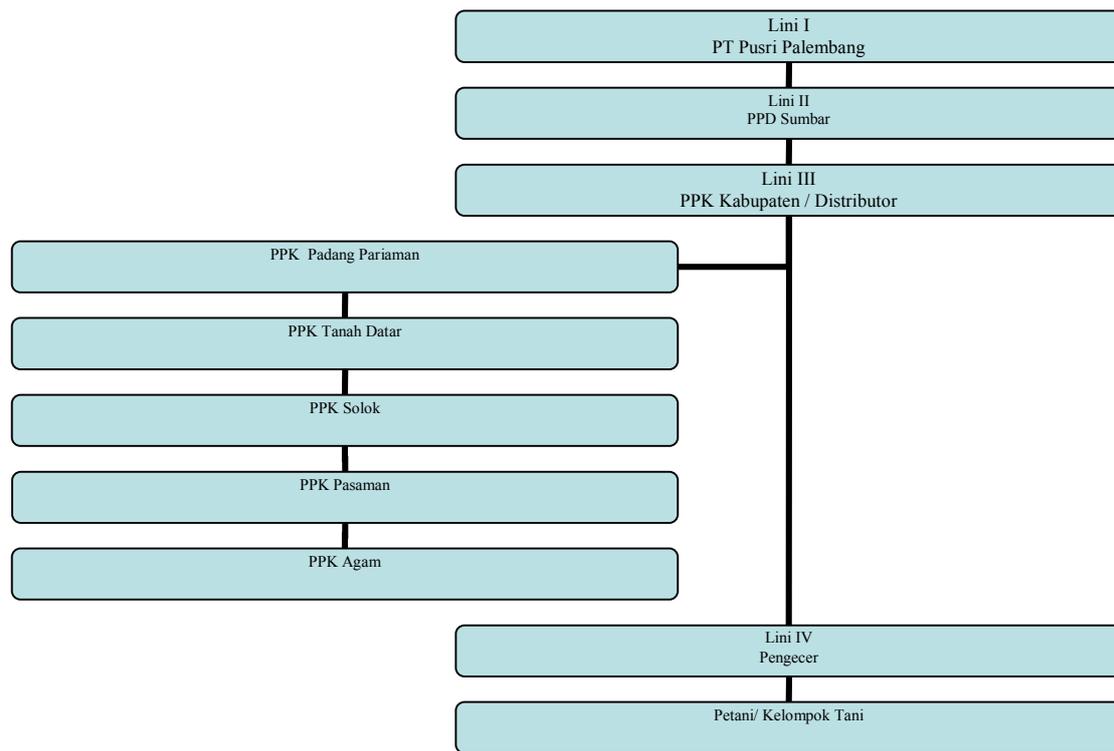
adalah lokasi gudang produsen/distributor di masing-masing wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk oleh produsen, dan lini IV adalah lokasi gudang pengecer di wilayah kecamatan/desa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh distributor.

PPD Sumbar memiliki 5 wilayah Pemasaran Pusri Kabupaten (PPK). Masing-masing PPK memiliki gudang di daerahnya masing-masing yang dikenal sebagai GPP (Gudang Pupuk Pusri) dan tiap-tiap gudang dikepalai oleh kepala gudang yang bertanggung jawab kepada kepala PPK di daerah tersebut.

Mekanisme Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi

Mekanisme sistem distribusi pupuk bersubsidi mulai dari produsen (Lini I) hingga sampai ke petani/ kelompok tani (Lini IV) terlihat pada Gambar-1.

Dari hasil wawancara dengan Kasie Penyediaan/ Penjualan PPD Sumbar, pengalokasian kebutuhan pupuk urea untuk seluruh Indonesia didasarkan kepada Peraturan Menteri Pertanian No.66/Permentan/OT.140/12/2006, sedangkan di tingkat propinsi mengaju pada Peraturan Gubernur Sumbar No.12 tahun 2007. Namun temuan dilapangan menunjukkan banyak keluhan petani akan kelangkaan pupuk bersubsidi, di samping harganya yang cukup tinggi, antara Rp 1400/Kg-1700/Kg. Padahal HET yang ditetapkan adalah Rp 1200/Kg atau naik 14,29% dari HET per 1 Januari 2006. Di samping itu perbandingan antara rencana dan realisasi distribusi pupuk bersubsidi di masing-masing kabupaten tidak seimbang.



Gambar.1 Mekanisme Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi

Tabel-1 : Rencana dan Realisasi Distribusi (ton) Pupuk Bersubsidi di Sumbar Tahun 2006

No	Kabupaten	Rencana	Realisasi	Realisasi/ Rencana (%)
1	Pasaman	9.117	5.118	56.14
2	50 Kota	12.122	5.701	47.03
3	Agam	11.101	6.147	55.37
4	Tanah datar	9.298	8.076	86.86
5	Padang Pariaman	11.151	9.065	81.29
6	Solok	11.257	8.682	77.13
7	Sawah Lunto/ Sijunjung	5.146	1.460	28.37
8	Pesisir Selatan	11.799	2.631	22.29
9	Mentawai	105	0	0
10	Pasaman Barat	10.980	9.980	90.89
11	Solok Selatan	3.164	3.100	97.98
12	Dharmasraya	3.224	2.309	71.62
13	Kota Padang	2.675	2.146	80.23
	Jumlah	101.739	64.415	63.31

Sumber : Dipertahor Sumbar (2007)

Berdasarkan struktur biaya distribusi pupuk di masing-masing wilayah pemasaran PPK di 5 (lima) kabupaten terlihat bahwa biaya transportasi merupakan komponen biaya distribusi terbesar. Hampir lebih dari 60% biaya distribusi pupuk disebabkan karena biaya transportasi untuk mengangkut pupuk ke gudang distributor dan gudang pengecer. Bagi distributor dan pengecer yang

tidak memiliki kendaraan sendiri, biasanya menggunakan jasa ekspedisi untuk mengangkut pupuk ke gudang mereka, semakin jauh jarak ke gudang pembeli, maka semakin besar pula biaya transportasi yang harus mereka keluarkan.

Berikut adalah komponen biaya yang dikeluarkan untuk mendistribusikan pupuk mulai dari Lini-1 hingga ke Lini-IV (Dalam Rp/Kg)

Tabel-2 : Komponen Biaya Distribusi Pupuk di Masing-Masing PPK

No	Biaya Distribusi	Pemasaran Pusri Kabupaten (PPK)				
		PPK-1	PPK-2	PPK-3	PPK-4	PPK-5
1	Harga Jual PPD Sumbar	1.060	1.100	1.070	1.020	1.070
2	Total Biaya Distribusi Distributor	55	70	60	25	45
3	Pembelian pengecer	1.380	1.400	1.250	1.165	1.165
4	Total Biaya Distribusi pengecer	15	40	50	179.95	79.95
5	Harga konsumen	1.600	1.700	1.500	1.700	1.500
6	Total Biaya Distrubusi	70	110	110	204.95	305.05
7	Total Margin Distribusi	540	600	430	680	430
8	Rasio Keuntungan Distribusi	6.71	4.45	2.91	2.32	2.44

Keterangan:

PPK-1 : Padang Pariaman
 PPK-2 : Tanah Datar
 PPK-3 : Solok

PPK-4 : Pasaman
 PPK-5 : Agam

Hal yang menarik dari penelitian ini didapatkan bahwa, jika dilihat dari total margin distribusi maka PPK Pasaman menempati total margin terbesar dibandingkan keempat wilayah PPK lainnya yaitu mencapai sebesar Rp 680/kg, namun jika dilihat dari nilai rasio keuntungan terhadap biaya distribusi, justru wilayah PPK Pasaman inilah yang memiliki saluran pemasaran yang paling efisien dengan rasio keuntungan terkecil yaitu mencapai 2.32. Kendati

harga pupuk eceran di tingkat petani di daerah ini paling mahal dibandingkan daerah PPK lainnya, yaitu Rp 1.700/kg, namun demikian rasio keuntungan yang diambil oleh lembaga niaga justru paling kecil dibandingkan daerah PPK lainnya.

Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi di Sumbar antara lain :

1. Besarnya biaya transportasi.

Lembaga niaga yang terlibat dalam distribusi pupuk mengeluhkan besarnya biaya transportasi yang harus dikeluarkan untuk mengangkut pupuk dari lini pembelian ke gudang mereka. Terlebih dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak. Hal ini menyebabkan harga jual mereka sulit untuk mencapai (sama) dengan HET yang ditetapkan pemerintah.

2. Penyaluran pupuk bersubsidi dari distributor kabupaten ke pengecer sering kali tidak tepat waktu.
3. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa lebih dari 60% responden mengalami jangka waktu keterlambatan penerimaan pupuk berkisar 1-2 minggu, 26.77% mengalami keterlambatan lebih dari 2 minggu, dan hanya 13.33% yang menerima pupuk tepat waktu.
4. Pengadaan dan penyaluran pupuk dari produsen ke distributor dan pengecer seringkali belum sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
5. Belum tepat harga.
Dari kelima wilayah PPK, ternyata tidak satupun yang mampu menerapkan harga jual sesuai dengan HET per 17 Mei 2006 yaitu sebesar Rp 1.200/Kg.
6. Penyusutan yang dialami selama proses bongkar muat dan pendistribusian pupuk (sekitar 3%), menyebabkan jumlah pupuk yang sampai ke pengecer lebih sedikit dari jumlah yang dibeli dari gudang distributor.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa sistem distribusi yang paling efisien terjadi pada wilayah PPK Pasaman dengan rasio keuntungan dis-

tribusi yang paling kecil dibandingkan keempat wilayah PPK lainnya yaitu sebesar Rp 2.32

2. Bahwa sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam distribusi pupuk bersubsidi adalah besarnya biaya transportasi yang harus dikeluarkan, pendistribusian pupuk yang belum sesuai dengan prinsip 6T terutama belum tepat waktu, tepat jumlah dan tepat harga serta adanya biaya penyusutan akibat proses bongkar muat pupuk saat distribusi pupuk berlangsung.

Saran

Beberapa hal yang dapat disarankan berdasarkan hasil penelitian ini adalah :

1. Disarankan kepada PPD Sumatera Barat agar dapat mengontrol pasokan pupuk yang diterimanya dari Lini-1, agar sesuai dengan prinsip 6T yang menjadi slogan perusahaan ini dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Selain itu juga disarankan agar PPD dapat melakukan kontrol dan pengawasan terhadap ketersediaan pupuk di Lini III dan IV.
2. Disarankan kepada distributor dan pengecer agar dapat melakukan pesanan pupuk ke PPD lebih awal sehingga resiko keterlambatan datangnya pupuk dapat diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzaino, M. 1981. *Pengantar Tataniaga*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Cravens, David. 2001. *Pemasaran Strategis*. Erlangga. Jakarta.
- Darwis, Valeriana. 2004. *Kebijakan Distribusi, Tingkat Harga dan Penggunaan Pupuk di Tingkat Petani*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar. 2003. *Data Rayonisasi*

- Penyebaran Pupuk Bersubsidi Berdasarkan SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.70/MPP/Kep/2/2003.* Padang.
- Dipertahor Sumbar. 2007. *Rencana dan Realisasi Pupuk Subsidi Propinsi Sumbar Tahun 2006.* Padang.
- Kotler, Philip dan Amstrong, Gary. 1997. *Dasar-Dasar Pemesanan.* PT Prehelindo. Jakarta.
- Nazir. M. 1998. *Metodologi Penelitian.* Ghalia Indonesia. Jakarta.
- PT. Pusri. 1994. *Sejarah Tataniaga Pupuk.* <http://www.niaga.pusri.co.id>.
- Puradinata, S Djatnika. 2001. *Inovasi Melalui Teknologi Untuk Mengatasi kegagalan Pasar Dalam Sistem Industri Penunjang Pengadaan Pangan Nasional: Studi Kasus PT Pupuk Kujang,.* Tesis JBPTITBPP
- Soekartawi.1993. *Prinsip Dasar`Manajemen Pemasaran.* Erlangga. Jakarta.
- Swastha, Basu. 1993. *Azas-Azas Marketing.* Liberty. Yogyakarta.
1979. *Saluran Pemasaran.* GP FE UGM. Yogyakarta.

ANALISIS PENGEMBANGAN USAHA KERAJINAN ANYAMAN SEBAGAI KOMODITI UNGGULAN DALAM KERANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT

Studi Kasus di Desa Taratak Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota

Ferdhinal Asful

Abstract: *this study aims to (1) study karakteristik sumberdaya manusia rumah tangga pengrajin anyaman, (2) analyze the characteristic's usaha kerajinan anyaman sebagai komoditi unggulan, (3) memahami strategi dan kebijakan lembaga di tingkat desa dan instansi pemerintah terkait sehubungan dengan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi rakyat. The study result show that di satu sisi, karakteristik sumberdaya manusia rumah tangga pengrajin anyaman berada pada kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan yang diperlihatkan dengan banyaknya keterbatasan dalam hal kepemilikan terhadap aspek sumberdaya manusia. Sementara pada sisi yang lain, usaha kerajinan anyaman sebagai usaha ekonomi rakyat belum berkembang karena rendahnya akses terhadap sumberdaya ekonomi produktif, yang meliputi: modal, pasar, sarana prasarana pendukung, serta keterisoliran letak desa menambah ketidakberdayaan pengrajin dalam pengembangan usaha. Finally, akibat akumulasi persoalan pada tataran kelembagaan yang tidak akomodatif, baik lembaga pemerintahan desa maupun lembaga ekonomi desa, serta jenis program pembinaan instansi pemerintah terkait kurang cocok dengan kebutuhan pengrajin, maka strategi dan program yang telah dijalankan pemerintah belum berperan dalam memberdayakan usaha ekonomi rakyat kerajinan anyaman di Desa Taratak Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota*

Kata Kunci : *pemberdayaan ekonomi rakyat, akses sumberdaya produktif, akses kelembagaan yang akomodatif*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Strategi pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi ternyata menimbulkan kesenjangan yang nyata dan kesejahteraan lebih banyak dinikmati oleh masyarakat lapisan ekonomi atas dibanding lapisan masyarakat miskin. Nugroho (1997) menyatakan bahwa persoalan ketimpangan ekonomi merupakan salah satu penyebab

munculnya persoalan kemiskinan dan ketidakberdayaan yang selalu menyertai setiap hasil-hasil pembangunan. Dengan kata lain, Kartasasmita (1996) melihat bahwa persoalan kemiskinan dipengaruhi oleh faktor struktural yang tidak memberi kesempatan kepada rakyat untuk mengakses sumber-sumber kemajuan ekonomi.

Chambers dalam Pranarka dan Moeljarto (1996) menawarkan upaya untuk mengatasi situasi ketidakberdayaan atau kemiskinan dengan

pendekatan pemberdayaan masyarakat miskin sebagai suatu paradigma dominan dalam pembangunan yang diikuti dengan peralihan kekuatan rakyat dari sebagai objek menjadi subjek pembangunan. Sejalan dengan itu, Kartasasmita (1996) mengedepankan suatu pemikiran baru sebagai arah strategi pembangunan yang dikenal dengan istilah *people centered development* atau yang dikenal dengan paradigma pemberdayaan masyarakat.

Dari paradigma pemberdayaan masyarakat, mengemuka terminologi pemberdayaan ekonomi rakyat dengan artian upaya kearah mendorong percepatan perubahan struktural melalui perluasan akses rakyat dalam memanfaatkan sumberdaya produktif untuk memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat. Disamping itu, strategi pemberdayaan ekonomi rakyat juga terkait dengan akses terhadap kelembagaan yang akomodatif dan responsif (Baswir, 1997), dalam mengagregasikan kemampuan dan pencapaian tujuan bersama dan selanjutnya memperkuat posisi tawar-menawar (*bargaining position*) masyarakat desa (Juoro, 1998).

Perumusan Masalah

Persoalan besarnya jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat merupakan permasalahan kompleks yang terus diupayakan untuk mencari solusi yang sesuai. Selama ini program-program pemberdayaan ekonomi rakyat yang ada cenderung menyamaratakan permasalahan masyarakat sebagai suatu kebutuhan masyarakat yang harus ditindaklanjuti tanpa lebih dahulu mengkaji tantang permasalahan dan kebutuhan masyarakat itu lebih jauh. Sehingga ini berakibat pada sering terjadinya

program pembangunan yang tidak tepat sasaran.

Fakta persoalan kemiskinan di Sumatera Barat dapat menjelaskan bahwa perlu adanya penerapan pendekatan yang terarah. Pada posisi inilah penerapan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi penting agar masyarakat menjadi semakin berdaya untuk mengejar ketertinggalannya. Rumusan konkret pendekatan ini dijabarkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat melalui "*Gerakan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa-Komoditi Unggulan (One Village One Product)*" sebagai sebuah strategi pembangunan pedesaan di Sumatera Barat. Untuk teknis pelaksanaannya, di Kabupaten Lima Puluh Kota dikenal dengan konsep "*Strategi Pengembangan Daerah (Gerakan Ekonomi menuju Masyarakat yang Aman dan Sejahtera/GEMAS)*" yang memprioritaskan pembangunan pedesaan berdasarkan perwilayahan komoditi ke dalam empat wilayah komoditi unggulan (1).

Desa Taratak sebagai sebuah desa miskin termasuk pada perwilayahan komoditi unggulan industri kecil dengan komoditi kerajinan anyaman *mansiang* (2) sebagai usaha ekonomi rakyat. Kondisi aktualnya, usaha ekonomi rakyat ini belum berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji faktor penyebab ketidakberdayaan dan kemiskinan masyarakat Desa Taratak yang tercermin dari tidak berkembangnya usaha ekonomi rakyat selama ini apakah disebabkan karena lemahnya akses terhadap sumberdaya produktif dan kelembagaan yang tidak akomodatif? Untuk itu, diperlukan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat

yang lebih terarah dan jelas, baik dari segi konsep, strategi, dan pelaksanaan. Pada akhirnya, kesemuanya ini bermuara kepada upaya untuk menemukan kerangka jawaban guna menjawab permasalahan yang ada di seputar pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mempelajari karakteristik sumberdaya manusia rumah tangga pengrajin anyaman dalam konteks pemberdayaan
2. Menganalisis karakteristik usaha kerajinan anyaman sebagai komoditi unggulan dalam konteks pemberdayaan
3. Memahami peran kelembagaan sehubungan dengan program pemberdayaan ekonomi rakyat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian ini memanfaatkan rumah tangga yang mengusahakan usaha ekonomi rakyat berupa kerajinan anyaman *mansiang* sebagai unit analisis. Pemilihan sejumlah 50 sampel pengrajin dilakukan dengan menggunakan teknik *stratified random sampling* dan pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, panduan wawancara mendalam, dan studi dokumen. Untuk tujuan pertama, digunakan variabel sumberdaya manusia yang terdiri dari: umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, pelatihan, keterampilan, jenis pekerjaan, alternatif pekerjaan, pengalaman berusaha, dan status sosial

(Bachtiar, 1997; Kartasasmita, 1996; Syarief, 1998; Sjafrizal, 1997).

Tujuan kedua, digunakan variabel: (a) teknis-produksi (ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga terampil dan peralatan produksi, kemampuan produksi dan penggunaan teknologi, serta kualitas produk; (b) ekonomi-manajemen (kewirausahaan, potensi permintaan, pemasaran produk dan kondisi persaingan, biaya produksi, serta kelembagaan pendukung (Sjafrizal, 1997; Syarief, 1998; Kartasasmita, 1996; Bachtiar, 1997). Tujuan ketiga akan dianalisis temuan wawancara dan studi dokumen terkait peran kelembagaan dalam pengembangan ekonomi rakyat. Ketiga tujuan ini akan dianalisis secara mendalam dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat/ekonomi rakyat yang dikemukakan oleh Kartasasmita (1996) dan diperkuat dengan ahli-ahli lain (Chambers, 1989 dalam Sarman, 1997; Thorbecke, 1993 dalam Raharjo dan Rinakit, 1996; Moeljarto, 1996; Pranarka dan Moeljarto, 1996; Kluckhohn dan Stroedbeck, 1967 dalam Ichsan, 1994; Valde, 1993 dalam Firdausy, 1997; Prijono, 1996; Raharjo dan Rinakit, 1996; Martius, 1997)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Ekonomi Rumah Tangga Pengrajin

Adapun karakteristik sumberdaya manusia rumah tangga pengrajin anyaman adalah : umumnya berada pada kelompok umur produktif (20-49 tahun), berjenis kelamin perempuan, tingkat pendidikan relatif rendah, jumlah anggota keluarga relatif banyak, mayoritas tidak pernah mendapatkan penguatan SDM melalui pelatihan, tingkat keterampilan relatif

baik, motifs pekerjaan bervariasi (utama dan sampingan), pengalaman berusaha cukup lama, serta status sosial umumnya sebagai warga masyarakat biasa.

Karakteristik Usaha Kerajinan Anyaman sebagai Komoditi Unggulan

Adapun karakteristik usaha kerajinan anyaman dari sisi faktor teknis-produksi memperlihatkan bahwa bahan baku tersedia dalam jumlah yang cukup di tingkat lokal namun terkendala dalam hal bahan pewarna yang harus didatangkan dari luar, tenaga terampil cukup tersedia, kemampuan produksi relatif sedang, penggunaan teknologi yang cukup sederhana, serta kualitas produk yang relatif terbatas. Sedangkan dari sisi faktor ekonomi-manajemen, terlihat bahwa pengrajin memiliki jiwa kewirausahaan yang baik, potensi permintaan yang cukup tinggi, jaringan pemasaran yang luas namun terkendala di tingkat desa dan persaingan yang kurang dari komoditi sejenis, permodalan atau biaya produksi yang masih terbatas, serta dukungan kelembagaan yang kurang responsif.

Pada akhirnya berdasarkan tinjauan karakteristik sumberdaya manusia rumah tangga pengrajin dan karakteristik usaha kerajinan yang dijalankan bermuara pada belum berkembangnya secara ekonomi usaha kerajinan anyaman yang dilakukan masyarakat di Desa Taratak walaupun usaha ini telah dilakukan masyarakat desa sejak turun-temurun. Lebih jauh akan dilakukan analisis kondisi di atas melalui kajian pemberdayaan ekonomi rakyat dalam konteks usaha kerajinan anyaman.

Konsep Lokal tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Konteks Kerajinan Anyaman di Desa Taratak

Analisis konsep lokal tentang pemberdayaan ekonomi rakyat dalam konteks kerajinan anyaman di Desa Taratak ini lebih menekankan kepada aspek kualitatif dengan mengacu kepada konsep dan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Kartasmita (1996) yang menjadi kerangka pemikiran penelitian ini serta didukung dengan beberapa teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh para ahli lainnya. Secara terperinci bagian ini membahas dan menganalisis tentang aspek pemberdayaan sumberdaya produktif dan pemberdayaan kelembagaan.

a. Akses terhadap Sumberdaya Produktif

a.1. Ketidakberdayaan Rumah Tangga Miskin

Secara umum keberadaan mayoritas rumah tangga pengrajin berada pada kondisi kemiskinan yang diperlihatkan dengan banyaknya keterbatasan dalam hal kepemilikan sumberdaya produktif. Keberadaan rumah tangga yang mayoritas berada di pinggiran desa, serta letak desa yang terisolir, tanpa disadari menjadi suatu perangkat bagi kemiskinan masyarakat desa dan rumah tangga pengrajin. Kondisi yang memerangkap rumah tangga ini cenderung memunculkan perangkat lain yang diistilahkan Chambers (1989) dalam Sarman (1997) dengan ketidakberuntungan pada kelompok rumah tangga miskin yang dicirikan dengan terdapatnya kondisi keterbatasan dalam hal kepemilikan asset,

fisik lemah, keterisolasian, kerentanan, dan ketidakberdayaan.

Pada sisi lain, kondisi kemiskinan rumah tangga pengrajin juga dicirikan oleh rumah tempat tinggal mereka yang amat sederhana sebagai wujud dari ketiadaan biaya untuk memperbaikinya. Keterbatasan ini ditambah lagi dengan keterbatasan kepemilikan lahan, bahkan ada yang hanya bekerja sebagai buruh tani, yang menurut Thorbecke (1993) dalam Raharjo dan Rinakit (1996) dikategorikan ke dalam kelompok yang hidupnya paling menderita. Lebih jauh dijelaskan bahwa kelompok ini dengan kepemilikan lahan yang sempit (kecil dari 0,5 ha dan bahkan tidak punya lahan) mengakibatkan mereka hanya mampu memproduksi sedikit hasil pertanian pangan, sehingga pendapatan mereka pun sangat kecil yang bahkan tidak cukup untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Secara lebih terperinci, tidak berkembangnya usaha ekonomi rakyat di Desa Taratak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadikan mereka tidak berdaya selama ini, yakni: *pertama*, status sosial pengrajin yang umumnya rendah (hanya warga masyarakat biasa), sehingga cenderung memposisikan rumah tangga pengrajin pada kondisi ketidakberdayaan. Ini berdampak pada lemahnya posisi tawar-menawar mereka terhadap pembuatan keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh para elite desa menyangkut usaha ekonomi rakyat yang mereka jalankan. Kondisi ini, oleh Moeljarto (1996) dilihat sebagai hubungan antar individu atau lapisan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait (*interlinking factors*), yakni: pendidi-

kan, keterampilan, status sosial, harta, kedudukan, dan jenis kelamin. Faktor yang saling terkait ini pada akhirnya membuat hubungan antar individu dengan dikotomi subjek (elite desa) dengan objek (masyarakat desa). Bentuk relasi sosial yang dicirikan dengan dikotomi subjek dan objek tersebut merupakan relasi yang ingin diperbaiki melalui proses pemberdayaan. Kondisi dikotomi ini, mengakibatkan ketidakberdayaan masyarakat (baca: pengrajin) dalam menghadapi para elite desa (baca: aparat desa dan pengurus lembaga ekonomi desa/-Kopinkra). Kondisi ini membuat para elite desa secara sepihak menentukan para pengrajin yang mengikuti kegiatan pembinaan sumberdaya manusia (pelatihan, penyuluhan, dan pameran). Penuturan salah seorang pengrajin membuktikan fakta tersebut: *"Sebenarnya saya ingin sekali ikut kegiatan pelatihan anyaman yang diadakan di Desa Kubang, namun pengrajin yang ikut ditentukan sepihak oleh pengurus kopinkra. Apabila mempunyai hubungan dekat dan duduk sebagai pengurus, maka akan semakin besar peluang untuk ikut pelatihan"*.

Disini terlihat bahwa pola-pola pembinaan sumberdaya manusia yang tidak kondusif, yakni lebih bersifat nepotisme, rasa suka tidak suka (*like and dislike*), pendekatan kekuasaan, sehingga rasa apriori tumbuh subur di kalangan pengrajin terhadap elite desa, terutama terhadap pengurus kopinkra. Ini dibuktikan dengan temuan lapangan bahwa umumnya para pengrajin apabila menemui kesulitan dalam berproduksi, lebih memilih untuk mencari jalan keluar dengan berdiskusi sesama pengrajin dibandingkan dengan menanyakan

kepada pihak yang berkompeten (aparatus desa atau pengurus kopinkra). Kartasasmita (1996) menyoroti hal ini sebagai kondisi yang ada dalam masyarakat di negara berkembang, dimana pada masyarakat lapis bawah (petani, pengrajin, dll) dianggap diperlukan, namun bukan merupakan kelompok yang menduduki jenjang tinggi dalam status sosial. Rendahnya penghargaan yang diberikan kepada kegiatan ekonomi rumah tangga kerajinan anyaman ini membawa akibat yang sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan dan kemajuan usaha ekonomi rakyat itu sendiri. Dari sisi pendekatan pemberdayaan, kondisi diatas oleh Kartasasmita (1996) dinyatakan sebagai belum adanya kondisi atau iklim yang memungkinkan bagi berkembangnya potensi yang ada pada masyarakat (baca: pengrajin).

Kedua, kecilnya skala usaha yang dilakukan pengrajin sehingga hasil usaha yang diperoleh lebih diprioritaskan dan hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun terdapat sedikit kelebihan usaha, namun itupun digunakan untuk mencicil pinjaman di Kopinkra dan untuk modal pembeli bahan baku bagi produksi berikutnya. Sehingga hampir tidak ada hasil usaha yang bisa di simpan atau di tabung. Akibatnya pengembangan usaha mayoritas pengrajin hampir tidak pernah ada. Tambunan (1995) menekankan kondisi ini sebagai adanya keterbatasan untuk bertahan dengan usaha yang dijalankan. Kecilnya skala usaha menyebabkan tidak adanya sisa penjualan yang bisa dijadikan sebagai modal untuk investasi untuk pengembangan usaha. Penuturan salah seorang pengrajin menggambarkan hal

tersebut: *"Hasil penjualan anyaman ini langsung dibelikan kepada barang kebutuhan keluarga sehari-hari, baik berupa beras, lauk-pauk, gula, dll. Segala kebutuhan keluarga kami carikan dari usaha anyaman ini. Walaupun ada sedikit sisa, itupun habis untuk pembayar angsuran pinjaman koperasi, dan untuk pembeli bahan anyaman minggu berikutnya"*.

Ketiga, ketidakberanian para pengrajin untuk mengambil resiko menjadikan usaha kerajinan anyaman sebagai mata pencaharian utama rumah tangga. Meskipun ada, namun mereka umumnya masih melakukan pekerjaan lain, seperti : kesawah, ke ladang, atau beternak. Pendapat Kuncoro (1997) memperkuat temuan ini, bahwa hal yang banyak ditemui pada industri pedesaan, dimana industri tersebut bukan merupakan sumber penghasilan pokok. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu pada siang hari untuk aktifitas ke sawah atau ke ladang, dan baru pada malam harinya membuat kerajinan anyaman sebagai pekerjaan utama. Kondisi dan iklim usaha yang belum memungkinkan, membuat mereka belum mampu berharap terlalu besar pada usaha kerajinan anyaman sebagai mata pencaharian utama rumah tangga. Kartasasmita (1996) melihat fenomena ini sebagai kondisi yang akan mengakibatkan disalurkan energi kreatif seseorang yang paling terampil dan berpengalaman tidak ke arah kegiatan yang akan meningkatkan kapasitas produksi usaha mereka.

Keempat, rendahnya tingkat pendidikan umumnya para pengrajin (setingkat SD dan SLTP) berdampak pada kurangnya kemampuan pengrajin dalam mengelola usaha. Walaupun

bisa bertahan, namun mereka tidak pernah mendapatkan keuntungan dalam arti yang sebenarnya. Sjafrizal (1997) mengemukakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan berdampak pada kemampuan manajemen yang dimiliki dan yang diterapkan dalam usaha. Pengrajin cenderung apatis dan tidak mampu untuk melakukan berbagai upaya terobosan-terobosan bagi pengembangan usaha. Faktor rendahnya tingkat pendidikan ini juga oleh Moeljarto (1996) dijadikan sebagai salah satu penyebab terjadinya dikotomi antara elite desa dengan masyarakat pengrajin sebagai wujud ketidakberdayaan.

Terobosan untuk menyikapi kendala sumberdaya manusia di tingkat desa dilakukan dengan cara mengenalkan seluk-beluk membuat kerajinan anyaman kepada anak didik tingkat sekolah dasar yang ada di Desa Taratak. Keterampilan membuat kerajinan anyaman dijadikan sebagai mata pelajaran anak didik di sekolah (muatan lokal). Melalui proses ini, diharapkan si anak akan menyadari bagaimana realitas kehidupan ekonomi rumah tangga orang tua mereka. Pranarka dan Moeljarto (1996) menyoroti hal ini sebagai upaya untuk mengarahkan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat pedesaan dengan metode penjelasan realitas sosial di pedesaan, termasuk realitas sosial ketidakberdayaan orangtua si anak sebagai pengrajin. Pada akhirnya pemahaman kondisi ini akan menambah etos kerja dari sebelumnya yang tidak menghargai waktu menjadi etos kerja disiplin dan dinamis.

a.2. Upaya Menyikapi Kondisi Ketidakberdayaan

Dalam upaya menyikapi berbagai kondisi yang kurang memungkinkan bagi pengembangan usaha kerajinan anyaman, maka umumnya rumah tangga pengrajin melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kemampuan dan potensi sumberdaya masing-masing. Dalam hal ini Kartasasmita (1996) menyatakan bahwa setiap individu memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan potensi ini pada akhirnya bisa dikategorikan rumah tangga pengrajin anyaman ke dalam dua kategori utama, yakni:

Pertama, kelompok rumah tangga pengrajin yang pasrah saja menerima kondisi rumah tangga dan usaha yang telah berlangsung selama ini. Mereka hanya melakukan aktifitas usaha kerajinan anyaman sebagai penunjuk "identitas diri" sebagai warga desa (*bukan orang Taratak namanya kalau tidak bisa menganyam*) dan tidak banyak berharap dari usaha ini apalagi menjadikannya sebagai sandaran utama rumah tangga. Sarman (1997) mengelompokkan rumah tangga ini ke dalam *kelompok konservatif*, yang cenderung memahami kemiskinan sebagai sesuatu kondisi yang harus diterima sebagai budaya kemiskinan. Kelompok ini dicirikan dengan rumah tangga yang umumnya tinggal di pinggir desa, berusia relatif tua, berpendidikan rendah, dan keterampilan kurang. Hari-harinya habis bekerja di sawah atau di ladang orang lain sehingga kegiatan kerajinan anyaman hanya sebagai sampingan. Mereka berusaha keras untuk mempertahankan hidup dengan segala keterbatasan yang dimiliki, namun hasil yang diperoleh hanya cukup untuk pemenuhan

kebutuhan hidup minimal. Akibatnya tidak ada kemungkinan untuk perkembangan usaha yang diharapkan dari mereka yang rata-rata beromzet kecil.

Kedua, kelompok rumah tangga pengrajin yang cukup kreatif dalam berusaha dimana mereka tidak begitu saja menerima kondisi yang sudah ada. Pendidikan yang cukup tinggi membuat mereka berusaha mencari terobosan dalam pengembangan usaha kerajina anyaman, seperti dengan jalan memasarkan produknya sendiri ke luar desa atau mencari alternatif diversifikasi produk. Kelompok rumah tangga ini umumnya tinggal dekat dengan pusat desa, termasuk kelompok berusia muda, haus informasi, dan cenderung kritis dalam menyikapi segala kondisi yang ada, terutama yang menyangkut usaha rumah tangga yang dilakukan. Kelompok ini menurut Sarman (1997), termasuk ke dalam kelompok yang diistilahkan dengan *kelompok liberal*, yang mampu menyiasati kondisi lingkungan sosial ekonomi, sehingga berpeluang untuk memperbaiki budaya kemiskinan. Mereka tidak ingin generasi keluarganya seperti mereka dan berusaha menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di luar desa dengan biaya dari pinjaman Kopinkra yang dicicil dengan hasil penjualan anyaman. Kelompok yang memiliki omzet dari sedang sampai tinggi ini diduga akan dapat berkembang lebih baik apabila mereka memperoleh akses terhadap berbagai sumber kemajuan usaha kerajinan anyaman, seperti: modal, teknologi, informasi, pasar, dan lain-lain, sehingga dapat memperoleh surplus usaha yang lebih besar.

Kelompok kedua ini, lebih jauh menurut teori sosiologi Kluckhohn dan Stroedbeck (1967) dalam Ichsan (1994) dapat didefinisikan sebagai suatu ciri dari ekonomi rumah tangga yang tergolong ke dalam masyarakat transisi dengan karakteristik sebagai berikut: (1) kecenderungan untuk memandang bahwa hakekat hidup manusia itu buruk tapi wajib berikhtiar ke arah kebaikan. Hal ini tergambar dari upaya pengrajin untuk memanfaatkan waktu siang dan malam dengan efisien guna menambah pendapatan rumah tangga, (2) bahwa tujuan akhir dari semua kerja adalah kehormatan dan kedudukan yang diperlihatkan dengan upaya kerja keras pengrajin untuk meningkatkan taraf hidup keluarga, (3) berorientasi pada masa lampau dan masa kini yang ditunjukkan dengan usaha untuk menyelaraskan keterampilan yang dikuasai turun-temurun dengan menyerap inovasi, (4) cenderung menyelaraskan diri dengan lingkungan alamnya yang tergambar dari kreatifitas pengrajin dalam berusaha pada saat musim kemarau, serta (5) cenderung merasa tergantung pada tokoh atasan yang berpangkat. Ini terefleksi dari sikap pasrah atas kebijakan pada elite desa menyangkut usaha kerajinan anyaman yang dilakukan pengrajin.

Namun secara umum, kedua kategori rumah tangga pengrajin ini belum mampu mengakses berbagai aspek pengembangan usaha, sehingga pengrajin berada ada kondisi ketidakberdayaan yang secara struktural menyulitkan terjadinya kemajuan usaha ekonomi rumah tangga yang mereka lakukan selama ini. Kondisi ini disebabkan karena belum adanya upaya yang terarah untuk memperluas akses pengrajin terhadap aspek-aspek

kemajuan usaha. Kartasasmita (1996) menekankan hal ini dengan upaya untuk memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai sisi kedua dari pendekatan pemberdayaan masyarakat. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang menyangkut aspek-aspek penguatan potensi ini meliputi:

Pertama, keterbatasan akses terhadap permodalan usaha. Struktur permodalan usaha kerajinan anyaman selama ini hanya berasal dari modal sendiri, pinjaman dari pedagang pengumpul, atau pinjaman dari Kopinkra. Kendala permodalan, terutama belum adanya akses terhadap modal perbankan mengakibatkan usaha ini hanya berupa usaha skala kecil yang marginal sebagai cerminan atau sosok dari ekonomi rakyat. Marginalisasi usaha ini terutama dalam hal kemampuan mengakses sumberdaya yang semestinya dapat meningkatkan nilai tambah usaha. Lebih jauh Firdausy (1997) menyatakan bahwa usaha ekonomi rakyat pada umumnya belum terjamah oleh institusi perkreditan yang dikelola sektor perbankan. Alasannya seringkali karena adanya berbagai hambatan struktural dan psikologis atas pembiayaan usaha kecil, misalnya persepsi inferior tentang potensi usaha kecil, khususnya di pedesaan.

Kecilnya peluang untuk untuk mengakses modal perbankan menjadikan kemungkinan kearah pengembangan usaha sangat terbatas, yang oleh Valde (1993) dalam Firdausy (1997) disimpulkan sebagai suatu keterbatasan struktural masyarakat sebagai salah satu yang menyebabkan kemiskinan. Lebih jauh Kartasasmita (1996) menyoroti permasalahan akses terhadap permodalan sebagai upaya transformasi struktural. Tersedianya

kredit yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat sehingga dapat meningkatkan produksi, pendapatan, dan menciptakan surplus yang dapat digunakan untuk membayar kembali kreditnya dan melakukan pemupukan modal. Pada sisi yang lain, persyaratan perbankan yang cukup rumit bagi masyarakat lapis bawah (baca: miskin), cenderung menyebabkan kurangnya interaksi antara lembaga keuangan yang melayani pemberian kredit dengan masyarakat kecil yang membutuhkannya. Kamaluddin (1990) menyatakan kondisi ini dengan belum dapat dijangkaunya kegiatan usaha masyarakat yang tergolong lemah oleh fasilitas permodalan. Hal ini berdampak pada rentannya posisi ekonomi rakyat dan pelakunya (Firdausy, 1997).

Kedua, keterbatasan akses terhadap pasar. Walaupun usaha kerajinan anyaman ini telah memiliki jaringan pemasaran yang luas namun kondisi riil pemasaran di tingkat desa menunjukkan ketidakberdayaan pengrajin. Transaksi pemasaran lebih didominasi oleh pedagang pengumpul yang cenderung merugikan pengrajin. Kuatnya persatuan di antara pedagang pengumpul, akhirnya menempatkan pengrajin pada posisi yang lemah dan tidak ada alternatif selain menjual kepada para pedagang pengumpul. Ilustrasi berikut melalui wawancara dengan salah seorang pengrajin dapat menjelaskan fenomena ini: "*Kami tidak bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi mereka (toke). Kalau kami agak bertahan harga terhadap tawaran seorang toke, maka mereka enggan menanggapi, begitu pula toke yang lain-pun akan bersikap sama. Akhirnya tidak ada jalan lain selain menerima tawaran mereka.*"

Anyaman ini harus terjual hari itu juga, karena uangnya dibutuhkan untuk pembeli kebutuhan keluarga". Realitas ini menunjukkan lemahnya posisi tawar menawar pengrajin dalam hal akses terhadap pasar sebagai wujud dari ketidakberdayaan. Priyono (1996) cenderung memahami kondisi ini sebagai wujud ketidakberdayaan rakyat, sehingga melemahkan posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah (baca: miskin) terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala sektor kehidupan.

Ketiga, keterbatasan akses terhadap sarana prasarana pendukung. Belum tersedianya prasarana jalan desa dan sarana transportasi desa yang memadai serta keterpencilan letak desa, menambah keterpurukan dan ketidakberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan usaha. Ini berkaitan erat dengan tidak adanya alternatif umumnya pengrajin selain memasarkan produknya di dalam desa saja, karena untuk memasarkan keluar desa harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Pemberdayaan dalam hal ini adalah upaya untuk menyediakan berbagai fasilitas prasarana jalan dan sarana transportasi yang memadai. Kartasasmita (1996) menekankan bahwa proses pemberdayaan ekonomi rakyat tak akan cukup bermanfaat bagi masyarakat apabila mereka hidup terpencil atau tidak dapat memanfaatkan secara optimal sumberdaya yang ada di wilayahnya. Untuk itu, dibutuhkan dukungan prasarana dan sarana yang memadai.

b. Akses terhadap Kelembagaan

Secara umum, tidak berkembangnya usaha ekonomi rakyat kerajinan anyaman disebabkan oleh

akumulasi berbagai persoalan yang terjadi pada tataran kelembagaan, dari tingkat desa (lembaga pemerintah desa dan lembaga ekonomi desa) dan tingkat instansi pemerintah/swasta (Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perbankan, dll) melalui berbagai kebijakan/peraturan dan program pembinaan usaha masyarakat. Kompleksitas persoalan pada tataran kelembagaan ini berakibat pada ketidakberdayaan masyarakat, khususnya pengrajin anyaman.

Pada tingkat desa, keberadaan lembaga pemerintahan desa dan aparatnya belum mampu memberikan perlindungan terhadap posisi pengrajin yang lemah dalam bertransaksi dengan pedagang pengumpul. Padahal sebagai lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan di tingkat desa, para pengrajin sangat mengharapkan adanya aturan main yang jelas terkait harga produk anyaman yang saling menguntungkan antara pengrajin dengan pedagang pengumpul. Selama ini para pedagang pengumpul hanya menentukan secara sepihak harga produk kerajinan anyaman yang dihasilkan pengrajin. Terjadinya eksploitasi secara sepihak ini semakin menambah ketidakberdayaan para pengrajin selain berbagai faktor lainnya. Upaya keluar dari kondisi ini menurut Kartasasmita (1996) sebagai upaya pemberdayaan dalam arti melindungi masyarakat yang lemah melalui berbagai peraturan yang jelas-jelas melindungi masyarakat yang lemah.

Begitu pula dengan lembaga ekonomi desa (Kopinkra) yang belum berperan dalam menyahuti kebutuhan pengrajin. Selama ini kegiatan Kopinkra hanya bergerak dalam usaha

simpan pinjam, padahal sebagai wadah berhimpunnya pengrajin, seharusnya fungsinya juga sebagai lembaga penyedia berbagai sarana produksi serta penampung hasil produksi para pengrajin. Raharjo dan Rinakit (1996) melihat bahwa kurang berfungsinya lembaga koperasi di pedesaan merupakan salah satu bukti terjadinya *kemandekan birokrasi* sehingga berakibat pada ketidakberdayaan masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya dukungan yang oleh Martius (1997) diistilahkan dengan corak kelembagaan yang akomodatif dan dapat menyahuti berbagai kebutuhan anggotanya dalam upaya pemanfaatan sumberdaya untuk pemberdayaan ekonomi rakyat.

Sementara pada tataran instansi pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan program dan pembinaan usaha, juga terdapat beberapa kendala yang berdampak pada kurang maksimalnya upaya pemberdayaan ekonomi rakyat yang dijalankan. Apabila ditelusuri lebih jauh, kendala itu meliputi:

Pertama, kurang responsifnya instansi terkait di tingkat atas dalam pembuatan kebijakan dan program yang dapat menyahuti kebutuhan masyarakat di tingkat bawah. Akibatnya program-program pembinaan yang dijalankan kurang menemui sasaran dengan hasil yang optimal karena pada tataran pengrajin merasa tidak membutuhkannya. Pemaparan salah seorang pengrajin membuktikan kondisi yang demikian: *"Kami diberikan pelatihan tentang cara-cara mewarnai anyaman di Desa Kubang, padahal keterampilan itu telah kami kuasai dengan baik sehingga tidak begitu dibutuhkan lagi. Yang sangat dibutuhkan kami sekarang adalah bagaimana produk anyaman ini*

memiliki pasaran yang jelas sehingga kami bisa berproduksi secara rutin".

Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun program telah disusun berdasarkan permasalahan yang muncul dari bawah, namun pemahaman dan dinamikanya di tingkat atas (baca: pemerintah) yang terwujud melalui pelaksanaan program pembinaan, belum tentu sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah. Prijono (1996) mengisyaratkan bahwa secara implisit, proses pemberdayaan rakyat bermakna adanya inisiatif yang berasal dari rakyat dan peranan pemerintah menampung serta mempertimbangkan keluhan rakyat. Aparat pemerintah harus memiliki kepekaan dan kemampuan untuk dapat merespon inisiatif dan keluhan masyarakat di tingkat bawah.

Kedua, belum adanya keterpaduan yang solid antar instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi rakyat. Walaupun temuan lapangan menunjukkan bahwa adanya keterpaduan dalam pelaksanaan, namun itu hanya sebatas memenuhi target tanpa adanya upaya yang lebih terarah dan matang untuk merealisasikannya. Sehingga kegiatan penyuluhan pada satu sisi menjadi ajang bagi instansi terkait untuk menyampaikan program instansinya, dan di sisi lain, masyarakat hanya sebatas memberikan respon di dalam forum kegiatan penyuluhan tanpa adanya tindakan nyata dan berkelanjutan setelah keluar dari forum itu. Ilustrasi melalui wawancara dengan salah satu instansi terkait, yakni Bank Rakyat Indonesia Cabang Payakumbuh sebagai lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi rakyat dengan fokus pembinaan pada aspek permo-

dalam usaha membuktikan sinyalemen tersebut: *"Adapun salah satu kendala dari pihak kami selama melakukan program perkreditan bagi pelaku industri kecil pedesaan yang tanpa agunan adalah lemahnya kontrol dan monitoring dari Dinas terkait dalam mengawasi penggunaan kredit. Sehingga umumnya kredit tidak tepat sasaran dan banyak digunakan untuk kegiatan non produktif di luar usaha mereka, yang akhirnya berdampak pada kemacetan pengembalian kredit"*.

Sistem monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan program sangat berkaitan erat dengan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi rakyat, dan ini menurut Sjafrizal (1997) lebih jauh dijelaskan bahwa keterpaduan dalam pelaksanaan program memerlukan sistem monitoring yang sistematis dan terarah. Ada indikasi bahwa sistem monitoring yang telah digunakan masih lemah dan belum mempunyai sistem yang jelas dan sistematis.

Untuk keluar dari kendala ini, pada program pemberdayaan ekonomi rakyat sebenarnya telah dilaksanakan kegiatan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi antar instansi terkait, namun itu diduga Sjafrizal (1997) kurang menemui sasaran. Walaupun rapat monitoring secara berkala sering diadakan, akan tetapi tujuan utamanya hanya untuk menyelesaikan masalah pelaksanaan program. Sementara monitoring yang secara konkret menuju ke arah keterpaduan pelaksanaan antar program-program terkait masih belum dapat dilaksanakan karena sangat banyaknya jumlah program yang dimonitor.

c. Keterbatasan Konsep Lokal Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Konsep lokal pemberdayaan ekonomi rakyat mempunyai beberapa keterbatasan, baik ditinjau dari sisi sampel maupun dari sisi analisis. Hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi subjek dan tujuan penelitian ini. Secara umum keterbatasan itu meliputi: *pertama*, konsep ini lebih memfokuskan kajiannya pada aspek deskriptif- kualitatif dengan konsep utama berupa pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Kartasmita (1996) yang menjadi salah satu paradigma dalam pembangunan pedesaan; *kedua*, penggunaan konsep lokal tentang pemberdayaan ekonomi rakyat ini sangat tergantung pada kondisi lokal dan tidak bisa digeneralisir untuk lokasi atau tingkatan yang lebih luas kecuali pada lingkungan sosial ekonomi dan budaya yang homogen dengan lokasi penelitian ini; *ketiga*, walaupun studi ini sudah berusaha mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, tapi tidak semua data dan informasi yang diperoleh bisa dirangkum secara rinci dan mendalam karena keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, baik menyangkut lamanya studi maupun keterbatasan sumberdaya.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Karakteristik ekonomi rumah tangga mayoritas pengrajin anyaman di Desa Taratak berada pada kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan yang diperlihatkan dengan banyaknya keterbatasan dalam hal kepemilikan terhadap

aspek sumberdaya manusia produktif. Adapun keterbatasan itu meliputi: rendahnya status sosial, rendahnya tingkat pendidikan, dan ketidakberanian mengambil resiko untuk menjadikan usaha kerajinan anyaman sebagai pekerjaan utama rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan usaha kerajinan anyaman yang dilakukan rumah tangga pengrajin masih tergolong berskala kecil yang hanya diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari saja.

- b. Usaha kerajinan anyaman sebagai komoditi unggulan di Desa Taratak selama ini belum mampu berkembang karena disebabkan rendahnya akses terhadap sumberdaya ekonomi produktif yang meliputi beberapa aspek, yakni: *pertama*, rendahnya akses terhadap permodalan dan struktur permodalan yang masih skala kecil, sehingga mengakibatkan terjadinya marginalisasi usaha dan belum adanya peluang untuk mengakses permodalan dari perbankan menjadikan kemungkinan ke arah pengembangan usaha terbatas; *kedua*, terbatasnya akses terhadap pasar, dimana pemasaran produk kerajinan anyaman didominasi oleh pedagang pengumpul (*toke*) yang cenderung merugikan pengrajin dalam bertransaksi, sehingga menyulitkan perkembangan usaha; *ketiga*, keterbatasan akses terhadap sarana prasarana pendukung, dimana belum tersedianya prasarana jalan antar desa dan sarana transportasi yang memadai, serta ditambah dengan keterisoliran letak desa menambah

ketidakberdayaan pengrajin dalam pengembangan usaha

- c. Strategi dan program yang telah dijalankan pemerintah selama ini belum berperan dalam memberdayakan ekonomi rakyat (usaha kerajinan anyaman) di Desa Taratak karena disebabkan oleh akumulasi persoalan yang terdapat pada tataran kelembagaan yang terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi rakyat

Implikasi Teori

- a. Konsep lokal tentang pemberdayaan ekonomi rakyat ini memiliki spesifikasi khusus, karena bisa dialokasikan sebagai konsep dasar untuk menyusun program pemberdayaan ekonomi rakyat yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan di pedesaan. Dalam menyusun program untuk pengentasan kemiskinan di pedesaan diperlukan adanya berbagai batasan, sehingga tidak seluruh masyarakat memperoleh penekanan yang sama dari program. Pada posisi inilah konsep ini berperan, dimana keheterogenan karakteristik rumah tangga miskin dan kelompok masyarakat miskin di pedesaan, sangat menentukan tipologi program pemberdayaan ekonomi rakyat pada khususnya dan program pengentasan kemiskinan pada umumnya yang sesuai dan tepat.
- b. Pemberdayaan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara terpadu melalui pendekatan tiga sisi, yakni : (1) menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, (2) upaya untuk memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masya-

rakat, serta (3) upaya untuk melindungi golongan masyarakat yang lemah dan miskin melalui berbagai peraturan dan anggaran yang pro rakyat miskin (*pro-poor budget*)

- c. Perlu semakin mengurangi peran pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan pedesaan, dan pada sisi inilah mengemuka terminologi pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dari pembangunan pedesaan itu sendiri. Peran pemerintah hanya sebatas menjaga iklim yang mendukung (kondusif) terhadap aktifitas potensi sumberdaya lokal dan memberikan perlindungan dalam bentuk peraturan yang melindungi golongan masyarakat yang lemah dan miskin dari eksploitasi golongan yang memiliki sumberdaya yang kuat.

Implikasi Praktis

- a. Berdasarkan analisis karakteristik sumberdaya manusia rumah tangga pengrajin anyaman, maka disarankan agar dalam penyusunan dan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi rakyat, adanya suatu kajian komprehensif dan mendalam tentang aspek sumberdaya manusia. Ini diperlukan karena tidak seluruh masyarakat membutuhkan program dengan penekanan yang sama. Dengan memahami karakteristik sumberdaya manusia rumah tangga, maka pada akhirnya akan dapat disusun program yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga miskin di pedesaan.

- b. Berdasarkan analisis karakteristik usaha ekonomi rakyat kerajinan anyaman, maka disarankan untuk melakukan upaya yang terpadu dalam memberikan akses yang seluas-luasnya bagi pengrajin terhadap sumberdaya ekonomi produktif, yakni : *pertama*, penetrasi modal melalui pemanfaatan fasilitas modal pemerintah dan perbankan, serta melalui kerjasama kemitraan dengan BUMN/BUMD/Swasta; *kedua*, memfungsikan Koperasi Industri Kerajinan (Kopinkra) sebagai wadah penampung produk pengrajin untuk mewujudkan lembaga pemasaran bersama dan terpadu, sehingga Kopinkra sebagai perusahaan inti dalam bernegosiasi dan bertransaksi akan berfungsi efektif sebagai koordinator dalam kegiatan pemasaran, promosi, penetapan kualitas, dan penetapan harga; *ketiga*, pembenahan dan rehabilitasi berbagai sarana prasarana pendukung bagi pengembangan usaha ekonomi rakyat (pasar desa, jalan desa, transportasi desa, dll)
 - c. Berdasarkan analisis terhadap kelembagaan yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, maka disarankan agar ditumbuhkan dan diperkuat kepedulian dan kerjasama yang intensif di antara lembaga yang terlibat dalam memfasilitasi kebutuhan pengrajin untuk pengembangan usaha rumah tangga mereka. Hal ini meliputi : *pertama*, adanya aturan-aturan yang melindungi pengrajin dari eksploitasi para pedagang pengumpul/toke (kaum kapitalis desa);
-

kedua, perwujudan peran Kopinkra sebagai wadah yang benar-benar berpihak pada pengrajin; *ketiga*, perlunya kajian mendalam dari instansi pelaksana dan pembina program terhadap karakteristik masyarakat sebelum suatu program disusun dan dilaksanakan.

Agenda Penelitian ke Depan

Penelitian ini pada intinya hanya mengkaji tentang pemberdayaan ekonomi rakyat pada skala mikro (yakni: desa) dengan analisis berdimensi luas menyangkut seluruh aspek yang berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat. Sejatinya, pemberdayaan ekonomi rakyat selain berdimensi ekonomi, juga berdimensi sosial, politik, dan budaya. Berangkat dari temuan penelitian ini, ada beberapa agenda penelitian ke depan yang perlu dicermati dan dilakukan oleh pihak yang berminat mendalami isu pemberdayaan dan kemiskinan, yakni:

- a. Perlu diteliti bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat/ekonomi rakyat tidak terbatasnya hanya pada skala kecil (desa/nagari), melainkan pada skala yang lebih luas, baik secara administratif (pembangunan kecamatan, misalnya) maupun secara fungsional (pembangunan wilayah/ kawasan)
- b. Perlu diteliti pemberdayaan masyarakat/ekonomi rakyat dengan penekanan studi pada kajian kelembagaan, baik pengelolaan program, mekanisme program, maupun penumbuhan kembali (revitalisasi) keberfungsian lembaga di

tingkat lokal. Ini terkait dengan penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

- c. Perlu dikaji tentang pemberdayaan masyarakat/ekonomi rakyat pada dua desa/nagari yang berbeda dalam status (miskin dan maju) dengan mayoritas masyarakatnya bergerak pada komoditi unggulan yang sejenis. Pada akhirnya diperlukan adanya perbedaan dalam konsep, strategi, pendekatan, dan program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.
- d. Perlu dikaji pemberdayaan masyarakat/ekonomi rakyat pada desa/nagari yang memiliki komoditi unggulan selain sub sektor industri kecil, seperti: pada sektor pertanian (tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan), serta sektor lainnya (seperti pariwisata, dll)

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revrison. 1997. Tantangan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Artikel Majalah Islam Media Dakwah Edisi Desember 2007
- Firdausy, Carunia Mulya. 1997. Pengembangan Potensi Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Biak Numfor Irian Jaya. Jurnal Analisis CSIS Tahun XXVI No. 1 (Januari – Februari 1997)
- Ichsan. 1994. Strategi Pembangunan Pedesaan pada PJPT II. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial No. 1 Januari 1994
- Juoro, Umar. 1998. Aspek Pengembangan Sumberdaya Manusia di Pedesaan.

- Artikel Harian Media Indonesia Edisi Rabu 8 April 1998
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Pustaka Cidesindo. Jakarta
- Kuncoro. 1997. Pemberdayaan Kelompok Kerja. *Jurnal Ilmiah CSIS Edisi 25 Tahun*. Penerbit CSIS. Jakarta
- Martius, Endry. 1997. Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Makalah Diskusi Ilmiah Agama PPS Universitas Andalas tanggal 27 November 1997
- Moeljarto, Vindhyaandika. 1996. Pemberdayaan Kelompok Miskin melalui Program IDT. *Jurnal Ilmiah CSIS Edisi 25 Tahun*. Penerbit CSIS. Jakarta
- Nugroho, Heru. 1997. Institusi Mediasi sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat Lapis Bawah. *Jurnal Analisis CSIS Tahun XXVI No 1 (Januari – Februari 1997)*
- Pranarka dan V. Moeljarto. 1996. Pemberdayaan (Empowerment). *Jurnal Ilmiah CSIS Edisi 25 Tahun*. Penerbit CSIS. Jakarta
- Januari 1997
- Prijono, Onny. 1996. Organisasi Non Pemerintah (NGO's): Peran dan Pembedayaannya. *Jurnal Ilmiah CSIS Edisi 25 Tahun*. Penerbit CSIS. Jakarta
- Prijono, O dan AW. Pranarka. 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi. *Jurnal Ilmiah CSIS Edisi 25 Tahun*. Penerbit CSIS. Jakarta
- Raharjo dan Rinakit. 1996. Pemberdayaan Masyarakat Petani. *Jurnal Ilmiah CSIS Edisi 25 Tahun*. Penerbit CSIS. Jakarta
- Sarman. 1997. Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Pelajaran dari Program IDT). *Jurnal PRISMA Edisi 1 Januari 1997*
- Sjafrizal, dkk. 1997. Analisis Komoditi Andalan Propinsi Sumatera Barat. Hasil Penelitian Tim Pokja Ristek Dewan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Industri (DIPTI) Sumatera Barat
- Tambunan, Tulus. 1995. Pola Pembangunan Ekonomi di Pedesaan. *Artikel Ilmiah PRISMA Edisi 1*
-

PROGRAM PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT TANAMAN TERPADU DALAM RANGKA MENUJU PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Vonny Indah Mutiara

Abstract: *The term of sustainable development has been popular since the Brundtland Report established in 1987. Since then, environmental issue awareness increased among countries and world organizations. Moreover, the issues of maintaining sustainable development in agriculture sector have come to surface in South Asia. These issues become more significant because Asian societies mainly based on the agriculture sector. Numerous agricultural scientists agree that modern agriculture confronts an environmental crisis. Over the years, recognizing the limitations of pesticides technology, led to the formulation of the concept of Integrated Pest Management (IPM). IPM program was introduced by FAO in mid 1960s as the preferred pest control strategy. Realizing the environmental impact of using pesticides, the Indonesian government waived subsidy for chemical pesticides in 1989 and at the same time IPM program was introduced in Indonesia. Using Java in Indonesia as a case study, this essay evaluates the effectiveness of the implementation of IPM in paddy field in order to achieve sustainable agriculture development. Learning from the successful application of IPM program, it is hoped that IPM can be one of the components of agricultural development strategy in Indonesia.*

Key word: Integrated Pest Management, Indonesia, sustainable agriculture development

PENDAHULUAN

Istilah pembangunan berkelanjutan telah dikenal sejak diterbitkannya 'Brutland Report' pada tahun 1987. Sejak saat itu, negara-negara dan organisasi-organisasi dunia makin meningkatkan kepedulian mereka tentang masalah lingkungan. Organisasi-organisasi dunia tersebut berusaha untuk menemukan suatu sistem manajemen yang tepat dalam menjaga dampak lingkungan yang terjadi atas suatu proyek pembangunan. Komisi dunia bidang pembangunan dan lingkungan

(1987) menyatakan bahwa untuk membuat suatu strategi nasional dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan suatu evaluasi terhadap keadaan ekonomi dan ekologi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.

Definisi pembangunan berkelanjutan yang dinyatakan oleh Komisi Brutland pada tahun 1987 adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi tetap menjaga kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi

Vonny Indah Mutiara adalah Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas

kebutuhannya. Pembangunan berkelanjutan harus mampu mencapai standar hidup yang layak, mampu menjamin keberlanjutan ketersediaan sumberdaya alam dan mampu meminimalkan dampak lingkungan jangka panjang. Tetapi pada kenyataannya, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Diperlukan komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan ketersediaan sumberdaya alam.

Topik mengenai pembangunan berkelanjutan di bidang pertanian telah lama muncul di Asia Tenggara. Topik ini menjadi sangat signifikan karena masyarakat Asia pada dasarnya berbasis pertanian. Altieri (1998) menyatakan bahwa hubungan ekologi dan pertanian sering putus karena prinsip ekologi telah diabaikan. Banyak para ahli pertanian yang setuju bahwa pertanian modern menghadapi krisis lingkungan. Dewasa ini, dengan makin banyaknya jumlah petani yang secara tidak langsung berhubungan dengan ekonomi internasional, penggunaan pupuk alam telah hilang seiring dengan berkembangnya penggunaan pestisida dan pupuk buatan lainnya. Akibatnya, ekosistem pada bidang pertanian bergantung kepada pasokan pupuk berbahan kimia yang tinggi.

Di awal tahun 70an, penggunaan pestisida dianjurkan guna meningkatkan jumlah produksi. Keadaan ini semakin parah dengan adanya gerakan Revolusi Hijau yang dipromosikan di Asia. Organisasi dunia bidang Pangan dan Pertanian (FAO) (2005) menyatakan bahwa dalam masa revolusi hijau, pestisida dianggap sebagai bagian yang

paling penting dalam intensifikasi tanaman di negara berkembang. Akibatnya, petani mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pestisida dalam mengelola tanamannya. Conway (2001) menyatakan bahwa revolusi hijau telah meletakkan produktifitas yang tinggi sebagai indikator keberhasilannya. Ketergantungan yang terlalu lama terhadap pestisida akan membawa dampak yang buruk terhadap lingkungan (Irham, Ohgam Takada dan Sugiura, 2003).

Budianto (2003) menegaskan bahwa penurunan produksi padi dan gandum merupakan akibat dari penggunaan pupuk kimia buatan secara terus menerus yang mengakibatkan berkurangnya kesuburan tanah. Setelah beberapa tahun berjalan dan disadari bahwa terbatasnya teknologi penggunaan pestisida, maka muncullah konsep Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Terpadu. Program ini diperkenalkan pertama kali oleh FAO pada pertengahan tahun 60an sebagai suatu strategi dalam mengatasi hama penyakit tanaman. Pemerintah Indonesia juga telah menyadari dampak lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan pestisida. Untuk itu, pemerintah Indonesia menghapuskan subsidi pestisida yang berbahan baku kimia pada tahun 1989. Pada saat yang sama, program Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Terpadu dilaksanakan di Indonesia (Irham, *et al*, 2003).

Tulisan ini mengevaluasi keefektifan pelaksanaan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Terpadu pada tanaman padi dalam rangka mencapai pembangunan pertanian

berkelanjutan di Indonesia. Diharapkan dari kesuksesan program ini, maka program ini dapat menjadi salah satu komponen dalam strategi pembangunan pertanian di Indonesia.

Tulisan ini disusun dalam empat bagian. Bagian pertama menjelaskan keunggulan dari proses program Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Terpadu. Bagian kedua mendiskusikan pelaksanaan program ini di Indonesia. Bagian ketiga membahas kesuksesan pelaksanaan program ini di Indonesia. Bagian terakhir dari tulisan ini mendiskusikan bagaimana program ini bisa menjadi suatu alat dalam mencapai pembangunan pertanian berkelanjutan.

PROGRAM PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT TANAMAN TERPADU

Berdasarkan definisi dari FAO (2005), Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Terpadu merupakan integrasi dari sejumlah teknik yang ada dalam mengatasi masalah hama penyakit tanaman yang menghambat pertumbuhan populasi hama penyakit tanaman dan menjaga pestisida dan intervensi lainnya yang menguntungkan secara ekonomi dan aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungannya. FAO juga menegaskan bahwa program Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Terpadu memungkinkan petani untuk mengawasi dan mengontrol hama penyakit tanaman pada ladang mereka dan menjaga penggunaan pestisida yang berbahaya pada tingkat yang paling minimum. Dengan mengimplementasikan Pengendalian Hama

Penyakit Tanaman Terpadu secara benar, maka diharapkan akan muncul mekanisme kontrol hama penyakit tanaman secara alami. Pada akhirnya akan dicapai pertumbuhan tanaman yang sehat.

Bank Dunia (2005) menyatakan bahwa Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Terpadu haruslah berdasarkan, baik secara *single* maupun kombinasi, dari penggunaan : (1) *Cultural control*, yaitu pertumbuhan dari varietas tanaman yang sehat dan genetik; (2) *Host plant resistance*, yaitu penggunaan varietas yang tahan terhadap hama penyakit; (3) *Biological control*, yaitu merangsang pertumbuhan musuh hama penyakit alami; dan (4) *Chemical control*, yaitu penggunaan pestisida yang telah diseleksi sebagai alternatif terakhir ketika jumlah hama penyakit tanaman meningkat dalam jumlah yang sangat besar.

Dalam pelaksanaan program Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Terpadu pada tanaman padi sawah, program ini pada dasarnya berbasis pada pemahaman tentang ekologi tanaman padi sawah. Ketika para petani pergi ke sawah, mereka didorong untuk (1) mengamati bagaimana tanaman, hama penyakit, predator dan pestisida berinteraksi satu sama lainnya; (2) mengamati dan memonitor sawah mereka selama musim tanam; dan (3) menggunakan pengetahuan dan pengalaman mereka untuk memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan (Global education, 2005). Petani bertanggung jawab untuk menganalisa masalah hama penyakit tanaman dan berpartisipasi

dalam proses pemecahan masalah-masalah tersebut.

Tetapi tidak hanya petani yang harus terlibat dalam pelaksanaan program Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Terpadu ini. FAO (2005) menegaskan bahwa tidak hanya petani yang terlibat dalam pelaksanaan program Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Terpadu, tetapi seluruh staf lapangan yang berasal dari pusat maupun daerah, dan juga lembaga non pemerintahan lainnya, guna meningkatkan kepedulian lingkungan dan keyakinan petani. Bank Dunia (2005) juga menyatakan bahwa program Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Terpadu harus melibatkan sektor publik (seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi) dan mengadakan penelitian yang lebih responsif terhadap kebutuhan petani.

PROGRAM PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT TANAMAN TERPADU DI INDONESIA

Pada akhir tahun 70an, Indonesia merupakan negara pengimpor beras terbesar. Kenaikan permintaan akan beras membuat pemerintah Indonesia berinvestasi pada produksi beras yaitu dengan cara meningkatkan daerah produksi dengan sistem irigasi, memberikan subsidi lebih dari 85 persen untuk pupuk dan insektisida, dan mengorganisir kualitas produksi bibit. Namun pada akhirnya disadari bahwa pestisida yang mengandung bahan kimia telah membunuh predator tetapi tidak mempengaruhi *“the brown plant hopper”* (Global education, 2005). Menurut FAO (2005), sebuah studi di

Indonesia memperlihatkan 21 persen dari pelaksanaan penyemprotan pestisida telah mengakibatkan lebih dari tiga symptom yang berhubungan dengan racun pestisida. Lebih lanjut, ditemukan 48 persen petani mempunyai pestisida di rumah mereka. Keadaan ini semakin buruk dengan disimpannya bahan kimia pestisida tersebut di tempat yang mudah terjangkau oleh anak-anak.

Menyadari keadaan yang semakin buruk ini, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden tahun 1986 yang melarang penggunaan 57 macam pestisida pada tanaman padi dan pemotongan subsidi pupuk. Penghentian subsidi pupuk telah menyelamatkan pemerintah sekitar US\$120 juta per tahun (FAO, 1998). Hal yang sangat penting dari Instruksi Presiden tersebut yaitu para ahli telah menunjukkan bahwa penggunaan pestisida yang berlebihan telah mengakibatkan munculnya *“brown plant hopper”*, yang merupakan musuh petani yang paling berbahaya. Untuk itu pemerintah Indonesia melaksanakan program Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Terpadu ini sebagai suatu program nasional sebagaimana yang dianjurkan oleh FAO. FAO *inter-country program* telah mendukung pelaksanaan program Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Terpadu di Indonesia. FAO juga mendukung pengembangan dan implementasi program ini di Asia Selatan dan Asia Tenggara.

Kunci keberhasilan dari program Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Terpadu ini adalah dengan terbentuknya sekolah lapa-

ngan untuk petani padi di Indonesia, yang kemudian dilanjutkan dimasukkannya program ini sebagai program nasional. Sampai pada akhir tahun 1998, telah lebih dari satu juta petani di seluruh Indonesia yang telah mengikuti sekolah ini (Global education). Sekolah lapangan untuk petani ini merupakan suatu proyek pelatihan yang didasari oleh inovasi, berdasarkan kegiatan lapangan dan teknik pelatihan partisipatif (FAO, 2005). Tujuan utama dari pelatihan program ini adalah untuk menstabilkan produksi pertanian, khususnya padi, dan untuk mendukung produksi padi yang berwawasan lingkungan dengan memperkenalkan program ini dan mendorong para petani untuk mengadopsinya (Bank Dunia, 2005). Proyek Pelatihan program ini menitikberatkan pada penguatan kelembagaan, dan lebih mengutamakan mendidik para petani daripada hanya memberi instruksi kepada mereka.

Sekolah lapangan untuk petani ini mempunyai pertemuan rutin untuk setiap 12 minggu musim tanaman, mulai dari menanam hingga panen. Para petani belajar mulai dari teori dan teknik dasar hingga bagaimana program ini bisa sukses (FAO, 2005). Sekolah lapangan untuk petani, yang juga disebut sebagai "sekolah tanpa dinding", terdiri atas para pelatih, ahli hama penyakit tanaman dan petani yang telah terlatih, yang bekerja sama dengan sekitar 25 orang petani untuk setiap satu musim tanam. Sebelum menanam, para petani dibagi menjadi satu kelompok yang beranggotakan lima orang untuk

merencanakan kegiatan dan pengalaman mereka (Bank Dunia, 2005).

Para petani melakukan pengamatan di lapangan selama satu atau dua jam. Mereka juga melakukan penghitungan jumlah masing-masing spesies, menganalisis kondisi psikologi tanaman dan mencatat pengamatan tersebut. Setiap kelompok kemudian berkumpul kembali dan berdiskusi, menganalisis dan membahas data yang telah dikumpulkan. Data yang telah dianalisis tersebut disimpulkan dan kemudian dipresentasikan di depan kelompok yang lain. Masing-masing anggota kelompok kemudian mendiskusikan hasil pengamatannya dengan anggota kelompok lainnya. Berdasarkan hasil diskusi tersebut, kemudian mereka membuat suatu perencanaan bagaimana mengontrol hama penyakit tanaman tersebut sesuai dengan kebutuhan lingkungan (FAO, 2005).

PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT TANAMAN TERPADU

Kajian mengenai kesuksesan program Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Terpadu ini sangat diperlukan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Irham *et al* (2003) di Yogyakarta yaitu dimana program ini pertama kali dilaksanakan, ditemukan bahwa program ini mempunyai dampak positif yang sangat signifikan terhadap para petani. Para petani yang telah mengikuti pelatihan program ini telah melakukan kontrol hama penyakit tanaman secara mekanis (khususnya untuk hama tikus),

dibandingkan dengan para petani yang tidak mengikuti pelatihan program ini.

Irham *et al* (2003) juga menemukan bahwa para petani yang telah mengikuti pelatihan tersebut telah mengaplikasikan bahan-bahan non-pestisida, seperti garam dan debu, untuk mengontrol hama dan penyakit tanaman tersebut. Walaupun kedua kelompok tersebut menggunakan pestisida pada tanaman mereka, mereka menggunakannya dengan cara yang berbeda. Hampir sebagian besar dari para petani yang mengikuti program ini menggunakan pestisida hanya bila ada hama menyerang tanaman mereka dan sedikit dari mereka yang menggunakan pestisida secara berlebihan untuk melindungi tanaman mereka (Irham *et al*, 2003). Hal ini sesuai dengan konsep program Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Terpadu yaitu hanya menggunakan pestisida pada saat yang diperlukan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Resosudarmo menyimpulkan bahwa program Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Terpadu dengan mengurangi penggunaan pestisida, secara tidak langsung mengurangi jumlah dampak yang diakibatkan oleh pestisida. Resosudarmo menemukan bahwa dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1998, dengan dijalankannya program ini, maka total biaya kesehatan yang diakibatkan oleh dampak penggunaan pestisida menurun sebesar 5 persen. Diantara penemuannya yang lain, Resosudarmo menyimpulkan bahwa dengan mendorong pelaksanaan program ini

maka akan meningkatkan efisiensi produksi padi (Bellamy, 2000).

KESUKSESAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT TANAMAN TERPADU DI INDONESIA

Program Pengendalian Hama Penyakit Terpadu telah menunjukkan dampak positif terhadap perkembangan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Bank Dunia (2005) menyatakan bahwa pelaksanaan program ini telah membawa manfaat dari segi aspek sosial dan ekonomi. Pada tingkat petani, manfaat yang didapat berupa penghematan biaya produksi karena pengurangan penggunaan pestisida, rendahnya resiko gagal produksi, meningkatnya jumlah produksi, terjaganya kesehatan para petani dan keluarganya, serta lebih terjaganya lingkungan yang lebih baik. Pada tingkat nasional, pelaksanaan program ini dalam skala yang besar diharapkan dapat menurunkan resiko akibat hama penyakit, dapat menghasilkan produksi yang tinggi, meningkatkan biodiversity dari ekosistem padi serta memperkecil resiko pencemaran lingkungan akibat dari penggunaan pestisida yang berlebihan.

Dari penjelasan diatas, sangat jelas bahwa program Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Terpadu ini dapat meningkatkan efisiensi produksi padi. Dari aspek ekonomi, apabila produksi padi berjalan secara efisien, hal ini dapat menurunkan harga jual beras. Yang pada akhirnya, konsumen akan mendapatkan keuntungan dari har-

ga jual beras yang rendah terse-but (Bellamy, 2000).

Irham *et al* (2003) menyatakan bahwa pelaksanaan program ini telah memperlihatkan hasil yang positif dengan berkurangnya penggunaan pestisida pada tana-man padi. Hal ini karena pada sekolah lapangan untuk petani padi dia-jarkan pestisida yang efisien yang mudah untuk diadopsi oleh para petani. Irham *et al* juga menyara-rankan bahwa teknologi yang digu-nakan dalam program ini membe-rikan insentif bagi para petani dimana para petani tidak kehilan-gan produktifitasnya.

Hal lain yang dapat menjadi pelajaran dari kesuksesan program ini yaitu dengan meningkatnya jumlah petani yang terdidik menge-nai pemahaman ekologi dan ling-kungan yang berkelanjutan, dan mempunyai pengetahuan untuk menentukan apa yang terbaik bagi tanaman mereka, apakah mereka memerlukan penggunaan pestisida atau tidak. Para petani sangat menyukai teknik partisipatif yang diberikan kepada mereka, dimana mereka menjadi sebagai pengambil keputusan. Hal ini dibuktikan dari hasil pelatihan yang telah dilaksa-nakan, bahwa para petani tidak hanya memperhatikan kebutuhan untuk melindungi tanaman mereka tetapi juga memperhatikan lingku-ngan disekitar mereka (Bank Dunia, 2005). Dengan mengamati sendiri kondisi lahan mereka, para petani akan memapu melihat kebu-tuhan akan 'keseimbangan ekologi' (*ecological balance*). Mereka dapat mengatasi hama penyakit pada ta-naman padi tanpa harus menga-kiatkan kerusakan lingkungan.

Para petani juga mampu untuk menilai kebutuhan penggu-naan pestisida. Para petani juga belajar untuk mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk pengguna-an waktu dalam mengawasi keada-an tanaman dengan biaya yang mereka keluarkan hanya untuk pembelian pestisida (FAO, 1998).

Tetapi ada satu kelemahan mendasar dari pelaksanaan prog-ram ini di Indonesia. Bank Dunia (2005) menyatakan bahwa masih lemahnya sebaran informasi me-ngenai program ini. Kelemahan lainnya yaitu sekolah lapangan untuk petani mengumpulkan infor-masi berdasarkan pengalaman mereka, namun kurangnya dukun-gan fasilitas untuk menyebarkan informasi yang telah dikumpulkan tersebut. Kemampuan untuk mener-uskan program ini kepada para petani lainnya sangat tergantung kepada kemampuan petani untuk membagi pengalaman mereka. Ka-rena itu, perlu dikembangkan suatu jaringan komunikasi antara petani agar tujuan program ini dapat tercapai lebih luas.

PEMBAHASAN

Altieri(1998) menyatakan bahwa permasalahan lingkungan akibat adanya sistem sosial eko-nomi yang melaksanakan monokul-tur dan penggunaan input teknologi yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan pertanian menyebabkan menurunnya kualitas sumberdaya alam. Altieri menegaskan bahwa penurunan kualitas sumberdaya ini tidak hanya suatu proses ekologi, tapi juga merupakan suatu proses sosial, ekonomi dan politik.

Pengalaman pemerintah Indonesia yang memberikan subsidi kepada para petani membuktikan bahwa kebijaksanaan tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap penggunaan pestisida oleh petani. Para petani secara tidak langsung dipaksa untuk menggunakan pestisida guna meningkatkan produksi beras nasional. Di lain pihak, ketika pemerintah Indonesia menyadari dampak dari penggunaan pestisida yang berlebihan dapat menimbulkan dampak lingkungan dan menurunkan jumlah produksi, maka dikeluarkan Instruksi Presiden yang melarang penggunaan 57 jenis pestisida dan menghentikan subsidi untuk pestisida (FAO, 1998). Maka dari itu, jelaslah bahwa permasalahan dalam produksi pertanian tidak hanya berdasarkan aspek teknologi saja, tetapi perlu dipertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan politik.

Lebih lanjut Altieri (1998) mengemukakan bahwa penurunan dan pembatasan penggunaan bahan kimia dalam kegiatan pertanian memerlukan perubahan yang cukup mendasar dalam manajemen kegiatan pertanian guna memastikan pelaksanaan penggunaan pestisida berjalan dengan baik. Seperti yang pernah dilakukan oleh para petani sejak dulu, bahwa penggunaan nutrisi alami dapat mempertahankan tingkat kesuburan tanah yang bekerja dengan sistem ekologi yang seharusnya. Dengan pelaksanaan program ini, maka dapat mengontrol hama penyakit tanaman secara alami, yang dapat meningkatkan integrasi sistem pertanian.

Conway (2001) menemukan bahwa sistem pertanian seperti sistem

padi sawah di Thailand dikenal dengan modifikasi dari sistem ekologi. Di Thailand, setiap lahan padi sawah dibentuk berdasarkan keadaan lingkungan alaminya. Lingkungan hewan alami dibiarkan apa adanya, seperti ikan dan burung. Proses ekologi secara alami seperti persaingan antara padi dan gulma, perusakan tanaman oleh hama, kemudian penggunaan pupuk, kontrol penggunaan air, hama dan penyakit serta pemanenan. Seluruh aktifitas pertanian ini akan mempengaruhi keputusan sosial dan ekonomi.

Conway (2001) menyarankan salah satu cara untuk mencapai pertanian yang berkelanjutan adalah dengan melindungi ekosistem dari tingkat stress yang tinggi. Dalam pengendalian hama penyakit, perkembangan ketahanan genetik alami dan penggunaan pengendalian hama penyakit tanaman secara menyeluruh lebih baik daripada penggunaan pestisida. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah pemilihan antara faktor eksternal, seperti pupuk dan pestisida, dan faktor internal, seperti predator alami dan jenis tanaman. Hal ini sangat penting karena faktor eksternal, seperti adanya revolusi hijau yang memelopori penggunaan pupuk dan pestisida, telah menimbulkan perubahan yang sangat besar dalam sistem pertanian.

KESIMPULAN

Struktur kebijaksanaan dan pertanian modern telah memberikan pengaruh yang kuat dalam konteks teknologi dan produksi pertanian, sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan yang sangat besar. Para petani diinstruksikan

untuk menggunakan pestisida sebagai komponen penting dalam teknologi modern. Tetapi, pada kenyataannya pestisida sering digunakan tidak dalam jumlah yang proporsional. Hal ini mengakibatkan sistem ekologi yang tidak seimbang. Ketika ekologi diidentifikasi sebagai hal yang paling mendasar untuk dalam melindungi tanaman dan lingkungan, maka diperkenalkan program Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Terpadu.

Di Indonesia, penggunaan pestisida yang berlebihan selama periode tahun 1970an dan 1980an telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Termasuk juga racun dari pestisida yang telah mengkontaminasi produk pertanian. Sehingga pemerintah Indonesia menganjurkan dilaksanakannya program Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Terpadu ini sejak tahun 1989. Keberhasilan program ini telah membuktikan bahwa pengurangan penggunaan pestisida telah meningkatkan keuntungan secara ekonomi bagi para petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Altieri, M. 1998, Ecological Impacts of Industrial Agriculture and the Possibilities for Truly Sustainable farming, *Monthly Review*, Vol. 50, New York, (online), available at: <http://proquest.umi.com/>
- Bank Dunia. 2005, *Integrated Pest Management* (Indonesia), (online), http://www.worldbank.org/html/fpd/technet/ipm_indo.htm
- Bellamy R, 2000. *Integrated Pest Management in Indonesia: The Cost of Chemicals*, (online), http://www.idrc.ca/en/ev-5356-201-1-DO_TOPIC.html
- Budianto. J. 2003, 'Policy Options in Sustainable Agricultural Development in Southeast Asia', in *Proceeding of international workshop on Sustainable Agricultural Development in Southeast Asia*, Research center for regional resources The Indonesian Institute of Sciences (PSDR-LIPI).
- Komisi Dunia bidang Lingkungan dan Pembangunan. 1987, *Our Common Future: Commission for the Australian Future Edition*, Oxford University Press, Australia.
- SConway, G. 2001, 'Sustainable Agriculture', in *A survey of Sustainable Development Social and Economic Dimensions*, ed. J.M. Harris., T.A. Wise., K.P. Gallagher, N.R. Goodwin, Island Press, Washington.
- Food and Agriculture Organization (FAO), 1998. *What is Integrated Pest Management?*, (online), <http://www.fao.org/NEWS/1998/ipm-e.htm>
- Food and Agriculture Organization, 2005. *Integrated Pest Management*, (online), <http://www.fao.org/ag/agp/agpp/IPM/>
- Global education, 2005, *Integrated Pest Management*, (online),

<http://www.globaleducation.edna.edu.au/globaled/go/pid/846>

Irham, Ohga, K., Takada, N., & Sugiura, K. 2003, 'III-5 IPM Technology, Pesticides Use

and Rice Yield', in *Sustainable Agriculture in Rural Indonesia*, ed. Y. Hayashi, S. Hartono, S. Manuwoto, Gadjah Mada University Press.



PEDOMAN PENULISAN JURNAL AGRIBISNIS KERAKYATAN

Naskah diketik pada kertas A4 dengan huruf Georgi , ukuran 12 pts, single spasi, margin kiri dan atas masing-masing 3,5 cm, margin kanan dan bawah masing-masing 2,5 cm.

JUDUL

(Georgia, font 14, Bold, Centre)

Nama Penulis¹

(tanpa gelar akademik, Georgia, font 12,Bold,Centre)

Abstract (ditulis dalam Bahasa Inggris, Georgia, font 12, justify, single spasi, maksimum 200 kata)

Kata Kunci : 3-5 kata

Berikutnya artikel ditulis dalam bentuk 2 kolom, Georgia, font 12, justify, single spasi, dan sub bab dibold dan rata tepi kiri, dengan sistematika sbb:

PENDAHULUAN (berisi latar belakang, tujuan dan ruang lingkup tulisan)

METODE PENELITIAN (berisi metode penelitian, metode pengambilan sampel atau responden, metode pengumpulan data, dan metode analisis data)

HASIL DAN PEMBAHASAN (dapat dibagi dalam beberapa sub-bagian)

PENUTUP (berisi kesimpulan dan saran)

DAFTAR PUSTAKA

Penulisan model matematika, gambar dan tabel diberi nomor sesuai urutan kemunculan. Nomor model matematika ditulis di pinggir kanan, sedangkan nomor dan judul gambar ditulis dibawah gambar, dan nomor dan judul tabel ditulis diatas tabel.

Perujukan referensi menggunakan teknik rujukan berkurung (nama, tahun)

Penulisan daftar referensi disesuaikan dengan urutan nama abjad penulis dan disesuaikan dengan format lazimnya pada daftar pustaka.

¹ Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan dibawah judul artikel, jika penulis lebih dari 3 orang, yang dicantumkan dibawah judul artikel adalah nama penulis utama, nama penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama naskah.

ISSN 1979-9470



9 771979 947016